



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD ini merupakan dokumen visi, misi dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (4) Uraian rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RKPD ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah tantangan realitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek seperti konservasi lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasi menghasilkan sebuah tantangan baru bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta dihadapkan kepada suatu kompleksitas permasalahan yang saling terkait antar sektor, meskipun demikian cita-cita pembangunan DI Yogyakarta yang berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai. Dibutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk menangkap peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas. Optimalisasi sumber daya dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan di DI Yogyakarta akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DI Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (2012) dalam menyongsong peradaban baru yang mana DI Yogyakarta dihadapkan oleh realitas sosial yang begitu dinamis dan saling terkait, perlu kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, dan efektif melalui prioritas sektor yang dijelaskan di 9 bidang strategis dalam Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta. Prioritas Renaisans Yogyakarta terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Pariwisata, (3) Teknologi, (4) Ekonomi, (5) Energi, (6) Pangan, (7) Kesehatan, (8) Keterlindungan Warga, dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan. Kesembilan sektor ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang danerberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

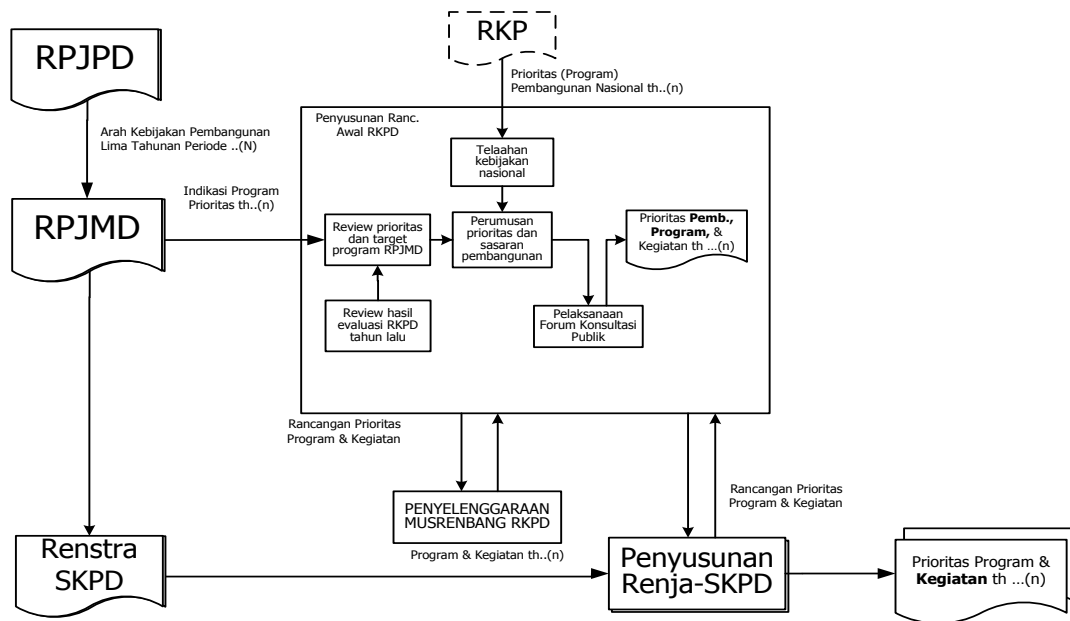
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah DIY dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah DIY dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD DIY 2012-2017. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Gambar 1.1

Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2015 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

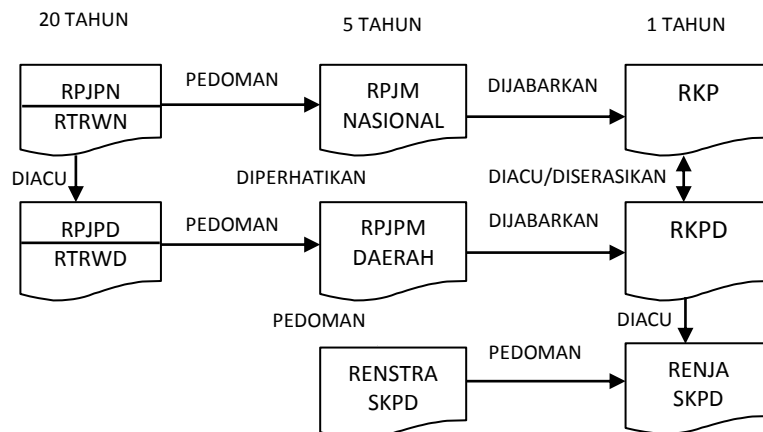
- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015*;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ((Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Gambar 1.2

Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

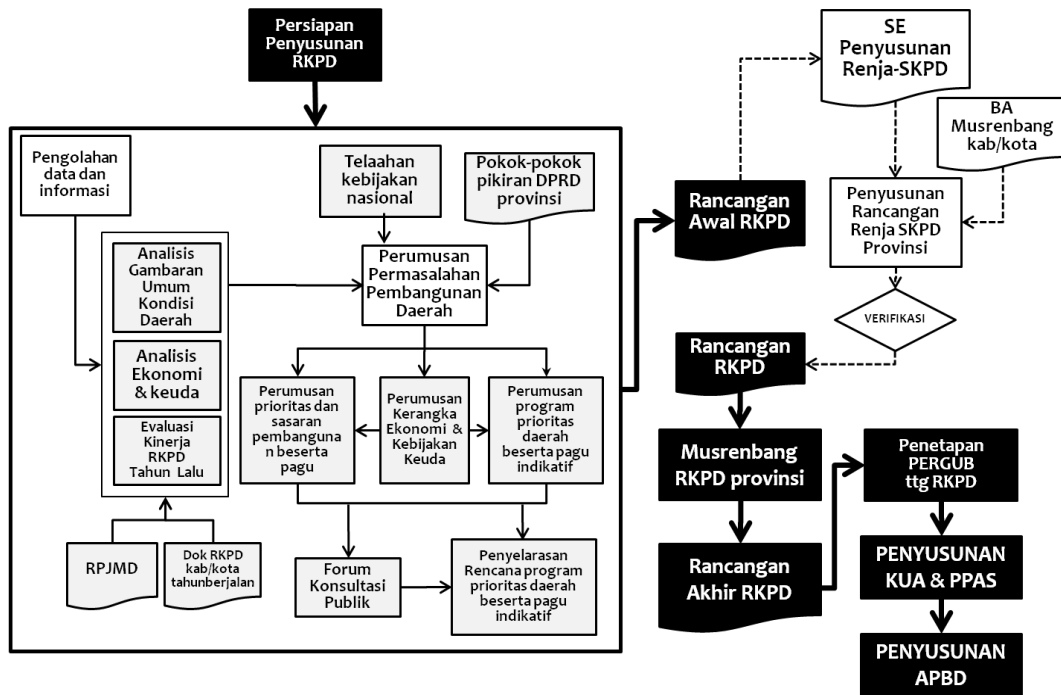
5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2015.



Gambar 1.3
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD DIY

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Aspek Geografi Dan dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

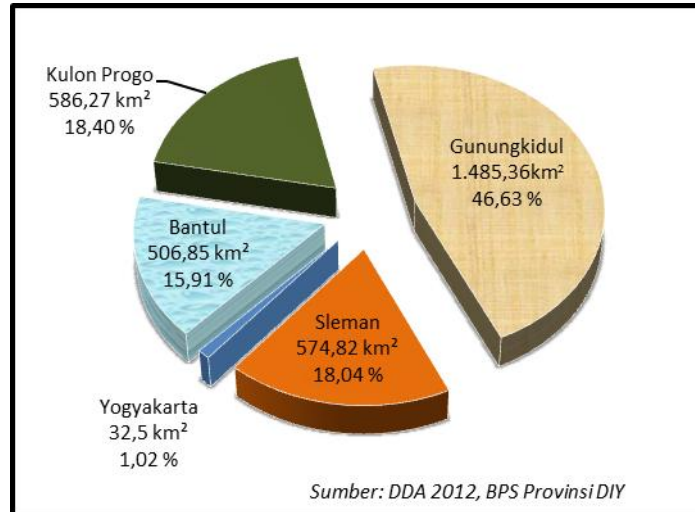
Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia.



Sumber: Bappeda DIY, 2013

Gambar 2.1
Peta Administrasi DIY

Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Komposisi Luas Wilayah DIY

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota, 2012

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

2.1.1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Desa menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis DIY

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/Daerah Aliran Sungai	Lereng/Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	33	0	100	305	438

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

2.1.1.3 Topografi

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100–499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500–999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25$ km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Merapi, seluas $\pm 582,81$ km², ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62$ km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25$ km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Bappeda DIY, 2013

Gambar 2.3
Peta Satuan Fisiografi DIY

2.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{kb}), dan Formasi Mandalika (Tm_{md}).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal.

Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)

Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.

c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)

Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.

d. Formasi Kepek (TmPk)

Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.

e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl)

Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan.

Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu.

Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi

batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air

f. Formasi Sentolo (Tmps)

Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan.

g. Formasi Oyo (Tmo)

Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ni terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss)

Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung.

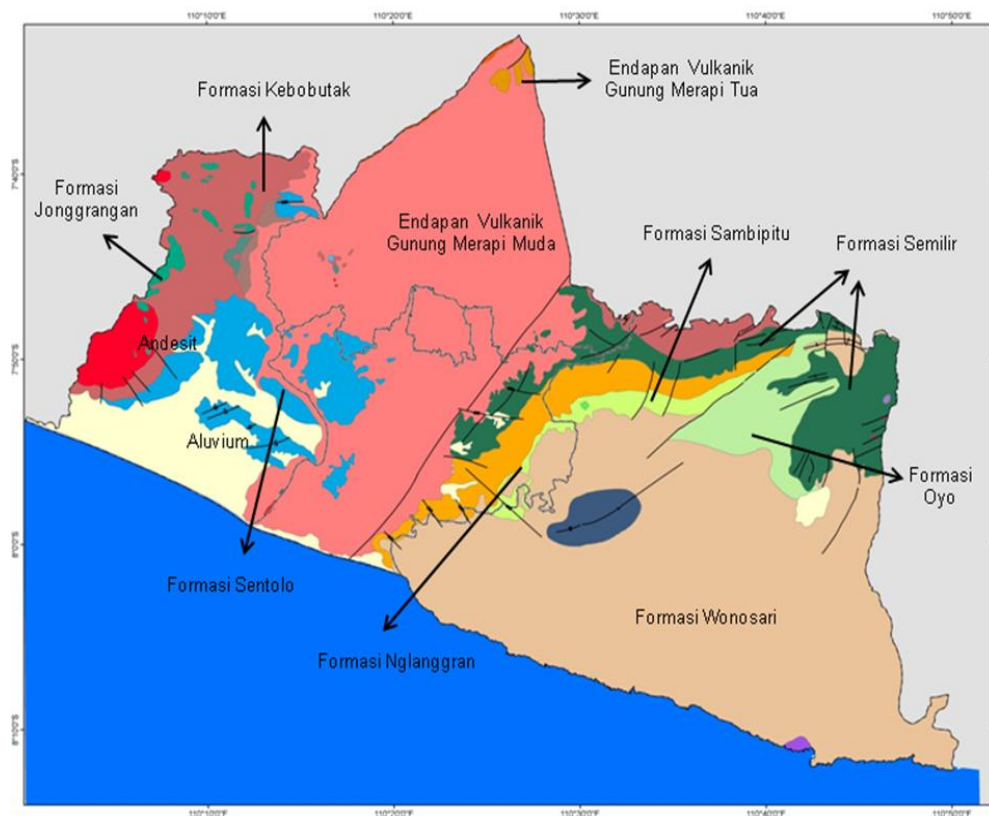
i. Formasi Semilir (Tms)

Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan.

j. Formasi Kebo-Butak (Tomk)

Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini terusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.

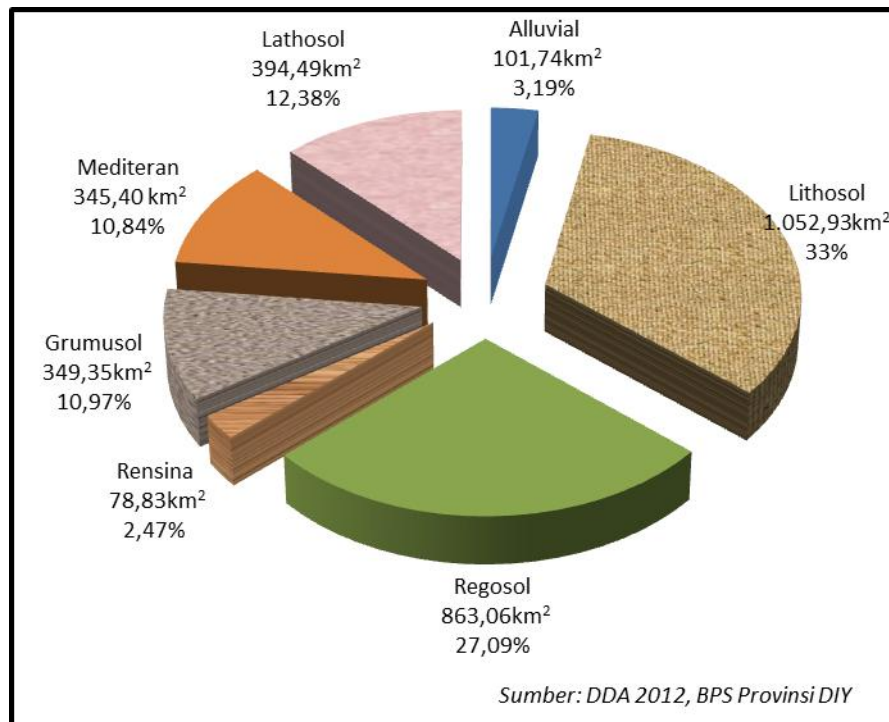
Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.



Gambar 2.4
Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km² atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah

aluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93km², resina 78,83km², grumusol 349,35km², mediteran 345,40km², dan lathosol 394,49km².



Gambar 2.5
Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di DIY

2.1.1.5 Hidrologi

Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan sebagai sumber utamanya. Potensi sumberdaya air di DIY terdiri dari air permukaan, dan air tanah. Potensi air permukaan berada di DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, DAS Oyo dan DTA Karst. Sedangkan untuk potensi air tanah adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta, CAT Sleman dan CAT Wates.

Secara umum DIY dibagi dalam Daerah Aliran Sungai besar dan kecil, yaitu : DAS Progo, Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong, Opak, Serang dan Oya sebagai penyedia sumber air irigasi. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

- a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Tabel 2.4
Potensi Ketersediaan Air Tahun sampai Tahun 2011(dalam juta m³)

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Selain memiliki potensi pemenuhan kebutuhan sumber daya air, beberapa diantaranya juga memiliki potensi daya rusak yang mendapatkan cukup perhatian dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2.5
Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)			
	2011		2012	
	Maks	Min	Maks	Min
Sungai Progo (Sta. Karangtalun)	189,50	6,70	107,6	17,9
Sungai Opak (Sta. Tirtorejo)	70,90	0,50	49,50	0,40

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)			
	2011		2012	
	Maks	Min	Maks	Min
Sungai Oyo (Sta. Bunder)	28,0	0,8	17,4	0,3
Sungai Code (Sta. Sidomulyo)	28,85	1,40	8,40	0,90
Sungai Gadjahwong (Sta. Bangerang)	15,50	0,60	3,80	0,40
Sungai Winongo (Sta. Tanjung)	17,60	2,00	9,00	2,00
Sungai Bedog (Sta. Pijenan)	32,20	1,10	62,80	1,80

Sumber: Data BLH dan DPUP-ESDM DIY Diolah, Tahun 2012

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan airtanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m³ /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m³ air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Walaupun demikian, menurut Suharyadi (1998), dan Wilopo, (1999) pada beberapa daerah yang bersifat lokal degradasi muka airtanah tercatat cukup signifikan akibat pengumpulan lokasi-lokasi sumur eksploitasi airtanah pada beberapa area.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m³/tahun dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m³/tahun. (Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012)

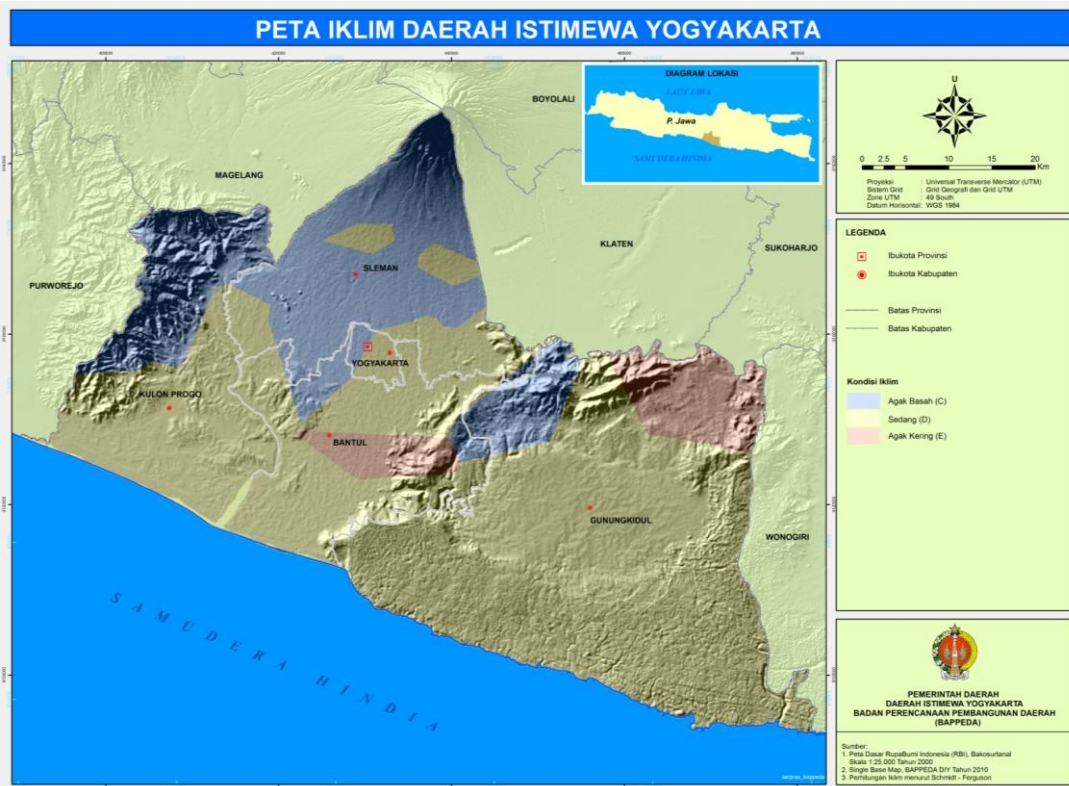
Untuk keperluan pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (Dinas PUP PSDM, 2012)

2.1.1.6 Klimatologi

Suhu udara tahunan di DIY berkisar antara 18°C sampai dengan 24°C. Curah hujan tahunan di DIY berkisar antara 718 mm/th sampai 2292,3 mm/th. Curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan.

Kelembaban udara tercatat minimum 31% dan maksimum 97%, tekanan udara antara 986,4 – 1001,6 mb dengan arah angin antara 1°-360° dan kecepatan angin antara 0,0 - 18 knot.

Peta iklim dibawah ini menunjukkan kondisi iklim di wilayah DIY yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering.

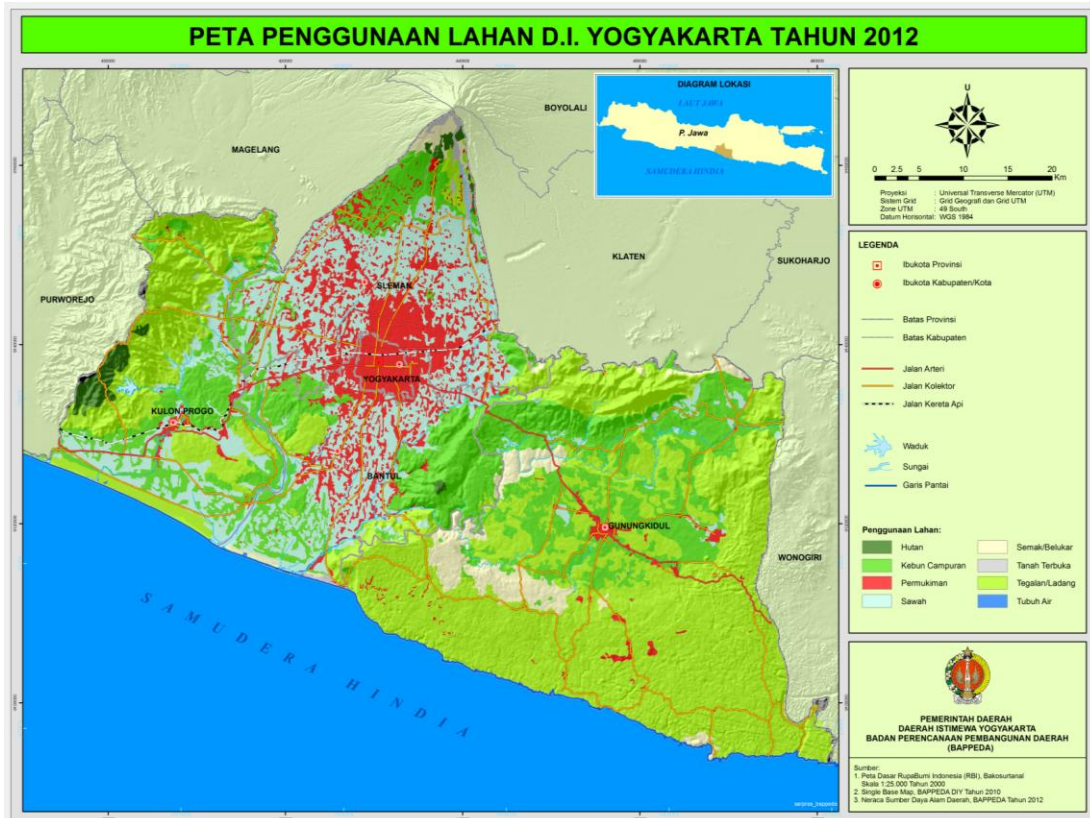


Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.6
Peta Iklim di DIY

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.



Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan DIY, 2012

Selanjutnya, menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY No. 2 Tahun 2010, penetapan kawasan lindung bawahan terdiri dari:

- 1) Penetapan hutan lindung seluas 2.312,8000 ha tersebar di tiga kabupaten, yaitu:
 - a. Kabupaten Bantul seluas 1.041,2000 ha di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri;
 - b. Kabupaten Kulon Progo seluas 254,9000 ha terletak di Kecamatan Kokap;
 - c. Kabupaten Gunungkidul seluas 1.016.7000 ha terletak di Kecamatan Karangmojo, Playen, dan Panggang.

- 2) Penetapan Hutan Fungsi Lindung di:
 - a. Kabupaten Sleman terletak di Kecamatan Tempel;
 - b. Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo;
 - c. Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Temon;
 - d. Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zona Gunungsewu meliputi Kecamatan Ponjong, Purwosari, dan Rongkop.

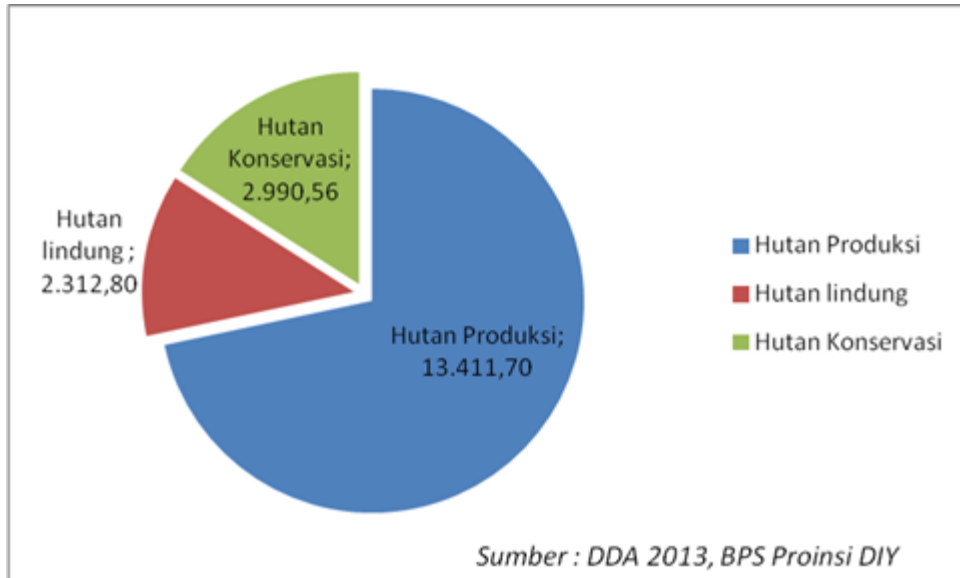
- 3) Penetapan kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Penetapan kawasan lindung setempat, yaitu: 1) kawasan sepadan pantai ditetapkan sepanjang dataran Pantai Selatan. 2) kawasan sepadan sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan pada Sungai Bogowonto, Progo, dan Opak. 3) Kawasan sepadan waduk, embung, telaga, dan laguna ditetapkan di kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. 4) kawasan sepadan mata air ditetapkan di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan suaka alam DIY yang merupakan bagian dari kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut:

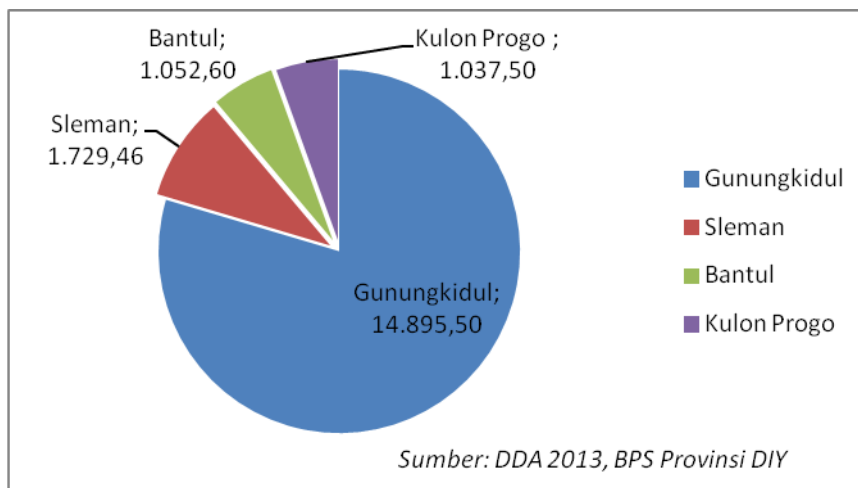
- 1) Cagar alam geologi dan hutan penelitian di Kabupaten Gunungkidul;
- 2) Cagar alam di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman) seluas 0,0150 ha dan cagar alam di Kecamatan Imogiri (Kabupaten Bantul) seluas 11,4000 ha;
- 3) Taman hutan raya terletak di Kecamatan Patuk dan Playen (Kabupaten Gunungkidul) seluas 617 ha;
- 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di seluruh kabupaten/kota.

Kondisi tahun 2012, hutan di DIY tercatat seluas 18.715,06 ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 13.411,70 ha, hutan lindung seluas 2.312,80 ha dan hutan konversi seluas 2.990,56 ha. Hutan konversi terdiri dari Cagar Alam 11,40 ha; Taman Wisata Alam 1.046,00 ha; Suaka Margasatwa 615,60 ha; Taman Nasional 1.729,46 ha; dan Taman Hutan Raya 634,10 ha.



Gambar 2.8
Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan di DIY (hektar), 2012

Hutan di DIY tersebar di empat kabupaten, hutan terluas terletak di Kabupaten Gunungkidul 14.895,50 ha diikuti oleh Kabupaten Sleman 1.729,46 ha; Kabupaten Bantul 1.052,60 ha; dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 ha.



Gambar 2.9
Luas Hutan menurut Kabupaten/Kota di DIY (hektar), 2012

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari:

1) Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diantaranya adalah :

- a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
- d. mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada:

- a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha;
- b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha

2) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, mpenjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;

- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

3) Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:

- a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;
- b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong dan Panggang, sementara untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin
- b. Kabupaten Kulon Progo yaitu:
 - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih;
 - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
- c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

4) Kawasan Industri

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran. Arahan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten

Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

5) Kawasan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

- a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

6) Kawasan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arahan penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu:

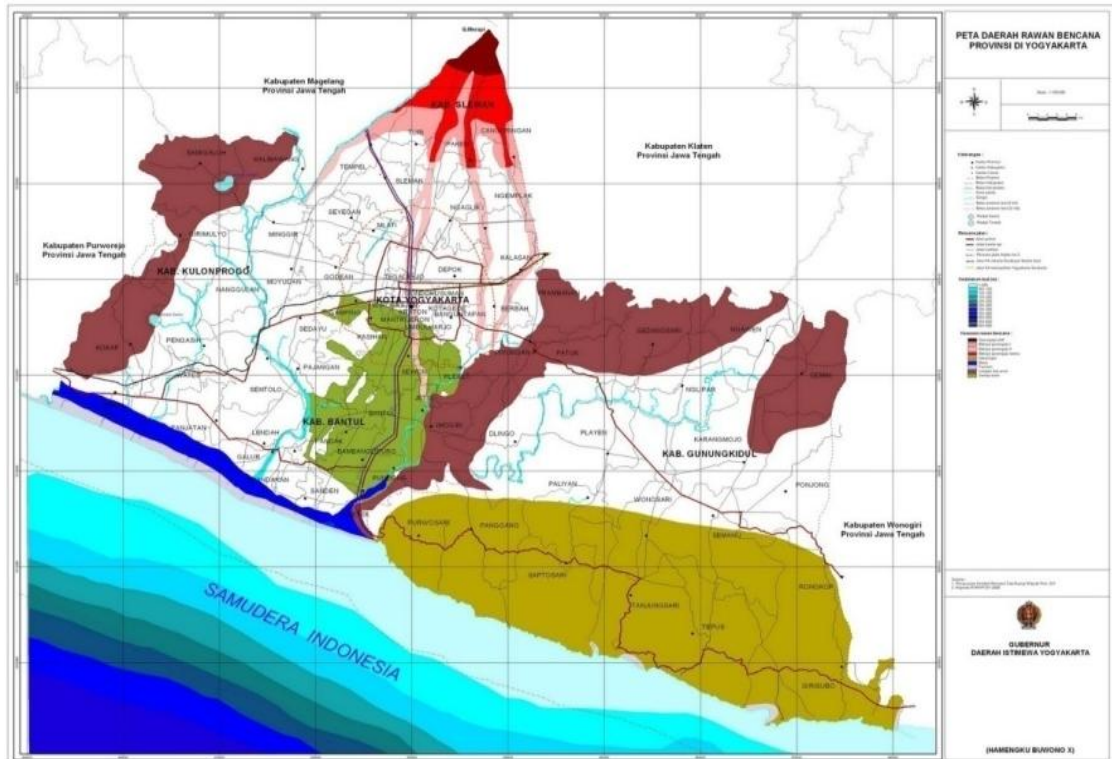
- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
- b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, penetapan kawasan rawan bencana alam di DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- 3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- 4) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
- 5) Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.
Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- 6) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota.
Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.

- 7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).



Sumber: RTRW DIY, 2009-2029

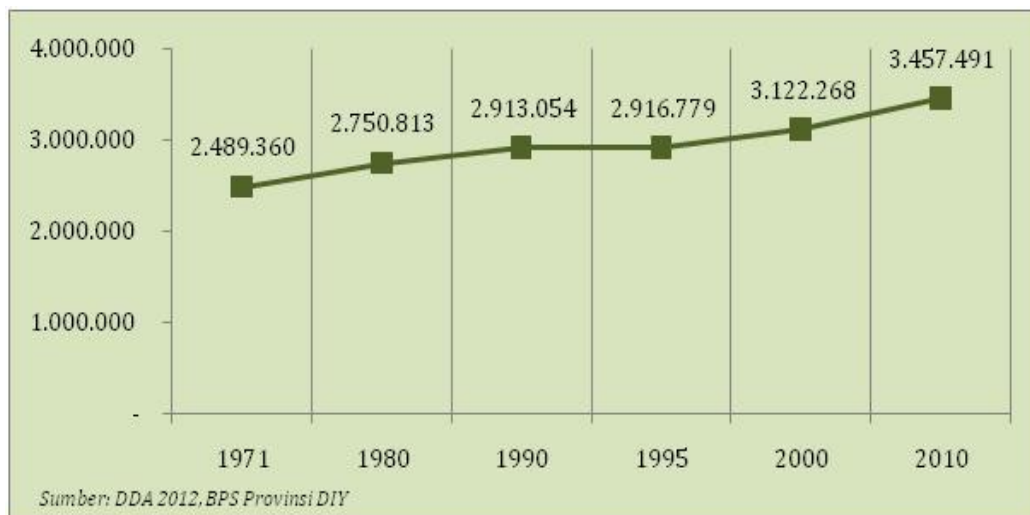
Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya selama ini relatif kecil.

2.1.4 Demografi

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dari hasil estimasi diperkirakan mencapai 3.514.762 jiwa.



Gambar 2.11
Perkembangan Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk
dan Sensus Penduduk antar Sensus, 1971-2010

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas

mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010
0 - 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96
15 - 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kondisi tahun 2012 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.514.762 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.114.833 orang. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 393.221 orang.

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 49,43%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya *sex ratio* DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki *sex ratio* tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%. Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.7

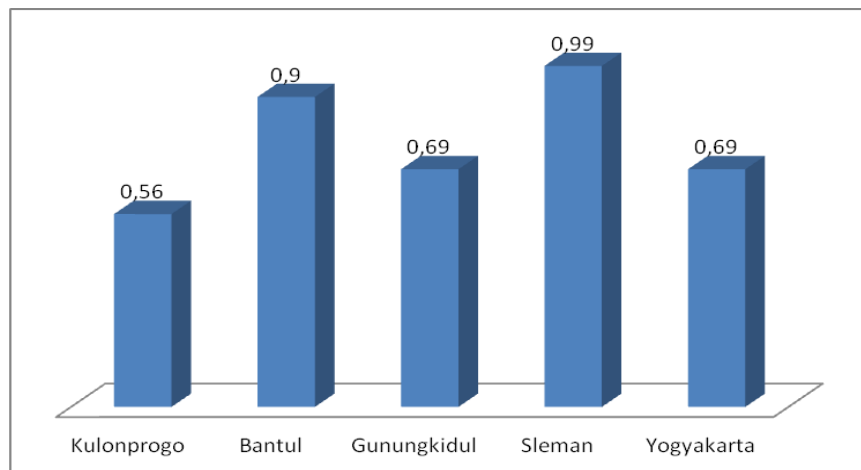
Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	192.829	200.392	393.221	96,23
Bantul	462.793	465.158	927.956	99,49
Gunungkidul	331.220	353.520	684.740	93,69
Sleman	558.900	555.933	1.114.833	100,53
Kota Yogyakarta	191.759	202.253	394.012	94,81
DIY	1.737.506	1.777.256	3.514.762	97,76

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,82% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Pada tahun 2012 Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 0,99%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan oleh semakin jenuhnya Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota. Secara grafis laju pertumbuhan penduduk kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada diagram batang dibawah ini :



Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2012

Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 461 orang/km² sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki

wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 orang (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.123 orang/km².

Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten dan Kota diwilayah DIY pada tahun 2012 :

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk
Kulonprogo	586,27	393.221	671
Bantul	506,85	927.956	1.831
Gunungkidul	1.485,36	684.740	461
Sleman	574,82	1.114.833	1.939
Yogyakarta	32,50	394.012	12.123
DIY	3.185,80	3.514.762	1.103

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk Kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.13
Peta Kepadatan Penduduk di DIY

Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

Tabel 2.9
IPM DIY menurut Komponen, 2009-2012

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32
2012	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2012

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, IPM DIY tercatat sebesar 76,75 naik dari angka IPM tahun 2011 yang sebesar 76,32. Nilai IPM DIY tahun 2012 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

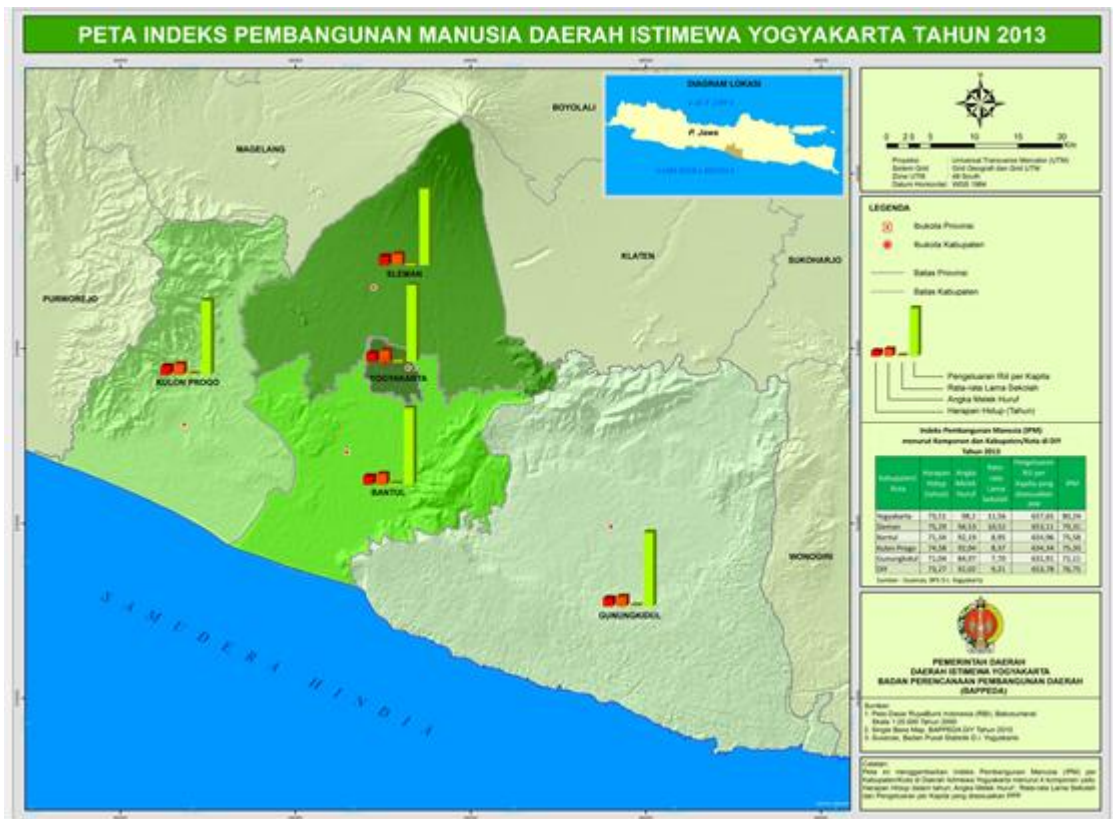
Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY dan peringkat kedua capaian IPM adalah Kabupaten Sleman.

Tabel 2.10
IPM antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	IPM				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,58
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84	71,11
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79	79,31
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89	80,24
DIY	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2012

Dibawah ini adalah peta IPM masing-masing Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2012.



Gambar 2.14
Peta IPM di DIY

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

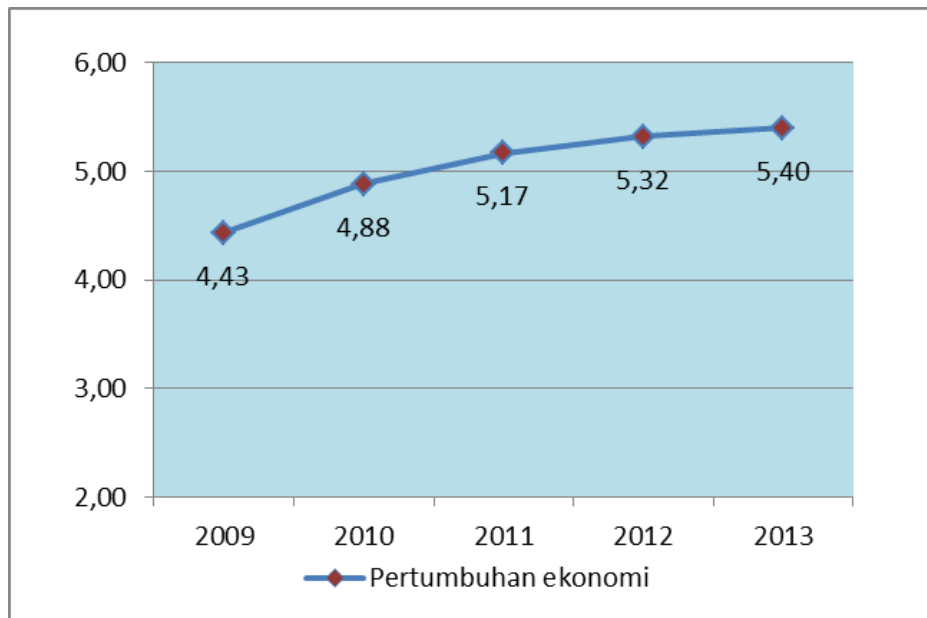
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,04% per tahun. Kondisi tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,40% yang berarti bahwa kinerja perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 bahkan merupakan angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 7,81%. Industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil; serta industri furnitur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri

pengolahan yang produksinya sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (6,54%) serta sektor pengangkutan dan komunikasi (6,30%). Kemudian disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.15
Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2009-2013

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Bahkan lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa.

Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier terkait dengan perkembangannya sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan peranan sektor pertanian yang merupakan sektor primer cenderung menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat konversi lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY

mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di DIY.

Selama kurun waktu 2009-2013, nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 41,41 trilyun rupiah dan pada tahun 2013 mencapai 63,69 trilyun rupiah yang berarti PDRB DIY secara nominal mengalami kenaikan sebesar 22,28 trilyun rupiah atau 53,82% selama kurun lima tahun tersebut.

Tabel 2.11
Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2009-2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	6.366.771	6.644.695	7.373.852	8.355.326	8.861.281
Pertamb. & Penggalian	293.983	304.660	361.793	379.951	416.531
Industri Pengolahan	5.528.856	6.396.639	7.434.020	7.611.825	8.771.188
Listrik, Gas & Air Bersih	560.316	607.072	675.912	727.714	796.704
Konstruksi	4.431.411	4.833.423	5.580.599	6.186.322	6.908.381
Perdagangan, Hotel & Restoran	8.165.613	9.008.181	10.246.578	11.457.201	13.152.524
Pengangkutan & Komunikasi	3.809.094	4.119.970	4.572.928	4.903.522	5.400.530
Keu., Real Estate & Js Perusahaan	4.090.675	4.552.667	5.158.229	5.876.203	6.543.153
Jasa-jasa	8.160.329	9.158.283	10.381.238	11.536.320	12.840.026
PDRB	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 selama kurun waktu 2009-2013 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB riil tercatat sebesar 20,06 trilyun rupiah kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,57 trilyun rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB DIY naik sebesar 4,51 trilyun rupiah atau 22,44%. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor.

Tabel 2.12
Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
menurut Lapangan Usah (Juta Rupiah), 2009-2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3.642.696	3.632.681	3.557.865	3.706.923	3.730.297
Pertamb. & Penggalian	138.748	139.967	156.711	159.808	167.669
Industri Pengolahan	2.610.760	2.793.580	2.983.167	2.915.722	3.142.836
Listrik, Gas & Air Bersih	185.599	193.027	201.243	215.597	229.640
Konstruksi	1.923.720	2.040.306	2.187.805	2.318.448	2.459.173
Perdagangan, Hotel & Restoran	4.162.116	4.383.851	4.611.402	4.920.045	5.225.056
Pengangkutan & Komunikasi	2.128.594	2.250.664	2.430.696	2.581.620	2.744.146
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	1.903.411	2.024.368	2.185.221	2.402.718	2.552.445
Jasa-jasa	3.368.614	3.585.598	3.817.665	4.088.337	4.316.214
PDRB	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.309.218	24.567.476

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Tabel 2.12 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode 2009-2013 struktur perekonomian DIY didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sedangkan peranan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2013.

Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar pada PDRB DIY dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 20,04%. Setelah itu diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,99%); sektor pertanian (14,54%), serta sektor industri pengolahan dengan kontribusi 13,77%.

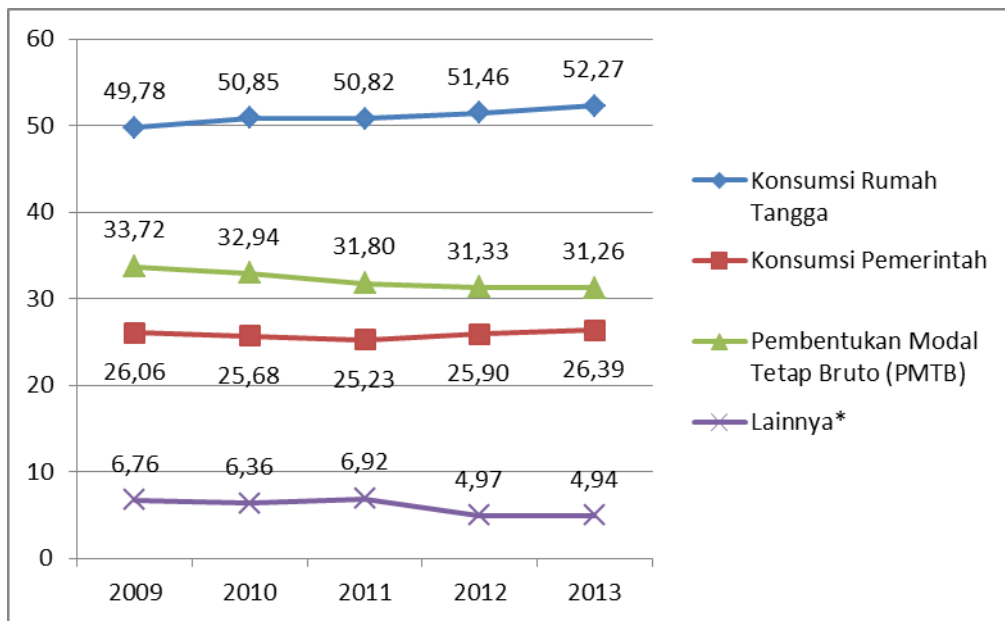
Tabel 2.13
Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha, 2008-2012

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	15,38	14,56	14,24	14,65	13,91
2. Pertambangan & Penggalian	0,71	0,67	0,70	0,67	0,65
3. Industri Pengolahan	13,35	14,02	14,36	13,35	13,77
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,35	1,33	1,31	1,28	1,25
5. Konstruksi	10,70	10,59	10,78	10,85	10,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,72	19,74	19,79	20,09	20,65

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
7. Pengakutan & Komunikasi	9,20	9,03	8,83	8,60	8,48
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,88	9,98	9,96	10,30	10,27
9. Jasa-Jasa	19,71	20,07	20,05	20,23	20,16
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Tabel 2.14 menunjukkan nilai PDRB DIY menurut penggunaan. Selama kurun waktu 2009-2013 PDRB DIY menurut penggunaan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga; investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran tersebut perkembangannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.



Keterangan: *)termasuk Konsumsi Lembaga Nirlaba, Perubahan Inventori, dan Diskrepansi Statistik
 Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.16
Distribusi PDRB DIY menurut Penggunaan ADHB (%), 2009-2013

Selama tahun 2013 perekonomian DIY didorong oleh meningkatnya semua komponen permintaan akhir dalam PDRB penggunaan, terutama konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh sebesar 5,82%. Dibandingkan dengan pertumbuhan selama tahun 2012 yang mencapai 6,74%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2013 sedikit melambat sebagai dampak dari melemahnya daya beli

masyarakat akibat kenaikan harga (inflasi) barang dan jasa kebutuhan rumah tangga yang mencapai level 7,32% selama tahun 2013.

Komponen PMTB selama tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%. Hal ini berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Komponen konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh positif sebesar 5,31% selama tahun 2013. Pencairan dana khusus sebagai implementasi Keistimewaan Yogyakarta memberi sedikit pengaruh terhadap peningkatan konsumsi pemerintah selama tahun 2013. Ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah dan luar negeri oleh penduduk DIY masih cukup tinggi.

Tabel 2.14
PDRB DIY ADHB menurut Penggunaan, 2009-2013

Jenis Penggunaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Konsumsi Rumah Tangga	20.610.786	23.198.864	26.319.415	29.350.917	33.293.530
2. Konsumsi Pemerintah	10.789.365	11.709.925	13.066.881	14.773.182	16.809.330
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13.964.317	15.027.836	16.466.550	17.868.279	19.908.290
4. Lainnya*	2.797.188	2.903.463	3.585.611	2.833.175	3.143.380
5. Ekspor Barang & Jasa :	15.989.976	17.873.357	20.145.476	23.528.777	26.907.820
Dikurangi :					
6. Impor Barang & Jasa :	22.744.584	25.087.856	27.781.823	31.319.947	36.372.040
P D R B	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.320

Keterangan: *)termasuk Konsumsi Lembaga Nirlaba, Perubahan Inventori, dan Diskrepansi Statistik
Sumber: BPS Provinsi DIY

Pertumbuhan ekonomi DIY Nilai konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga pada tahun 2013 tercatat sebesar 33,29 trilyun rupiah dari total nilai PDRB DIY sebesar 63,69 trilyun rupiah atau mencapai sekitar 52,57%. Persentase tersebut meningkat dibanding tahun 2012 yang mencapai 51,46%. Relatif tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam PDRB penggunaan menunjukkan bahwa komponen ini masih berperan besar untuk menggerakkan perekonomian.

Selama rentang waktu tahun 2009-2013, kecenderungan besarnya porsi konsumsi non makanan dalam konsumsi rumah tangga di DIY terkait dengan konsumsi penduduk di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang telah mengarah pada pola konsumsi penduduk perkotaan yang ditandai dengan konsumsi non makanan relatif besar. Hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya

tingkat kesejahteraan penduduk. Hukum Engel menyatakan, bahwa dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maka porsi makanan akan semakin berkurang.

Nilai PDRB yang berasal dari konsumsi pemerintah selama tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,85%. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat sebesar 16,81 triliun rupiah atau memberi andil sekitar 26,39% terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2011. Hal ini berarti terjadi peningkatan kontribusi sebesar 0,49%.

Nilai investasi fisik (PMTB) DIY tahun 2013 mencapai 19,91 triliun rupiah atau naik sekitar 2,04 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 17,87 triliun rupiah. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDRB DIY justru mengalami penurunan sebesar -0,07% dari 31,33% pada tahun 2012 menjadi 31,26% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB DIY lebih didominasi oleh konsumsi yang kontribusinya terus menggeser pengeluaran untuk investasi.

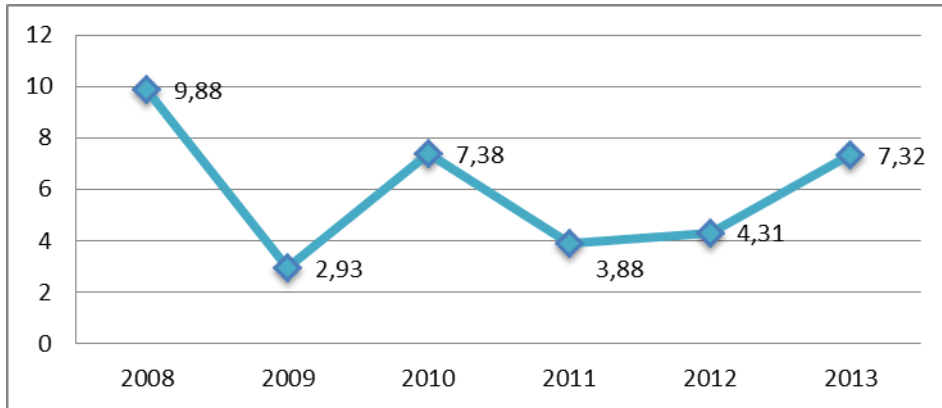
Sementara itu, nilai ekspor barang dan jasa DIY meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,38 triliun rupiah. Namun, nilai impor barang dan jasa juga meningkat pada tahun 2013, bahkan melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama, sehingga nilai ekspor neto DIY bertanda negatif sebesar -9,46 triliun yang berarti barang dan jasa yang diimpor lebih besar dari barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah.

Sumbangan impor dalam PDRB cenderung meningkat dari 54,93% pada tahun 2009 menjadi 57,11% pada tahun 2013. Disamping untuk memenuhi konsumsi domestik, beberapa komoditas yang diimpor juga digunakan untuk konsumsi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di DIY sebagian dire-ekspor karena tidak dikonsumsi seluruhnya.

2.2.2.2 Laju Inflasi

Laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta. Potensi terjadinya kenaikan harga-harga di DIY biasanya terjadi menjelang perayaan hari besar dan musim liburan sekolah yang menyebabkan lonjakan permintaan barang/jasa tertentu. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Selama tahun 2008-2013, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 9,88% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 2,93%.



Ket: Tahun 2013 angka sementara
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.17
Perkembangan Laju Inflasi Kota Yogyakarta (%), 2008-2013

Tahun 2013, berdasarkan angka sementara diketahui bahwa inflasi Kota Yogyakarta tercatat sebesar 7,32% yang disumbang dari inflasi kelompok bahan makanan sebesar 12,31% dan dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 8,15%.

Inflasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok sandang. Kelompok transportasi dan komunikasi bahkan meningkat sangat signifikan sumbangannya pada inflasi tahun 2013. Hal ini dimungkinkan karena adanya kenaikan harga BBM.

Tabel 2.15
Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran 2008-2013

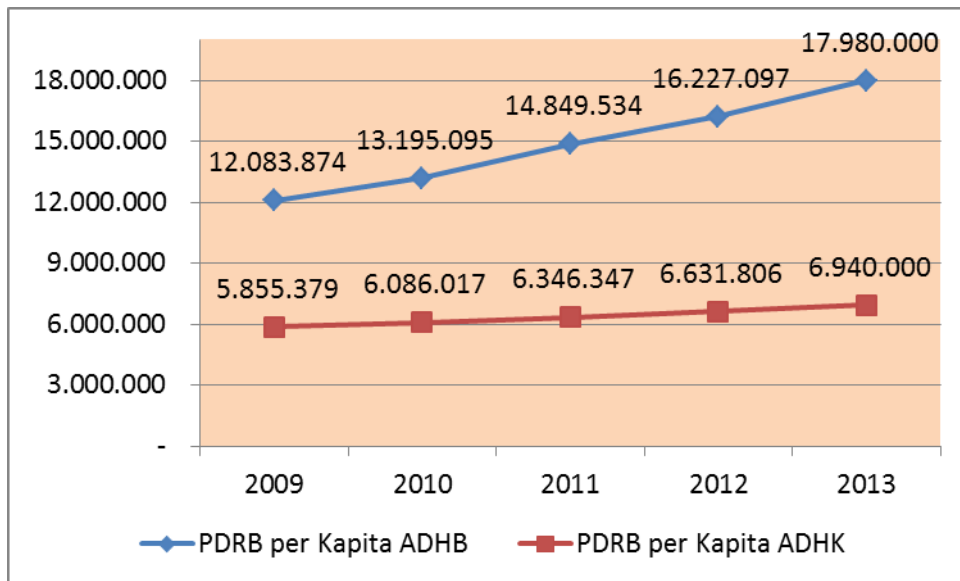
No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Bahan Makanan	14,87	3,91	18,86	1,82	8,10	12,31
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	9,40	7,50	5,47	7,07	6,90	8,15
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	13,60	1,40	5,49	3,01	2,99	5,18
4	Sandang	8,36	5,81	5,41	9,40	3,56	0
5	Kesehatan	8,23	1,86	1,97	5,64	1,93	3,08
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	5,77	2,26	4,25	1,73	1,43	3,17

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013*
7	Transportasi & komunikasi	2,97	(1,23)	5,57	2,40	1,30	10,45
	Inflasi Kota Yogyakarta	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31	7,32

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

2.2.2.3 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita DIY baik secara riil maupun nominal selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, nilai PDRB per kapita secara nominal tercatat sebesar 12,08 juta rupiah, kemudian naik mencapai 17,98 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik sebesar 5,89 juta rupiah. Sementara itu, secara riil PDRB per kapita pada tahun 2009 sebesar 5,86 juta rupiah naik menjadi 6,94 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik sebesar 1,08 juta rupiah.

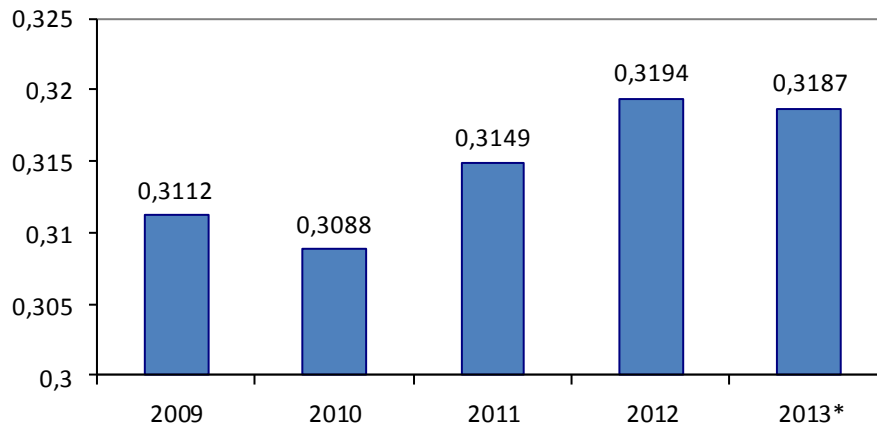


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.18
Nilai PDRB per Kapita DIY (rupiah), 2009-2013

2.2.2.4 Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ukuran tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat dilihat dari besar Indeks Gini.



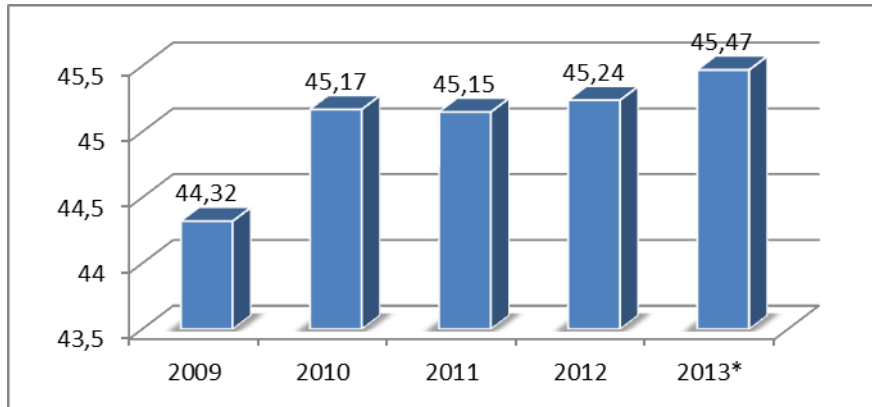
Keterangan: *) angka estimasi
 Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.19
Rasio Gini di DIY(%), 2009–2013

Indeks Gini tahun 2009-2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Menurut kategori yang dibuat Oshima, angka Gini Rasio DIY tergolong pada kelompok ketimpangan moderat (0,3-0,5). Indeks Gini pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di DIY semakin menyempit walaupun belum terlalu signifikan.

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Regional

Ketimpangan antar wilayah di DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2009-2013 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 44,32% tahun 2009 menjadi 45,47% tahun 2013. Menurut Tipologi Klassen meningkatnya kesenjangan perekonomian ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di DIY, sehingga pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota.



Keterangan: *) angka estimasi
 Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.20
Indeks Williamson DIY, 2009-2013

2.2.2.6 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

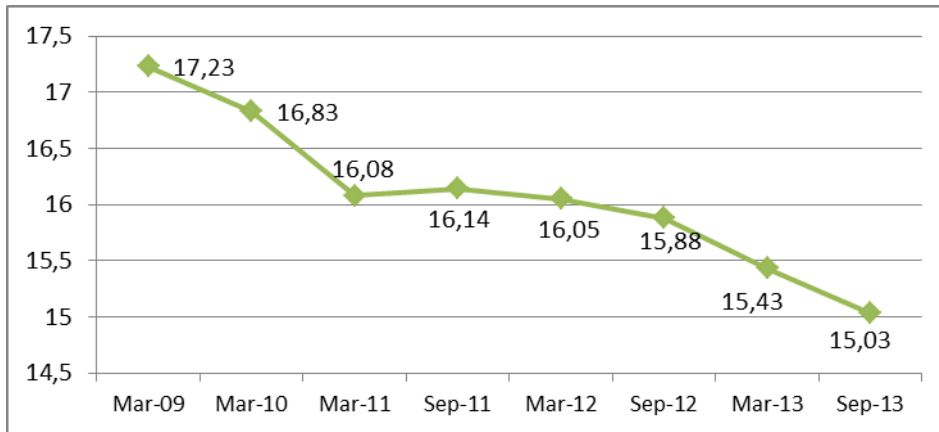
Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2012 mengalami peningkatan. Pada Maret 2009 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar 220.830 rupiah per kapita per bulan. Sementara kondisi tahun 2013, pada posisi Maret tercatat sebesar 283.454 rupiah per kapita per bulan naik menjadi 303.843 rupiah per kapita per bulan pada bulan September sehingga selama enam bulan telah terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 7,19%. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi selama periode tersebut yang mencapai 3,49%.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan, 2009-2013

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)
Maret 2009	220.830	585,78
Maret 2010	234.282	577,30
Sept 2011	257.909	564,23
Maret 2012	260.173	565,32
Sept 2012	270.110	562,11
Maret 2013	283.454	550,19
Sept 2013	303.843	535,18

Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2013

Jumlah penduduk miskin DIY pada periode 2009 hingga 2013 cenderung mengalami penurunan dari 585,78 ribu orang pada Maret 2009 menjadi 535,18 ribu orang pada September 2013. Hal ini berarti terjadi penurunan sejumlah 50,6 ribu orang selama kurun waktu empat tahun walaupun sempat terjadi kenaikan pada periode Maret 2012.



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2013

Gambar 2.21
Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2013

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2009-2013 tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2009 tercatat mencapai 17,23% kemudian menurun menjadi 15,03% pada September 2013 atau terjadi penurunan sebesar 2,2% dalam empat tahun.

Penduduk miskin tersebar di perkotaan (60,83%) maupun perdesaan (39,17%). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebanyak 325,53 ribu orang, bertambah 19,02 ribu orang bila dibandingkan keadaan September 2012 yang mencapai 306,51 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2013 sebanyak 209,66 ribu orang, mengalami penurunan sekira 46 ribu dari keadaan September 2012 yang jumlahnya mencapai 255,60 ribu orang. Hal ini sebagai akibat dari urbanisasi penduduk ke wilayah perkotaan

Tabel 2.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Tipe Daerah, September 2012 - September 2013

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
September 2012	306,51	13,10
Maret 2013	315,47	13,43
September 2013	325,53	13,73
Perdesaan		
September 2012	255,60	21,29
Maret 2013	234,73	19,29
September 2013	209,66	17,62
Kota+Desa		
September 2012	562,11	15,88
Maret 2013	550,19	15,43
September 2013	535,18	15,03

Sumber: Susenas September 2012, Maret 2013, dan September 2013

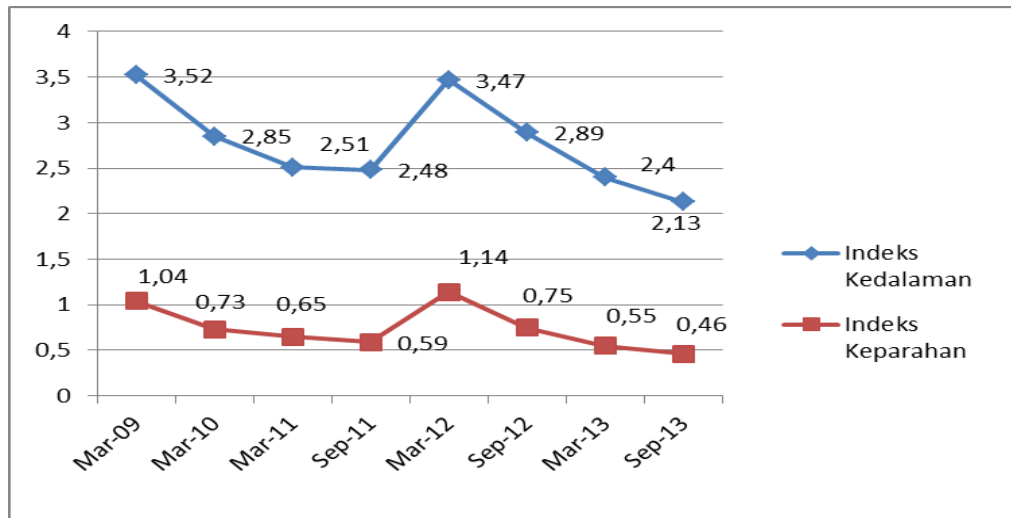
Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebesar 13,73 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan keadaan September 2012 yang besarnya mencapai 13,10 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2013 sebesar 17,62 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan September 2012 yang mencapai 21,29 persen.

Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) pada periode September 2012-September 2013 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,89 pada September 2012 menjadi 2,13 pada September 2013. Secara umum dalam kurun waktu Maret 2009 hingga September 2013 cenderung mengalami penurunan, walaupun pada periode Maret 2012 sempat mengalami kenaikan.

Demikian pula Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,75 menjadi 0,46 pada periode yang sama (Tabel 2). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin

mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Selama kurun Maret 2009 hingga September 2013, Indeks keparahan kemiskinan juga memiliki kecenderungan yang sama dengan Indeks Kedalaman.



Sumber: Susenas Maret 2009 - September 2013

Gambar 2.22
Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2009-2013

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2013 di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada bulan September 2013 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan mencapai 2,18, sementara di daerah perdesaan mencapai 2,04. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,34. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah perkotaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Tabel 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, September 2012- September 2013

Tahun	Kota	Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		
September 2012	2,29	4,07
Maret 2013	2,08	3,02
September 2013	2,18	2,04

Tahun	Kota	Desa
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
September 2012	0,58	1,10
Maret 2013	0,50	0,63
September 2013	0,52	0,34

Sumber: Susenas Maret 2012, September 2012, dan Maret 2013

2.2.2.7 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Jumlah kejahatan yang terselesaikan adalah penanganan kejahatan oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah kejahatan yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah kejahatan yang terselesaikan di DIY dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Kejahatan	Terselesaikan	Persentase Kasus Kejahatan Terselesaikan
2008	5.669	2.639	47
2009	7.034	2.682	38
2010	7.980	2.728	34
2011	7.123	2.942	41
2012	6.377	2.950	46

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah kejahatan di DIY dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung fluktuatif, meskipun demikian jumlah kejahatan yang terselesaikan dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

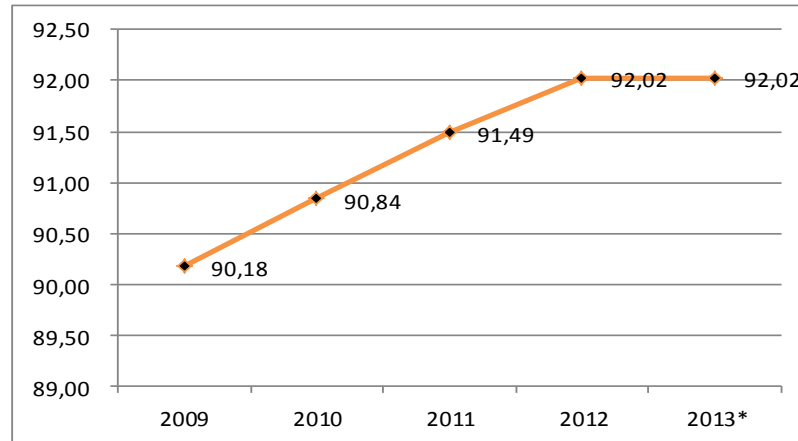
Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas

hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2009-2012 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% kemudian naik menjadi 90,84% di tahun 2010 dan menjadi 91,49% dan 92,02% di tahun 2012. Berdasar data BPS, sekitar 8% penduduk DIY buta huruf, yang sebagian besar ditengarai berusia 50 tahun keatas.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

*: Angka Sementara

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Melek Huruf DIY
Tahun 2009-2012

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,10% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 84,97%. Capaian Angka Melek Huruf DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

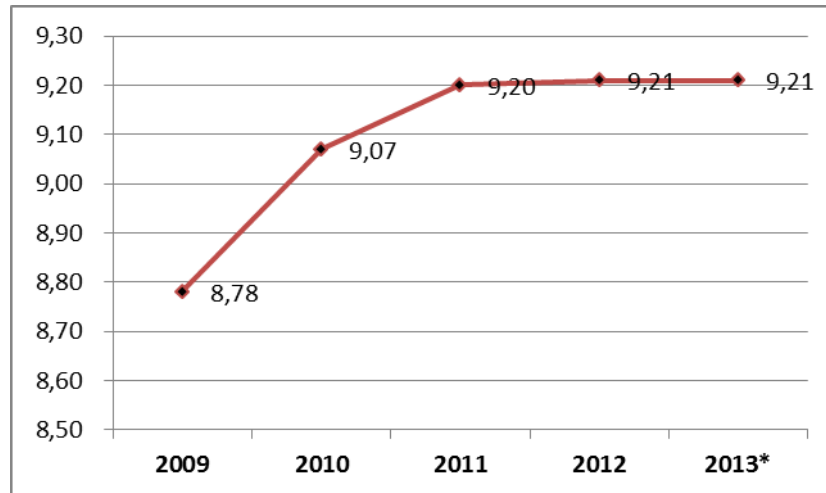
Tabel 2.20
Perkembangan Angka Melek Huruf DIY
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

Kab/Kota	Angka Melek Huruf			
	2009	2010	2011	2012
Kota Yogyakarta	97,94	98,03	98,07	98,10
Kabupaten Bantul	89,14	91,03	91,23	92,19
Kabupaten Kulon Progo	89,52	90,69	92,00	92,04
Kabupaten Gunungkidul	84,52	84,66	84,94	84,97
Kabupaten Sleman	92,19	92,61	93,44	94,53
DIY	90,18	90,84	91,49	92,02

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

*: Angka sementara

Gambar 2.24
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2009-2013

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 8,78 di tahun 2009 menjadi 9,21 di tahun 2012 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY
Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2012

Kab/Kota	Rata-rata lama Sekolah			
	2009	2010	2011	2012
Kota Yogyakarta	11,48	11,48	11,52	11,56
Kabupaten Bantul	8,64	8,82	8,92	8,95
Kabupaten Kulon Progo	7,89	8,20	8,37	8,37
Kabupaten Gunungkidul	7,61	7,65	7,70	7,70
Kabupaten Sleman	10,18	10,30	10,51	10,52
DIY	8,78	9,07	9,20	9,21

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

Sedangkan apabila dilihat dari data pilah rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk tahun 2010, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,73 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,45 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,67 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibanding laki-laki antara lain: faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY
Menurut Kabupaten/Kota periode 2009/2010 - 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	p	Rata-rata
APK Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	150,12	131,06	140,25	149,32	129,88	139,29	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13
Kabupaten Bantul	112,74	96,62	104,39	113,61	96,52	104,76	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90
Kabupaten Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,20	106,92	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87
Kabupaten Gunungkidul	106,38	95,23	100,75	106,10	94,68	100,33	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80
Kabupaten Sleman	142,58	96,98	116,43	117,70	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34
DIY	122,74	101,30	111,44	116,78	106,19	111,46	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78
APK Tingkat SMP												
Kota Yogyakarta	142,45	131,65	136,93	136,90	125,35	131,00	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78
Kabupaten Bantul	106,21	106,47	106,34	106,12	105,68	105,90	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106,38
Kabupaten Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,66	113,32	117,95	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28
Kabupaten Gunungkidul	118,86	107,11	112,92	116,92	107,10	111,96	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34
Kabupaten Sleman	128,89	102,28	114,43	115,49	113,34	114,43	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72
DIY	121,50	109,69	115,47	117,01	111,67	114,36	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43
APK Tingkat SMA												
Kota Yogyakarta	137,23	125,66	131,23	134,69	125,72	130,04	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23
Kabupaten Bantul	83,96	80,98	82,45	81,23	82,76	81,98	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15
Kabupaten Kulon Progo	85,13	90,98	87,84	86,41	101,07	93,19	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63
Kabupaten Gunungkidul	72,59	65,39	68,96	75,05	67,77	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46
Kabupaten Sleman	85,12	68,64	75,72	75,02	78,19	76,61	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35
DIY	91,43	83,04	87,06	87,92	88,32	88,12	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013, capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,4 menjadi 111,78. Pada periode 2011/2012 terjadi penurunan dari 111,46 di periode 2010/2011 menurun menjadi 111,43 di periode 2011/2012.

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.

Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50 menurun menjadi 115,43 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 148,78 dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 104,23.

Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 87,83 di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 124,23 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,46.

2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY
Menurut Kabupaten/Kota periode 2009/2010 - 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APM Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	130,30	113,41	121,55	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93
Kabupaten Bantul	97,97	84,47	90,98	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54
Kabupaten Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92
Kabupaten Gunungkidul	93,77	84,29	88,98	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45
Kabupaten Sleman	121,99	83,35	99,83	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59
DIY	106,26	88,03	96,65	101,31	92,54	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54
APM Tingkat SLTP												
Kota Yogyakarta	102,01	94,22	98,03	85,91	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99
Kabupaten Bantul	81,11	80,74	80,93	71,29	72,16	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78
Kabupaten Kulon Progo	90,33	85,73	88,01	90,24	85,64	87,92	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55
Kabupaten Gunungkidul	80,87	73,72	77,26	81,49	75,06	78,24	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47
Kabupaten Sleman	97,12	77,83	86,64	82,92	80,58	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85
DIY	88,88	80,79	84,78	80,85	79,23	81,06	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13
APM Tingkat SLTA												
Kota Yogyakarta	102,69	89,63	95,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65
Kabupaten Bantul	63,20	56,48	59,80	55,54	52,02	53,81	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04
Kabupaten Kulon Progo	56,89	55,18	56,10	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99
Kabupaten Gunungkidul	54,85	43,61	49,18	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99
Kabupaten Sleman	54,78	46,89	50,28	53,02	55,09	54,06	52,91	55,15	54,04	52,77	57,39	55,06
DIY	65,44	56,65	60,87	60,94	59,66	60,30	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Secara umum dalam lima periode terakhir, terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA. Rata-rata kenaikan APM SD dari periode 2009/2010 sampai dengan 2012/2013 0,88 poin. Capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 sebesar 97,54 naik dari periode 2011/2012 sebesar 97,53. Menurut

kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,93 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 88,45.

Sedangkan untuk tingkat SMP, APM mengalami penurunan pada periode 2010/2011 81,06 turun dari tahun periode sebelumnya yang mencapai 84,78 kemudian kembali naik pada periode berikutnya menjadi 81,08 pada periode 2011/2012 dan menjadi 81,13 pada periode 2012/2013. Capaian APM tingkat SLTP periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 105,99 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,47.

Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan sebesar 0,73 poin. APM tingkat SLTA DIY periode 2009/2010 sebesar 60,87 menurun pada periode 2010/2011 menjadi sebesar 60,30 dan meningkat pada periode 2011/2012 menjadi 63,45 dan 63,65 pada periode 2012/2013. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 88,65 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 63,65.

2.2.2.5 Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24
Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY, 2009-2013**

Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI					
- Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	47.549	45.928	45.754	48.540	50.230
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya	49.429	47.611	46.427	49.184	50.235
- Persentase kelulusan ujian nasional	96,20	96,47	98,55	98,69	99,99
SMP/MTS					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS	43.104	40.354	48.022	46.229	47.302
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS tahun sebelumnya	47.814	44.760	48.409	46.950	47.335
- Persentase kelulusan ujian nasional	90,15	90,16	99,20	98,46	99,93

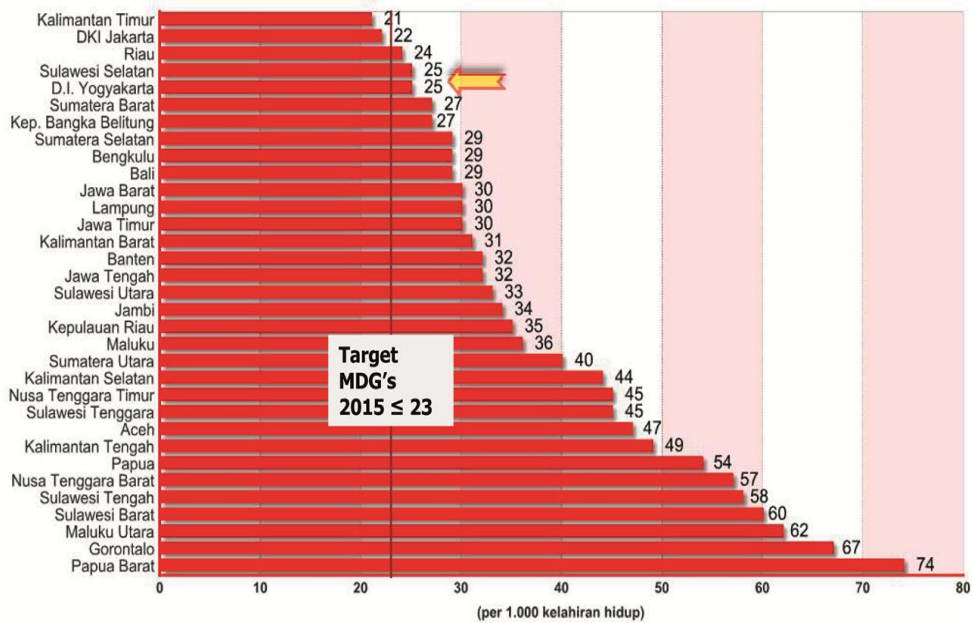
Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan				
	2009	2010	2011	2012	2013
SMA/SMK/MA					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	38.162	37.405	41.540	40.069	44.057
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA tahun sebelumnya	40.045	39.873	41.701	40.579	44.067
- Persentase kelulusan ujian nasional	95,30	93,81	99,61	98,74	99,98

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil. Capaian angka kelulusan DIY tahun 2013 cukup menggembirakan yaitu hampir 100 di semua jenjang pendidikan.

2.2.2.6 Angka Kematian Bayi (AKB)

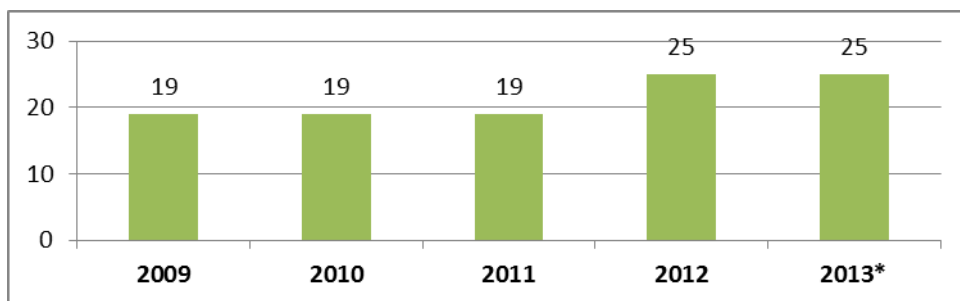
Berdasarkan SDKI 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2012 adalah 25 per 1000 kelahiran hidup. Secara nasional, angka ini berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur (21 per 1000 kelahiran hidup), Provinsi DKI Jakarta (22 per 1000 kelahiran hidup), dan Riau (24 per 1000 kelahiran hidup).



Sumber : SDKI 2012

Gambar 2.25
Perbandingan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
Antar Provinsi 2012

Selama kurun 2009 sampai dengan 2013, Angka Kematian Bayi per 100 kelahiran hidup DIY mengalami peningkatan. Tahun 2009 sampai dengan 2011, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran adalah 19 kemudian naik menjadi 25 per 1000 kelahiran bayi di tahun 2012. Kenaikan AKB tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya penurunannya, dikarenakan kenaikanya yang drastis dan angka tersebut melebihi dari target *Millennium Development Goals* (MDGs) Nasional di tahun 2015 yang sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

Gambar 2.26
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup DIY
Tahun 2009-2013

Jumlah Kematian bayi yang dilaporkan di DIY dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 330 naik pada tahun 2010 menjadi 346 dan naik lagi pada tahun 2011 menjadi 419 baru kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 400.

Tabel 2.25
Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup DIY
tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun)	330	346	419	400	449
Jumlah Kelahiran Hidup	43.724	43.048	44.839	45.803	45.436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. SDKI 2012 tidak memunculkan besaran Angka Kematian Ibu (AKI) di DIY, sehingga untuk melihat derajat kesehatan ibu digunakan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pertahun. Jumlah kematian ibu di DIY dari tahun 2009 sd 2013 mengalami fluktuasi. Gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu di 2009 47 kasus menurun 43 kasus di 2010, naik cukup tajam di tahun 2011 menjadi 56 kasus dan menurun cukup tajam di tahun 2012 menjadi 40 kasus. Akan tetapi di tahun 2013 terjadi kenaikan kasus menjadi 46 kasus. Kenaikan kasus di tahun 2013 ini bertolak belakang dengan pencapaian indikator kesehatan ibu yang lain seperti cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan cakupan pelayanan pada ibu hamil (K1 dan K4) yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.26
Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY
Tahun 2009 - 2013

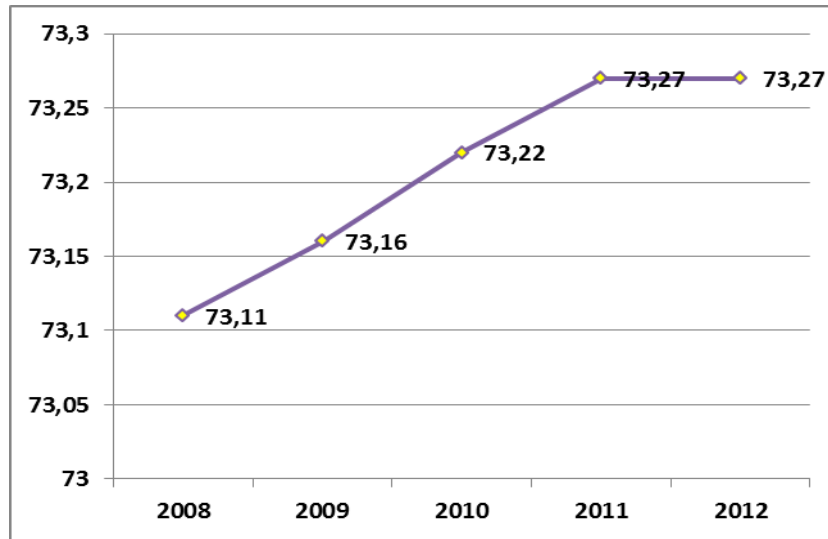
Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kasus kematian ibu	47	43	56	40	46
Jumlah lahir hidup	43724	43048	44839	45803	45436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.2.2.7 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor

kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.



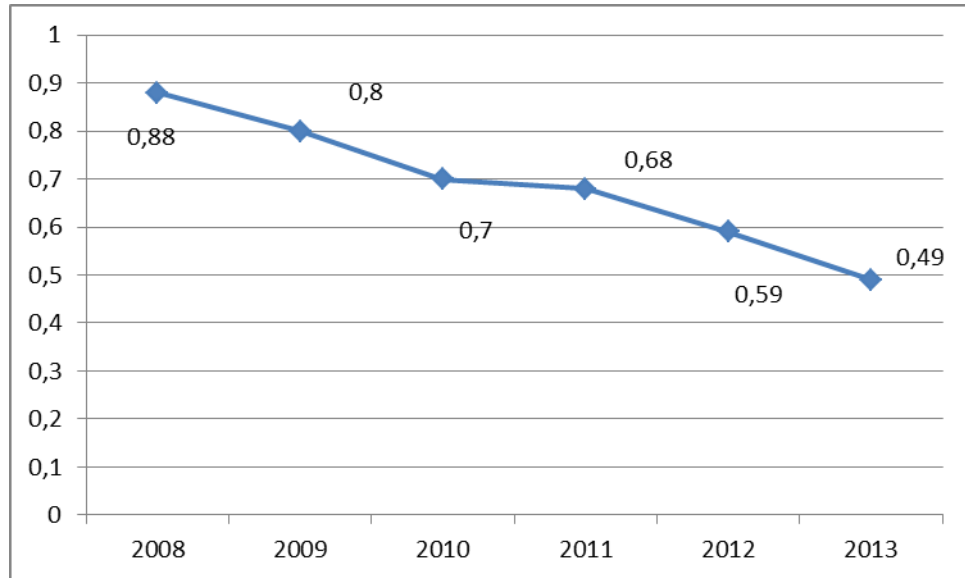
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY
Tahun 2008-2012

2.2.2.8 Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2012-2012 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk DIY adalah 0,59% dari sebelumnya di tahun 2011 sebesar 0,68. Capaian tersebut telah jauh melampaui target nasional (15% pada tahun 2015).



Gambar 2.28
Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY
Tahun 2008-2012

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan.

2.2.2.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2012 sebanyak 1.867.708 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.944.858 orang dengan rasio 96,03 naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.798.595 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.872.912 orang dengan rasio yang sama sebesar 96,03. Sementara tahun 2013 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja diproyeksikan masing-masing sebanyak 1.847.070 orang dan 1.910.959 orang dengan rasio penduduk bekerja sebesar 96,6. Rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 96,6 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 2.27
Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja DIY
Tahun 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Penduduk yang Bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.847.070
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.910.959
Rasio Penduduk yang bekerja	94,62	94,00	94,31	96,03	96,03	96,66

Sumber : Dinas Nakertrans DIY, 2013

*: Angka sementara

2.2.3 Fokus Budaya, Pemuda dan Olahraga

2.2.3.1 Budaya

“ . . . Budaya sebagai Payung dan Arus Utama (mainstreaming) dalam Pembangunan di segala bidang. Renaisans Yogyakarta yang dipayungi filosofi hamêmayu-hayuning bawânâ, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulâ-gusti dan golongan-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita. . . ” (Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur DIY, 2012).

Pada Tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Langkah awal untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah perlunya identifikasi data dan perkembangan budaya di DIY.

Berikut gambaran umum kondisi eksisting kebudayaan/potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY:

A. Adat Istiadat, Tradisi, dan Seni Budaya

Tabel 2.28
Jumlah Organisasi Kesenian di DIY, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Organisasi Sinematografi	14	14	14	14	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.203	4.219	4.269	4.269	4.269
Organisasi Seni Rupa	8	25	25	25	25
Perusahaan Film	9	10	10	10	20
Perusahaan Bioskop	4	4	4	4	1
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	37	38

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.29
Perkembangan Seni dan Budaya menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulon Progo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	12,24	0,26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Festival, Karnaval, Gelar Budaya, Pasar Rakyat dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain yaitu : Pekan Budaya Rusia, Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720 menjadi pada tahun 2013. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

Tabel 2.30
Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	790	1.093
Prasarana Budaya	92	135	137	412	412
Lembaga Budaya	107	107	107	107	107

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	790	1.093
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.31
Perkembangan Sistem Budaya di DIY, 2008-2012

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Upacara Adat dan Tradisi Daur Hidup	34	34	34	34	34
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	90	90	90
Makanan Tradisional	137	137	137	137	137
Tokoh Seniman Budayawan	369	369	369	486	486
Penghargaan seniman Budayawan	258	258	258	258	258
Jenis Permainan Tradisional	241	241	241	241	241
Permainan Tradisional	34	34	34	34	34

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Kebudayaan juga akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Menurut Maynard dan Mehrtens (1993) setelah gelombang ketiga Alvin Toffler, dunia akan dilanda gelombang keempat (*fourth wave economic*) yang mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun industrialisasi. Ekonomi gelombang keempat adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Geliat nasional juga menunjukkan kepada orientasi ke arah tersebut. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban. Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah DIY memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi baik budaya kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).

Di DIY sampai saat ini masih memiliki 358 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 34 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Terdapat keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya untuk pemujaan, permohonan, pencucian, inisiasi, tasyakur, pengukuhan atau sekedar ekspresi kegembiraan. Dalam upacara adat akan ditampilkan symbol-simbol

kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya incidental dan tidak teragendakan secara tetap.

Potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY yang tercermin tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, 2009-2013

Aspek	Satuan	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kunjungan museum	Orang	360.000	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	36	38	40	40
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	194	214	220	225	225
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	720	790	920	960	960
Jumlah Desa Budaya berkategori Maju	Desa	5	6	8	12	12
Jumlah Dokumen seni Budaya dankarya seni yang dilestarikan	Dokumen	43	91	104	120	120
Jumlah sumber sejarah yang dikelola	Sumber sejarah	44	300	500	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	92	94	94	96	96
Peristiwa Sejarah	kali	94	94	94	94	95
Pelaku Sejarah	orang	-	-	16	16	22
Ceritera Rakyat	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	80
Naskah Kuno	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	509
Upacara Adat	buah	342	358	358	358	447
Motif Batik	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	185
Motif Lurik	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	64
Kerajinan Property Budaya	buah	34	34	34	34	34

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2012 & Data Pembangunan Daerah DIY, Bappeda DIY 2013

Organisasi kepercayaan yang hidup ada 90 organisasi yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 18, Kab Kulonprogo sebanyak 22, Kab. Gunungkidul sebanyak 14, Kab. Sleman sebanyak 16, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20. Setiap kabupaten dan kota memiliki 138 makanan tradisional, 15 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 349 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya.

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat

yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohan*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anak laki-laki (*sunatan; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (*sukerta*) yang mungkin timbul pada diri seseorang.

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradiisonal dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi Penghayat Kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 90 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 34 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. DIY sebenarnya masih memiliki 43 desa budaya, tetapi baru 32 desa budaya yang termasuk dalam SK Gubernur tentang Desa Budaya. Dari ke 43 desa budaya, baru 41 desa budaya yang telah diklasifikasikan tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Desa budaya merupakan kantong pertahanan budaya rakyat. Desa budaya merupakan kantong budaya dan beteng pertahanan budaya tradisional yang berpotensi untuk menjadi tujuan wisata.

Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2011 sebesar 19,51% dari 32 desa budaya yang telah ditetapkan telah mencapai target yang ditetapkan dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 18,8%. Tentu keberhasilan ini akan lebih nyata lagi apabila 11 desa budaya yang lainnya segera di-SK-kan.

Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya

melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2013 tercatat menjadi 43 desa yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional yang perlu dipetakan kembali potensi dan tingkat perkembangannya, serta dilindungi dalam suatu regulasi. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*.

Adat-istiadat dan tradisi mewarnai kehidupan masyarakat DIY. Dalam kejadian-kejadian proses daur hidup pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Sampai tahun 2012 masih ditemukan 377 jenis upacara adat istiadat dan 34 jenis tradisi daur hidup yang menyebar di berbagai desa yang dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat desa, kelompok organisasi budaya, maupun keluarga, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa desa, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di desa lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya. Makanan tradisional yang masih dapat dijumpai masih ada 137 jenis, seperti *nagasari*, *gudheg*, *mendhut*, *lemper*, *pecel*, *wedang uwuh*, *bakpia*, *yangko*, *geplak*, dan lain-lain. Permainan tradisional yang masih dikenal ada 34 jenis, antara lain *dakon*, *benthik*, *dhelik-dhelikan*, *gobag sodhor*, *jamuran* yang memiliki nilai-nilai kebersamaan, kreativitas dan inovasi.

B. Kesenian

Kehidupan kesenian di DIY berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru, walaupun secara kuantitatif menunjukkan penurunan. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam,

meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer.

Sampai saat ini ada 4253 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, pertunjukan, dan sinematografi. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi dan target yang sama yakni 0,94%. Angka 0,94% berasal dari 40 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 4253.

Perkembangan kesenian di DIY berjalan dengan baik, baik di dalam maupun di luar keraton. Hingga saat ini terdapat 4.253 organisasi kesenian yang tersebar di wilayah DIY. Di Kota Yogyakarta terdapat 414 organisasi kesenian dengan 31 jenis kesenian, di Kab. Sleman 1.395 organisasi kesenian dengan 31 jenis kesenian, di Kab. Bantul 780 organisasi kesenian dengan 21 jenis kesenian, di Kab. Kulonprogo 891 organisasi kesenian dengan 21 jenis kesenian, di Kab. Gunung kidul 772 organisasi kesenian dengan 22 jenis kesenian. Meskipun belum dikelola secara profesional, sesungguhnya seni-budaya tersebut memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat setempat yang masih bisa dioptimalkan mengingat karakteristik kesenian terlebih kesenian tradisional yang melibatkan banyak orang. *Sumber : www.jogjabudaya.com*

Galeri seni yang didirikan ada 26 buah. Dinas Kebudayaan sendiri telah memproduksi beberapa film seperti 'Rindu di Hati Tara', 'Loro Blonyo', 'Titik 0 Km', dan sebagainya. Beberapa film Indie memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional

Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu : tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain : Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog, Sheila On Seven, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto dan lain-lain.

Perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya

merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Menurut hasil pengkategorian tahun 2008 dapat kita lihat pengklasifikasian kelompok seni sebagai berikut :

Tabel 2.33
Klasifikasi Kelompok Seni, 2008

No	Kab/Kota	Jumlah	Jenis Kesenian	Kriteria		
				Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Kota Yogyakarta	271	45	82	172	13
2	Kabupaten Sleman	1242	52	729	507	6
3	Kabupaten Bantul	1193	52	845	242	12
4	Kabupaten Gunungkidul	1514	51	1036	398	3
5	Kabupaten Kulon Progo	1206	46	415	117	2
	DIY	5426		3107	1436	36

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2009-2013

Setelah tahun 2008, pembaharuan data klasifikasi kelompok seni belum dilakukan lagi. Untuk tahun-tahun mendatang diperlukan pendataan kembali dan regulasi kelembagaan kelompok seni.

C. Sejarah dan Purbakala

Yogyakarta mewarisi budaya prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Indisch, Cina, dan Arab. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai *dead monument*.

Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Terdapat sebanyak 13 kawasan cagar budaya di wilayah DIY yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 2 kawasan cagar budaya, di Kab. Gunungkidul sebanyak 1 kawasan cagar budaya, di Kab. Sleman sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 6 kawasan cagar budaya. Museum yang tersebar di DIY ada sekitar 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk Barahmus ada 32 Museum. Keseluruhan koleksi yang ada di 38 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 38 museum tersebut, museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetaqpkn sudah mencapai 521 buah. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.

Tabel 2.34
Kawasan Cagar Budaya

NO	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarketawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati
9	Pleret	Situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	Situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	Situs, dalam proses penetapan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 2.35
Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	521	521
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16
Situs	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	44
Museum	34	34	38	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.36
Penanganan Cagar Budaya, 2009-2013

Aspek	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	194	214	220	225	225
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.272	1.279	1.279	1.410	1.410

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Sementara itu, cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Untuk indikator persentase capaian tahun 2011 sama dengan yang ditargetkan, yaitu masing-masing 42,72% karena rencana target BCB yang direhabilitasi, direkonstruksi dipenuhi oleh kegiatan yang ada di dinas kebudayaan. Angka 42,72% diperoleh dari 220 Cagar Budaya dengan kondisi baik

dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah 517. Capaian tahun 2011 tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2010 untuk indikator persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik sebesar 41,55%.

Tabel 2.37
Klasifikasi BCB Hingga, 2011

No	Klasifikasi	Yk	Btl	KP	GK	Slm	DIY	SK
1	A/Internasional	1	-	-	-	3	4	SK Mendikbud
2	B/Nasional	14	1	-	-	4	19	SK Mendikbud, Gubernur, Walikota
3	C/Provinsi	82	3	5	2	10	102	SK Gubernur
4	D/Kab/Kota	23	6	3	9	5	46	SK Gubernur/SK Walikota
5	E/Lokal	3	3	-	2	-	8	SK Walikota
	Total yang sudah diklasifikasikan	123	13	8	13	22	179	
	Total yang belum diklasifikasikan	354	2	-	-	2	358	
	Total	477	15	8	13	24	517	

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Kemunculan bangunan baru di dalam kawasan Cagar Budaya mempunyai segi-segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, tetapi akan bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Penegakan regulasi seringkali mengalami berbagai hambatan sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

Ancaman kelestarian Bangunan/Benda Cagar Budaya dapat timbul karena faktor kimia, biologis, fisika, lingkungan, kasus-kasus kriminalitas. Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional, tetapi prosentasenya masih kecil yaitu 3 %. Sampai pada tahun 2010 BCB dan situs yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan mencapai 7 % dari semua BCB dan situs nasional. BCB dan situs yang terpelihara dibandingkan dengan Provinsi lain di seluruh Indonesia ada 4 %. Juru Pemelihara BCB dan situs di DIY ada 10 % dari juru pemelihara BCB dan situs di seluruh Indonesia.

Tabel 2.38
Perbandingan Data BCB DIY dan Nasional, Tahun 2013

No	Aspek	DIY	%	Nasional
1	BCB/Situs	1353	3 %	43.405
2	BCB/Situs yang ditetapkan	56	7 %	749
3	BCB/Situs yang dipugar	35	5 %	643
4	BCB/Situs yang dipelihara	71	4 %	1895
5	Juru Pemelihara BCB/Situs	294	10 %	2988
6	Konservasi	64	44 %	146
7	Kasus	1	4 %	24

Sumber : Bappenas RI, tahun

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, disebutkan urusan Pemerintah Provinsi dibidang Kebudayaan Sub Bidang Purbakala antara lain ;

- a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*” skala provinsi.
- b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/ situs skala provinsi.
- c. Penetapan BCB/situs skala provinsi.
- d. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.
- e. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.
- f. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.
- g. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.
- h. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- i. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- j. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.

Indonesia telah memiliki UU terbaru untuk Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menggantikan UU No 5 Tahun 1992. DIY sangat kaya akan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang bernilai

besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan Daerah Istimewa. Di DI Yogyakarta masih menggunakan Perda No 5 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KCB dan BCB, yang disusun berdasarkan regulasi UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Isi-isi pasal dalam Perda harus disesuaikan dengan UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena banyak konsep dan objek yang berbeda. Akhir Juni 2012 Raperda berhasil dituntaskan oleh legislatif dan eksekutif setelah melalui proses yang panjang dan menjadi Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Inti isi Perda adalah pengembangan budaya Yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan; pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan cagar budaya, pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sebagaimana bunyi ketentuan berikut:

Pasal 43 :

Kebijakan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 44 :

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 43 sebagai berikut :

Pada Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan :

- a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
- b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan; dan
- c. melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.

Museum yang tersebar di DIY ada 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk Barahmus ada 33 Museum. Sebagian besar museum di DIY berada di perkotaan. Kulon Progo adalah Kabupaten yang tidak memiliki museum. Gunungkidul hanya memiliki satu museum. Apresiasi kunjungan museum sebagai wujud kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya seperti Karnaval museum, Kemah Museum, Program Museum Sahabat Anak.

Tabel 2.39
Daftar Museum di DIY

No	Museum	Alamat
1	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Pagelaran Siti Hinggil, Kompleks Kraton Kadipaten Kraton Yogyakarta
2	Gembira Loka	Kebun Raya No. 2 – Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
3	Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan	Kentungan Condongcatur Depok Sleman
4	Monumen Yogya Kembali	Jl. Lingkar Utara, Jongkang Sariharjo Ngaglik Sleman
5	Museum Biologi UGM	Sultan Agung No. 22 Bintaran Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
6	Museum Affandi	Jl. Laksda Adi Sucipto 167 Yk Papringan Caturtunggal Depok Sleman
7	Museum Bahari Yogyakarta	Jl. Remartadinata 69 Wirobrajan RT 07 RW 02 Wirobrajan Wirobrajan Yogyakarta
8	Museum Batik Dan Sulaman Yogyakarta	Jl. Dr. Sutomo no.13 A Bausasran RT.49/RW X11 Bausasran Danurejan Yogyakarta
9	Museum Batik Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta Kadipaten Kraton Yogyakarta
10	Museum Benteng Vredeborg	Jenderal A. Yani No. 6 – Ngupasan Gondomanan Yogyakarta
11	Museum Dewantara Kirti Griya	Tamansiswa no. 31 – Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
12	Museum Dr. YAP	Jl. Teuku Cik Ditiro no. 5 Terban – Terban Gondokusuman Yogyakarta
13	Museum Geoteknologi Mineral	Jl. Babarsari 2 Babarsari, Tambak Bayan Caturtunggal Depok Sleman
14	Museum Gumuk Pasir	Depok Parangtritis Kretek Bantul
15	Museum Kayu Wanagama	Jl. Jogja-Wonosari Km 30 – Gading Playen Gunungkidul
16	Museum Kereta	Rotowijayan Kadipaten Kraton Yogyakarta
17	Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Jl. Adisucipto 88 Demangan Caturtunggal Depok Sleman

No	Museum	Alamat
18	Museum Kristal Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta Kadipaten Kraton Yogyakarta
19	Museum Paleoantropologi UGM	Jl. Medika Sekip Sekip Caturtunggal Depok Sleman
20	Museum Perjuangan	Kolonel Sugiyono no.24 Brontokusuman Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta
21	Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan	Jl. Raya Yogya - Solo km 16, Prambanan Bokoharjo Prambanan Sleman
22	Museum Puro Pakualaman	Jl. Sultan Agung - Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
23	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Jenderal Sudirman 75 - Terban Gondokusuman Yogyakarta
24	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta	Jl. Solo Kompleks Lanud Adisucipto Maguwo Banguntapan Banguntapan Bantul
25	Tembi Rumah Budaya	Jl. Parangtritis Km 8,4, Tembi Timbulharjo Sewon Bantul
26	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Jl. Yogya - Wonosari km 7 No. 277 - Baturetno Banguntapan Bantul
27	Museum Ullen Sentalu	Jl. Boyong Kaliurang Barat Hargobinangun Pakem Sleman
28	Museum Tani Jawa Indonesia	Candaran Kebonagung Imogiri Bantul
29	Museum Sultan Hamengku Buwono IX	Bangsas Kencana, Kompleks Kraton Yogyakarta Kadipaten Kraton Yogyakarta
30	Museum Sonobudoyo Unit II	Wijilan Yogyakarta Cokrokiranan Panembahan Kraton Yogyakarta
31	Museum Sonobudoyo Unit I	Jl. Trikora No 6 - Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta
32	Museum Seni Lukis Kontemporer Indonesia Nyoman Gunarsa	Jl. Wulung No. 43 Papringan Caturtunggal Depok Sleman
33	Museum Sasmita Loka Pangsar Jenderal Sudirman	Bintaran Wetan No.3 Yogyakarta - Gunungketur Pakualaman Yogyakarta
34	Museum Sasana Wiratama	Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo TR. III No. 430 Tegalrejo Tegalrejo Tegalrejo Yogyakarta
35	Museum Gunung Api	Sleman
36	Museum Pendidikan Gumuk Pasir	Bantul
37	Museum Kolong Anak Tangga	Jl. Sriwedani No. 3 Yogyakarta
38	Museum Sandi Negara	Yogyakarta

Sumber : www.jogjabudaya.com

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, sekarang sedang dalam proses revitalisasi.

Tahun 2011 jumlah kunjungan museum tercatat sebanyak 623.500 orang dan jumlah kunjungan ODTW sebanyak 9.396.008 orang. Dari angka tersebut maka diketahui capaian indikator kunjungan ke museum terhadap ODTW tahun 2011

adalah sebesar 6,64% atau sebesar 103,43% dari target yang ditetapkan yaitu 6,42%. Persentase capaian tahun 2011 tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2010 yang sebesar 6,42%.

Tahun 2010 Museum Sonobudoyo bersama Museum Vredeburg, Museum Budaya Tembi, Museum Ullen Sentalu mendapat penghargaan Sapta Pesona untuk Museum yang memiliki Toilet Umum bersih.

Selain kelompok kesenian, pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Saat ini terdapat 32 desa budaya yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 6 desa budaya, Kab. Kulonprogo sebanyak 10 desa budaya, Kab. Gunung Kidul sebanyak 10 desa budaya, Kab. Sleman sebanyak 6 desa budaya.

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan amanat (amanat penderitaan rakyat). Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki, Nurhayati, Winarsih, Doni Tata dan lain-lain. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Stadion PSS Sleman, dan lain-lain.

Tabel 2.40
Pemuda dan Olah Raga di DIY, 2009-2013

Uraian	Tahun					Satuan
	2009	2010	2011	2012	2013	
Organisasi Kepemudaan	35	35	35	35	35	Buah
Jumlah Karang Taruna	442	440	437	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	50	51	51	50	50	Buah
Sarana Olah Raga						
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : *Disdikpora DIY, 2013*

Dari tabel di atas tampak bahwa perubahan dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Perubahan yang nampak pada jumlah Karang Taruna, yang mengalami kenaikan pada tahun 2010 namun pada tahun 2011 mengalami penurunan.

Tabel 2.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di DIY, 2008-2013

Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5.426	5.426	4.225	4.269	4.344	4.344
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	92	92	92	92	94	94
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	655	652	655	660	665	665
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	26	28	28	29	29	29

Sumber: Disbud DIY & Disdikpora DIY, 2013

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
DIY Tahun 2009- 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI (7-12 tahun)					
1.1.	Anak Usia 7-12 thn sedang sekolah	266.611	268.466	271.130	268.289	266.337
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	APS Anak Usia 7-12 tahun	105,52	104,81	107,49	108,89	107,68
2	SMP/MTs (13-15 tahun)					
2.1.	Anak Usia 13-15 thn sedang sekolah	115.590	113.185	108.851	108.029	114.186
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	APS Anak Usia 13-15 tahun	105,26	112,19	110,35	111,5	113,64

Sumber : Disdikpora DIY & Data Pembangunan Daerah, Bappeda DIY, 2013

Angka partisipasi sekolah di DIY masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Untuk APS SD/MI terjadi penurunan pada tahun 2010 akan tetapi mulai tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk APS SMP/MTs pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup besar akan tetapi pada tahun selanjutnya terjadi fluktuasi capaian walaupun masih diatas 100%.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten/Kota
di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Sedang Sekolah	jumlah Penduduk	APS	Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Yogyakarta	39.583	32.430	141,73	18.361	17.117	162,25
2.	Kab. Bantul	66.079	70.846	102,64	27.371	35.525	101,67
3.	Kab. Kulon Progo	30.674	33.933	102,04	13.284	16.120	112,75
4.	Kab. Gunungkidul	50.249	61.424	90,80	23.772	29.592	103,00
5.	Kab. Sleman	79.752	78.390	113,82	31.398	38.002	111,59
Provinsi		266.337	277.023	107,68	114.186	136.356	113,64

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

a) Rasio Ketersediaan sekolah terhadap Penduduk usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar pemerintah senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.44
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY, 2009 -2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.009	2.009	2.017	2.009	2.010
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	Rasio (Per 10.000)	71	73	73	73	73
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	509	507	507	517	526
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	Rasio (Per 10.000)	37	36	38	39	39

Sumber : *Disdikpora DIY dan Data Pembangunan Daerah, Bappeda DIY, 2013*

Secara umum dapat dilihat jika ketersediaan gedung sekolah semakin lama semakin berkurang. Data tersebut jika dilihat dari rata-rata layanan setiap Gedung SD/MI sebesar 137 anak, setiap gedung SMP/MTs sebesar 259, maka ketersediaan gedung SD/MI dan SMP/MTs sudah cukup memadai sehingga tidak perlu menambah gedung sekolah.

Tabel 2.45
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut
Kabupaten/Kota di DIY, 2013

No	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Yogyakarta	170	32.430	52	67	17.117	39
2.	Kab. Bantul	384	70.846	54	111	35.525	31
3.	Kab. Kulon Progo	368	33.933	108	78	16.120	48
4.	Kab. Gunungkidul	561	61.424	91	138	29.592	47
5.	Kab. Sleman	527	78.390	67	132	38.002	35
	Provinsi	2010	277.023	73	526	136.356	39

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Rasio rata - rata pada jenjang SD/MI di DIY sebesar 72,56 dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 38,58. Untuk rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 108,45 dan diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 91,33. Sedangkan rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTs berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 48,39 dan diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 46,63. Untuk rasio terendah ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI berada di Kota Yogyakarta dengan 52,42 dan SMP/MTs berada di Kabupaten Bantul sebesar 31,25.

b) Rasio Guru/Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.46
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di DIY, 2009–2013

NO (1)	Jenjang Pendidikan (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	20.379	23.820	23.719	23.222	22.548
1.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	266.611	268.466	271.130	268.289	266.337
1.3.	Rasio (per 1.000)	76	89	87	87	85
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	13.131	12.971	12.684	12.634	12.834
2.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	115.590	113.185	108.851	108.029	114.186
2.3.	Rasio (per 1.000)	114	115	117	117	112

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2013 sebesar 85 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid, sedangkan pada sekolah setingkat SLTP dengan rasio 112, setiap guru mengajar anak sekitar 10. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar setiap guru mengajar sekitar 12 murid.

Tabel 2.47
Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO (1)	Kabupaten/kota (2)	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Jumlah Guru (3)	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 sdg sekolah) (4)	Rasio per 1.000 (5)	Jumlah Guru (6)	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn sdg sekolah) (7)	Rasio per 1.000 (8)
1.	Kota Yogyakarta	2.654	39.583	67	1.862	18.361	101
2.	Kab. Bantul	5.014	66.079	76	3.044	27.371	111
3.	Kab. Kulon Progo	3.479	30.674	113	1.692	13.284	127
4.	Kab. Gunungkidul	5.232	50.249	104	2.869	23.772	121
5.	Kab. Sleman	6.169	79.752	77	3.367	31.398	107
	Provinsi	22.548	266.337	85	12.834	114.186	112

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

2) Pendidikan Menengah

a) Angka Partisipasi Sekolah

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di DIY untuk anak usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 - 2013) menunjukkan nilai yang terus meningkat. Meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah di DIY, 2008-2012

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SLTA sederajat (16-18 tahun)					
1.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	93.480	95.500	101.015	101.539	103.862
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	156.283	158.089	159.267	159.625	160.402
1.3.	APS Pendidikan Menengah (16-18 tahun) per 1.000	66,82	65,71	68,05	68,13	68,86

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Usia 16-18 per Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-18 Tahun		
		Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	26.417	29.174	93,04
2.	Kab. Bantul	23.815	35.819	71,74
3.	Kab. Kulon Progo	12.370	17.786	75,08
4.	Kab. Gunungkidul	17.020	32.296	57,25
5.	Kab. Sleman	24.240	45.327	56,87
Provinsi		103.862	160.402	68,86

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Kalau kita perhatikan capaian APS pendidikan menengah 16-18 tahun per kabupaten/kota di DIY tahun 2012, maka terlihat sangat variatif dan kesenjangannya sangat tinggi. APS pendidikan menengah

yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 52,70 dan yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 09,55.

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Dalam menunjang program wajib belajar 12 tahun pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah baru yang akan menampung anak usia 16-18 tahun. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Tabel 2.50
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA)					
1.1.	Jumlah sekolah	390	396	399	406	411
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	162.056	154.765	158.089	159.267	159.625
1.3.	Rasio (per 10.000)	24	26	25	25	26

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Tabel 2.51
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-18 Tahun		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	83	29.174	28
2.	Kab. Bantul	95	35.819	27
3.	Kab. Kulon Progo	57	17.786	32
4.	Kab. Gunungkidul	73	32.296	23
5.	Kab. Sleman	114	45.327	25
Provinsi		422	160.402	26

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Rasio ketersediaan sekolah SLTA sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di DIY mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan angka yang meningkat ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

c) Rasio Guru terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar jumlah ketersediaan guru pada jenjang pendidikan menengah juga akan sangat mempengaruhi kualitas dan mutu pendidikan. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah (16-18 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.52
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA) usia 16-18 Tahun					
1.1.	Jumlah Guru	14.922	15.067	15.064	14.748	15.231
1.2.	Jumlah Murid	93.480	95.500	101.015	101.539	103.862
1.3.	Rasio (per 10.000)	16	16	15	15	15

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, Pada tahun 2009 rasio guru 16 terus meningkat hingga tahun 2013, yaitu 15, ini berarti bahwa pada tahun 2009 seorang guru membawahi sekitar 16 murid dan pada tahun 2013 seorang guru membawahi sekitar 15 murid.

Tabel 2.53
Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	Pendidikan Menengah		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 16-18 sdg sekolah)	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	3.509	26.417	13
2.	Kab. Bantul	3.495	23.815	15
3.	Kab. Kulon Progo	1.986	12.370	16
4.	Kab. Gunungkidul	2.602	17.020	15
5.	Kab. Sleman	3.639	24.240	15
Provinsi		15.231	103.862	15

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun) bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini jika pertumbuhan anak dirangsang dengan benar dan baik maka akan sangat berpengaruh saat mereka nantinya dewasa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Di DIY Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat digalakkan diberbagai daerah kabupaten maupun kota. Jumlah lembaga PAUD terus bertambah dari setiap tahunnya. Begitu pula jumlah murid PAUD terus meningkat.

Tabel 2.54
Jumlah Lembaga, Murid PAUD di DIY, 2013

No	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani	Juml belum	Prosentase	Prosentase	Prosentase Anak Terlayani (F+NF)
	lembaga	Peserta didik	lembaga	Peserta didik					
1.	1.448	71.412	218	11.782	29.989	5.665	51,06	33,04	84,11
2.	1.770	134.182	517	25.757	55.064	20.504	38,78	34,08	72,87
3.	1.540	107.166	532	25.056	46.147	18.837	32,46	38,56	71,01
4.	1.038	52.010	339	9.587	21.695	6.099	43,56	34,49	78,05

No	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani	Juml belum	Prosentase	Prosentase	Prosentase Anak Terlayani (F+NF)
	lembaga	Peserta didik	lembaga	Peserta didik					
5.	1.244	80.658	507	20.656	35.546	15.332	29,27	40,6	69,87
6	7.040	445.428	2.113	92.638	188.441	66.437	37,51	36,42	73,93

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

c. Angka Putus Sekolah

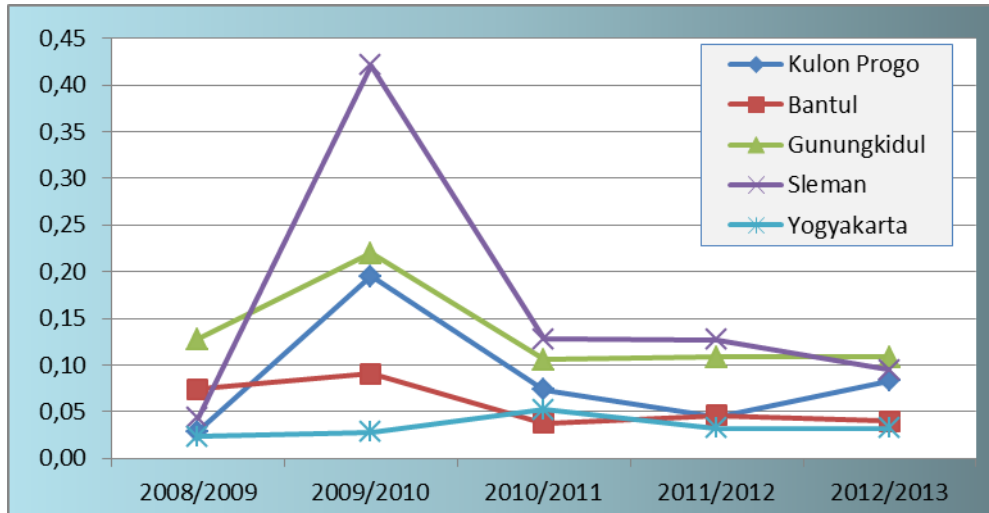
Berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan telah diberikan kepada masyarakat baik yang sifatnya umum seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan yang sifatnya khusus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) disemua jenjang pendidikan mulai SD hingga SLTA dan juga ada Pogram Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan sangat miskin. Salah satu tujuan dari program-program tersebut untuk mengurangi angka putus sekolah terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun pada kenyataannya masih juga terdapat siswa yang putus sekolah.

Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun SD/MI selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009 - 2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Akan tetapi terjadi kenaikan angka putus sekolah pada tahun 2010 sehingga mencapai angka 0,17

Tabel 2.55
Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,03	0,20	0,07	0,04	0,08
2	Bantul	0,07	0,09	0,04	0,05	0,04
3	Gunungkidul	0,13	0,22	0,11	0,11	0,11
4	Sleman	0,04	0,42	0,13	0,13	0,09
5	Yogyakarta	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
	Rata-rata	0,06	0,17	0,07	0,07	0,07

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

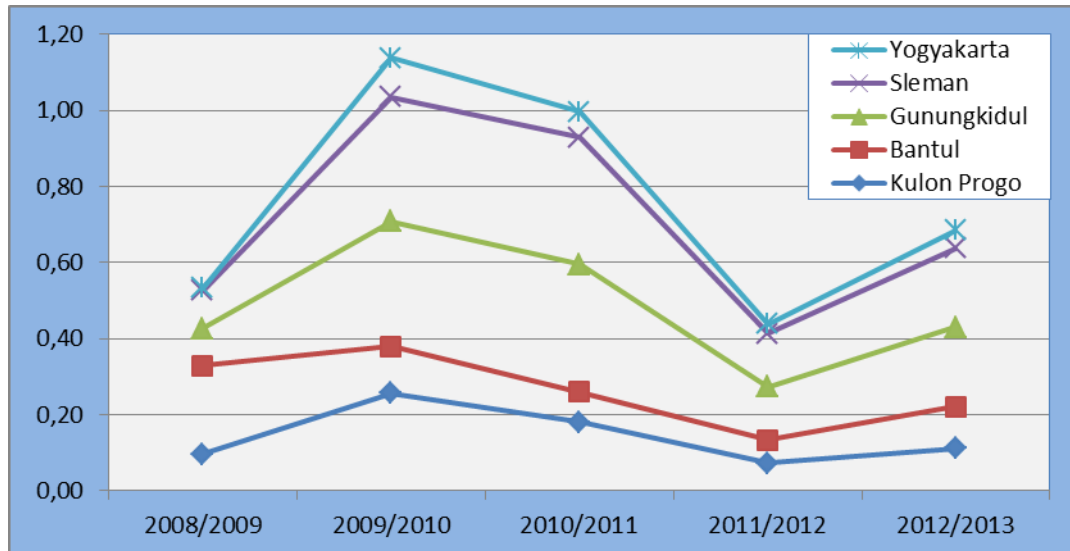
Gambar 2.29
Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

Untuk sekolah SMP/MTs angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2009 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,18 persen dan meningkat hingga pada tahun 2012 sebesar 0,16 persen.

Tabel 2.56
Angka Putus Sekolah Tingkat SMP dan MTS DIY
Tahun 2008/2009 s/d 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,10	0,26	0,18	0,07	0,11
2	Bantul	0,23	0,12	0,08	0,06	0,11
3	Gunungkidul	0,43	0,31	0,25	0,19	0,36
4	Sleman	0,10	0,33	0,33	0,14	0,21
5	Yogyakarta	0,01	0,10	0,07	0,03	0,05
	Rata-rata	0,18	0,22	0,17	0,09	0,16

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

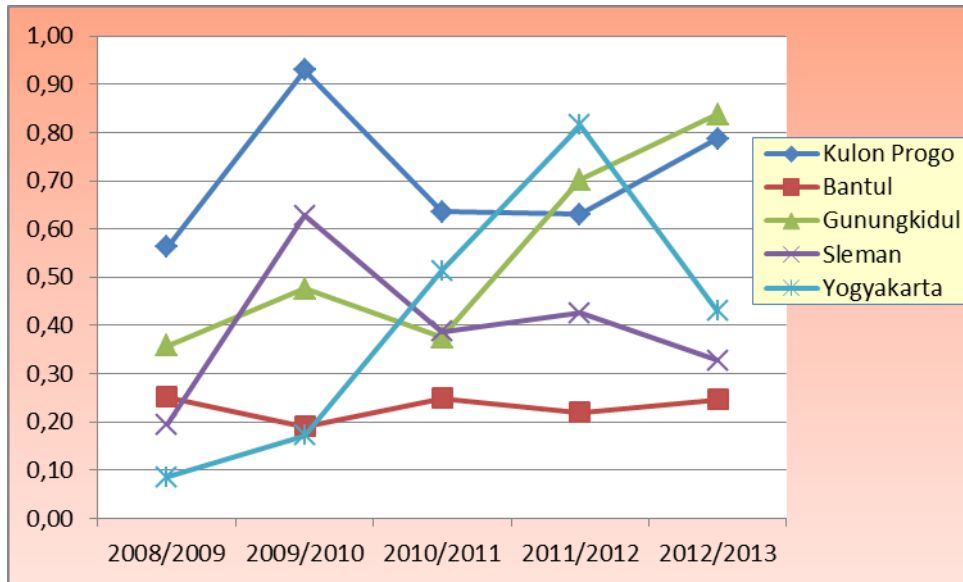
Gambar 2.30
Angka Putus Sekolah Tingkat SMP DAN MTS DIY
Tahun 2008/2009 s/d 2012/2013

Sedangkan pada sekolah SMA/SMK/MA angka putus sekolah penduduk usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2009 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,24 persen dan meningkat hingga sebesar 0,51 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.57
Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan MA DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,56	0,93	0,64	0,63	0,79
2	Bantul	0,25	0,19	0,25	0,22	0,25
3	Gunungkidul	0,36	0,48	0,37	0,70	0,84
4	Sleman	0,19	0,63	0,39	0,43	0,33
5	Yogyakarta	0,08	0,17	0,51	0,82	0,43
	Rata-rata	0,24	0,43	0,44	0,57	0,51

Sumber: Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.31
Angka Putus Sekolah Tingkat SMA DAN MA DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

Jika dilihat per Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2013 angka putus sekolah untuk jenjang sekolah setingkat SD tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,11 persen sedangkan terendah sebesar 0,3 persen yaitu di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2013 angka putus sekolah setingkat SLTP tertinggi adalah Kabupaten Sampang dengan capaian angka 0,36 persen dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 0,05 persen.

Sedangkan angka putus sekolah setingkat SLTA tertinggi juga Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,84 persen sementara terendah Kabupaten Bantul sebesar 0,25 persen.

d. Angka Kelulusan

Pada setiap jenjang pendidikan sekolah formal sebagai syarat kelulusan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi (kelas 6 untuk SD sederajat, kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat) diadakan ujian akhir atau Ujian Nasional (UN). Siswa yang hasil nilai ujian akhirnya memenuhi standart kelulusan akan dinyatakan lulus.

Angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas dari pendidikan tersebut, jika suatu sekolah banyak siswanya yang lulus maka sekolah tersebut

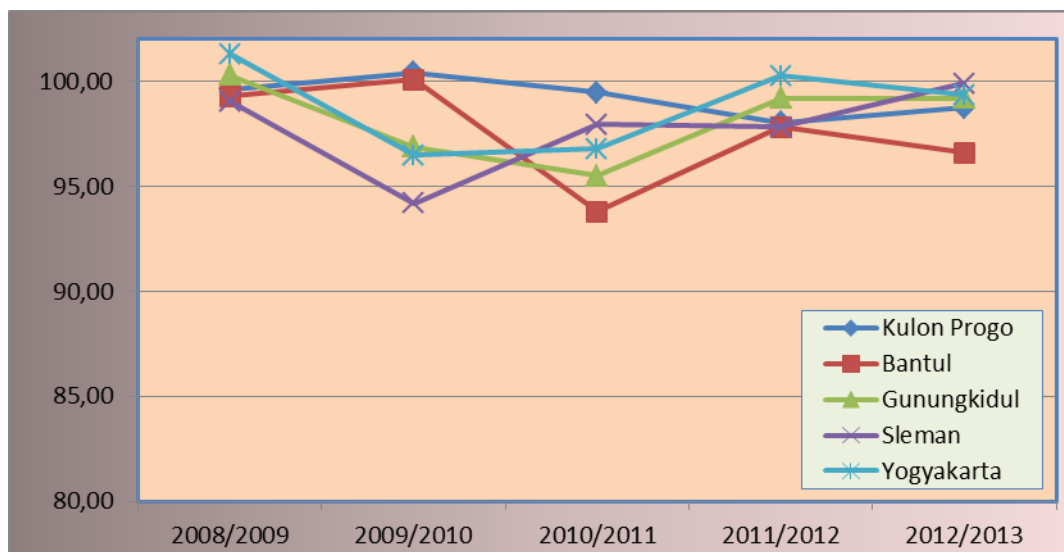
mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) kelulusan sekolah SD/MI angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup tajam, tahun 2011. Sedangkan angka kelulusan sekolah setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusannya dalam lima tahun terakhir terus meningkat, kecuali tahun 2011.

Tabel 2.58
Angka Lulusan Tingkat SD dan MI DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	99,62	100,43	99,48	98,04	98,74
2	Bantul	99,31	100,08	93,80	97,82	96,60
3	Gunungkidul	100,30	96,89	95,52	99,20	99,20
4	Sleman	99,04	94,20	97,95	97,83	99,91
5	Yogyakarta	101,30	96,47	96,78	100,26	99,35
	Rata-rata	99,79	98,18	96,47	98,53	98,45

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



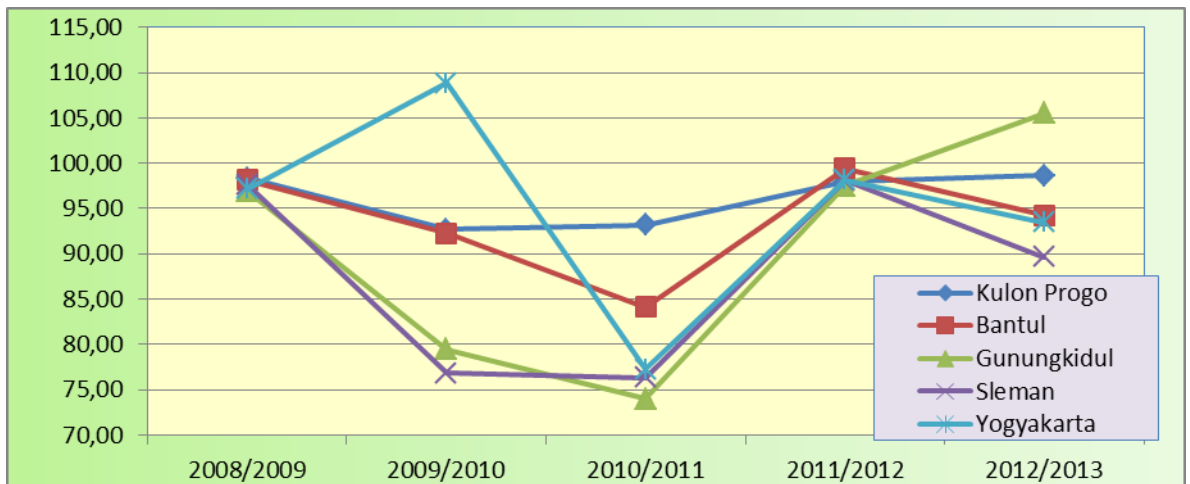
Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.32
Angka Lulusan Tingkat SD dan MI DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

Tabel 2.59
Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTS DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	98,37	92,72	93,20	97,96	98,65
2	Bantul	98,18	92,28	84,16	99,40	94,27
3	Gunungkidul	96,91	79,46	74,01	97,51	105,50
4	Sleman	97,62	76,85	76,37	98,09	89,67
5	Yogyakarta	97,19	108,81	77,28	98,12	93,49
	Rata-rata	97,65	90,15	81,84	98,28	96,83

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



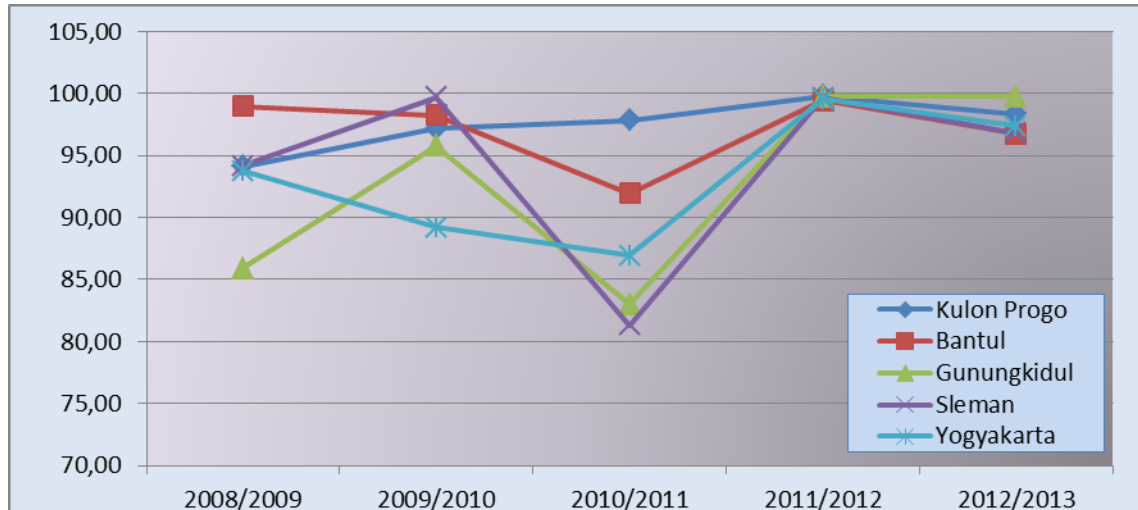
Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.33
Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTS DIY
Tahun 2008/2009 s/d 2012/2013

Tabel 2.60
Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	94,11	97,18	97,82	99,77	98,33
2	Bantul	98,96	98,26	91,96	99,45	96,73
3	Gunungkidul	85,89	95,79	83,00	99,76	99,76
4	Sleman	94,16	99,67	81,31	99,64	96,78
5	Yogyakarta	93,77	89,19	86,94	99,54	97,37
	Rata-rata	93,38	95,32	88,98	99,61	97,74

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.34
Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY
Tahun 2008/2009 - 2012/2013

e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari 35,5 % persen pada tahun 2009 menjadi 62 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada jenjang Pendidikan Menengah terjadi peningkatan, dari 59 persen pada tahun 2009 menjadi 82,1 persen pada tahun 2012. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada Pendidikan Menengah. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.61
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV
Per Jenjang Pendidikan di DIY, 2009–2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Dasar (SD/MI)					
1.1.	Jumlah Guru	23.542	20.379	23.820	23.719	23.222
1.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	8.361	9.602	11.385	12.813	14.447
1.3.	Persentase	35,5%	47 %	47,8 %	54 %	62 %
2	Pendidikan Menengah (SMP/MTs)					
2.1.	Jumlah Guru	13.110	13.131	12.971	12.684	12.634
2.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	7.758	10.028	10.207	10.388	10.376
2.3.	Persentase	59 %	76,4 %	78,7 %	81,9 %	82,1 %

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Jika dilihat secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV menurut kabupaten/kota di DIY pada tahun 2013 berkisar antara 60 hingga 83 persen. Persentase tertinggi adalah Kota Yogyakarta 83 persen dan terendah Kabupaten Gunungkidul 60 persen. Perbedaan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV antar kabupaten/kota di DIY antara yang terendah dan tertinggi sangat besar (hampir dua kali lipatnya), kondisi ini memberikan gambaran adanya kesenjangan tingkat pendidikan guru.

Tabel 2.62
Prosentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV (SD - SLTA)
Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009–2013

NO	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Yogyakarta	70	76	77	80	83
2.	Kab. Bantul	56	69	69	75	80
3.	Kab. Kulon Progo	51	64	61	62	73
4.	Kab. Gunungkidul	46	62	60	60	60
5.	Kab. Sleman	55	64	66	71	76
	Provinsi					

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita.

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 jumlah posyandu di DIY mengalami peningkatan dari 5.643 unit di tahun 2009 dengan jumlah balita sebanyak 207.901 balita. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tahun 2010 sebanyak 5.652 unit, sedangkan tahun 2011 sebanyak 5.675 unit dan di tahun 2012 meningkat menjadi 5.691 unit, dan di 2013 diproyeksikan sebanyak 5.691 unit.

Jumlah balita di DIY 2009-2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2011 meningkat menjadi 214.262 balita dari tahun 2010 sebanyak 209.856. Jumlah balita di tahun 2012 sebanyak 182.088 dan meningkat di tahun 2013 menjadi 196.265 balita. Perkembangan jumlah balita DIY yang fluktuatif juga mempengaruhi rasio posyandu per satuan balita di DIY. Rasio posyandu per satuan balita DIY tahun 2011 sebesar 26,49, kemudian naik di tahun 2012 menjadi 31,25, dan turun menjadi 29,00 di tahun 2013.

Tabel 2.63
Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per satuan Balita DIY
Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Posyandu	5.643	5.652	5.675	5.691	5.691
Jumlah Balita	207.901	209.856	214.262	182.088	196.265
Rasio Posyandu per satuan balita	27,14	26,93	26,49	31,25	29,00

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

*: Angka sementara

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah DIY dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan

penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2012 sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.131 penduduk. Sedangkan untuk proyeksi 2013, jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk.

Tabel 2.64
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk
Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Puskesmas	118	120	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	439	441	442	441	441
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,128	0,126	0,125	0,123	0,122

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

*: Angka sementara

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk.

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.386 jiwa.

Tabel 2.65
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Rumah Sakit	66	66	72
Rumah Sakit Umum Pusat	1	1	1
Rumah Sakit Umum Daerah	6	6	6
Rumah Sakit Umum Swasta	37	37	41

Uraian	2011	2012	2013*
Rumah Sakit TNI/ POLRI	3	3	3
Rumah Sakit Khusus	19	19	21
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0186	0,0184	0,0195

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

*: Angka Sementara

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Data BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka 48,3% dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. Jumlah penduduk DIY pada tahun 2011 mencapai 3.487.325 jiwa. Jumlah RS pemerintah dan swasta sebanyak 66 buah, BOR masih tergolong rendah yaitu 48,3 %. Standar angka ratio tempat tidur dibanding penduduk adalah 1 : 1000, sehingga dengan demikian dibutuhkan sebanyak 3.487 TT, data yang ada menunjukkan bahwa di DIY sudah mempunyai 5.950 TT. Dengan demikian di DIY jumlah tempat tidur di rumah sakit dirasa sudah cukup terpenuhi. Apalagi didukung dengan cakupan kunjungan penduduk miskin ke fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49 %), sehingga penting bagi semua provider untuk menjalankan sistim rujukan dengan benar. Berikut adalah tabel ketersediaan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan BOR menurut kabupaten/kota di Yogyakarta:

Tabel 2.66
Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR
Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tempat Tidur Kelas 3	Jumlah Hari Perawatan	Bed ocupansy ratio (BOR)
1	Kota Yogyakarta	390.553	18	1.875	682	361.072	50,8%
2	Kab Bantul	921.263	11	879	415	158.445	53,3%
3	Kab Kulon Progo	390.207	8	524	201	32.933	18,2%

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tempat Tidur Kelas 3	Jumlah Hari Perawatan	Bed ocupansy ratio (BOR)
4	Kab Gunungkidul	677.998	3	257	109	59.471	62,7%
5	Kab Sleman	1.107.304	26	2.415	931	332.592	54,7%
6	DIY	3.487.325	66	5.950	2.338	944.513	48,3%

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014. Pada tahun 2013, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.378 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebanyak 1.214 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2013 sebesar 37,98. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 2.633 penduduk. Walaupun rasio dokter umum di DIY sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (30 per 100.000 penduduk), tetapi jumlah tersebut masih di bawah ideal (1 dokter umum melayani 2.500 penduduk).

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2013 adalah sebanyak 1.180 orang menurun dari tahun 2012 yang sebanyak 1.354 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 32,53. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.074 penduduk. Rasio tersebut sudah jauh di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (9 per 100.000 penduduk).

Jumlah dokter gigi DIY tahun 2013 sebanyak 608 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 597 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 16,76.

Tabel 2.67
Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi
per 100.000 Penduduk DIY tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Dokter Umum	1.304	773	1.358	1.214	1.378
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	38,05	22,08	38,32	33,85	37,98
Jumlah Dokter Spesialis	931	789	1.245	1.354	1.180
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	27,17	22,53	35,13	37,76	32,53
Jumlah Dokter Gigi	222	304	385	597	608
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	6,48	8,68	10,86	16,65	16,76

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka Sementara

e. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor penentu dalam memberikan gambaran pelayanan kesehatan kepada penduduknya. Adapun tenaga medis yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dicakup dalam hal ini adalah tenaga dokter dan paramedis.

Rasio perawat di DIY tahun 2013 sebesar 200,40 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang sebesar 158 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2013 sebesar 47,30 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah target renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang sebesar 75 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.68
Jumlah dan Rasio Perawat dan Bidan Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Perawat	4.874	4.371	6.369	6.560	7.270
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	142,24	124,84	179,73	182,94	200,40
Jumlah Bidan	1.009	1.172	1.828	1.927	1.716
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	29,45	33,47	51,58	53,74	47,30

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka sementara

f. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (**Pusat Kesehatan Masyarakat**) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di DIY pada tahun 2013 sebanyak 121 puskesmas yang tersebar di 78 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas sebesar 4.025.741. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di DIY sebanyak 320 puskesmas pembantu yang tersebar di 438 desa/kelurahan.

Tabel 2.69
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY
Tahun 2011-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Jumlah Puskesmas	121	121	121
2	Jumlah Kecamatan	78	78	78
3	Jumlah Kunjungan Puskesmas	3.924.814	3.802.382	4.025.741
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	321	320	320
5	Jumlah Desa/Kelurahan	438	438	438

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, diolah

g. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2012 mencapai 99,85%, angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2010, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 97,69 % meningkat pada tahun 2011 menjadi 99,73% dan meningkat lagi di tahun 2012 mencapai 99,85%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.70
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	44.041	43.038	44.847	45.880	45.880
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	47.599	44.057	44.968	45.948	45.948
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	92,53	97,69	99,73	99,85	99,85

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan pembangunan di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakarya dan jasa konstruksi, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum. Dalam menjalankan pelayanan urusan tersebut, Pemerintah DIY bertanggungjawab untuk :

1. melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan , dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY.
3. menyediakan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan keciptakarya ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Melalui dana APBD 2013 telah dilakukan konservasi sumber daya air dengan menyelesaikan DED untuk 2 embung dan pengerjaan pembangunan 3 unit embung baru. Pada tahun 2014 telah dialokasikan perencanaan pembangunan 4 embung, dan pembangunan baru sebanyak 4 unit, serta melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung yang telah terbangun dan waduk Sermo. Kegiatan-kegiatan

tersebut selain menjadi bagian dari konservasi sumber daya air juga sebagai bagian kegiatan untuk penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada tahun 2013 telah berhasil menambah ketersediaan air baku di DIY sebanyak 34 lt/detik, dan akan dilanjutkan pada tahun 2014 dengan mengalokasikan kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku yang diharapkan menjadi landasan bagi pencapaian target penambahan penyediaan air baku sebanyak 1.200liter/detik dari kondisi awal pada tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan persentase luasan Daerah Irigasi (DI) terlayani dilakukan kegiatan perencanaan rehabilitasi, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi DI kewenangan provinsi, serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Pada tahun 2013 telah diselesaikan penyusunan inventarisasi dan detail desain rehabilitasi jaringan irigasi pada 4 (empat) daerah irigasi dengan total areal seluas 2.497,93 ha, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 44 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY, dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan pada 14 (empat belas) daerah irigasi. Serangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2014 yang diharapkan dapat menambah persentase luasan DI terlayani sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir dilakukan untuk menangani sejumlah 60 titik sampai dengan tahun 2014 melalui serangkaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yaitu dengan penguatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong;
2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong dan karung plastik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir;

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi.

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi adalah 619,34 Km dan panjang jembatan 4.393,09 m. Persentase kondisi Jalan Provinsi dengan kondisi mantap adalah sebesar 73,15% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 72,87% atau sepanjang 451,3 km. Persentase ini diharapkan dapat terus meningkat dengan pelaksanaan rincian kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Peningkatan jalan provinsi sepanjang 8,02 km dan peningkatan jembatan provinsi sepanjang 171 m
2. Rehabilitasi jalan provinsi sepanjang 11,5 km (APBD), dan 2,7 km (DAK)
3. Rehabilitasi 1 unit jembatan sepanjang 7 m
4. Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 512,5 km dan pemeliharaan rutin jembatan provinsi sepanjang 3686,7 m

Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa yang didasari oleh adanya potensi di daerah tersebut maka dibangun jalur lintas selatan. Manfaat pembangunan jalur lintas selatan adalah merupakan salah satu usaha untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata dan industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/ JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2012 tahapan pembangunan JJLS yang meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan telah menangani 44,575 km sehingga menyisakan 80,550 km yang belum tertangani. Pada tahun 2013 Pemerintah DIY telah melakukan pembebasan lahan seluas 76.984 m² atau sebesar 28,55%.

Pembangunan pada sub sektor bidang air minum berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mendukung pencapaian MDGs khususnya target 7C yakni menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang layak pada tahun 2015.

Sampai dengan tahun 2013, persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak di DIY mencapai 74,25%. Peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang layak dicapai dengan melakukan ; pengembangan dan optimalisasi SPAM IKK dan SPAM Desa. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1 s.d. 2 liter/detik.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Hingga tahun 2013 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 16.191 SR. Angka ini telah melampaui target di RPJMD 2012-2017, namun masih terdapat gap terhadap pencapaian target MSMHP hingga tahun 2014. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam penyediaan SR. Pada tahun anggaran 2103 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Lateral Air Limbah Terpusat di Kawasan Depok Kabupaten Sleman dan di Kawasan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP.

Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem sanitary landfill pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satu TPA dengan sistem controlled landfill.

Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah melaksanakan kegiatan optimalisasi kinerja TPA Sanitary Landfill Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, kegiatan penyediaan TPST 3R di Kabupaten Bantul 2 TPST 3R (Panggungharjo & Mrisi), di Kabupaten Sleman 1 TPST 3R (Bayen), dan di Kabupaten Gunungkidul 1 TPST 3R (Selang). Melalui pendanaan APBD DIY pada TA 2013 telah dilaksanakan penyusunan NSPM Pengelolaan Persampahan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut presentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan pada tahun 2013 telah meningkat mencapai 53%.

Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY, telah teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di KPY. Pada akhir tahun 2012 telah tertangani 14 titik genangan (27,90%) dari total titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah dilakukan penyediaan jaringan drainase untuk menangani 2 titik genangan di Kawasan Janti dan Kawasan Samirono di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan melalui pendanaan APBD DIY telah ditangani 2 titik genangan di Kawasan Sewon Kabupaten Bantul dan Kawasan Mantrijeron Kota Yogyakarta, sehingga sampai dengan tahun 2013, sejumlah 18 titik genangan telah tertangani atau mencapai 35,29%.

Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi

pertanian/perikanan yang berbasis kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Sampai tahun 2012 sudah sekitar 28% dari kawasan agropolitan, minapolitan, dan desa-desa pusat pertumbuhan yang dikembangkan.

Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Ngemplak Sleman dan Kawasan Desa Pertumbuhan Srandakan Bantul, sedangkan melalui fasilitasi APBN telah terfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar di Kawasan Minapolitan Sindumartani dan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Kawasan Agropolitan Banjaroyo di Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Agropolitan Dlingo dan Sanden di Kabupaten Bantul, sehingga selama tahun 2013 telah terfasilitasi sejumlah 6 Kawasan Agropolitan/Minapolitan, dan dari 6 kawasan tersebut 2 kawasan telah dinyatakan tuntas penanganannya adalah Kawasan Agropolitan Banjaroyo dan Sanden, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dibangun dukungan infrastruktur di 10 kawasan agropolitan/minapolitan telah tertangani atau mencapai 34%.

Pada kawasan perkotaan terdapat 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 66 lokasi atau 53% yang tersebar di 4 kecamatan miskin telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan berupa pembangunan sarana prasarana jalan lingkungan di 14 lokasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 aksesibilitas di kawasan perkotaan yogyakarta khususnya pada kecamatan miskin telah meningkat menjadi 80 lokasi atau 64%.

Secara keseluruhan di DIY terdapat 2.375 lokasi pada kawasan perdesaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 926 lokasi atau 39% wilayah yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. Sampai dengan tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan/jalan lingkungan di 196, sehingga aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan telah meningkat menjadi 1.122 lokasi atau 47%.

2.3.1.4 Urusan Perumahan

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di DIY, Pemerintah DIY melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Pengembangan Perumahan Swadaya.
- 3) Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Berdasarkan data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Penanganan sampai dengan tahun 2013 dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan perbaikan RTLH sejumlah 4.911 dan pada tahun 2013 sejumlah 4.734 unit. Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 169 komunitas. Pada tahun 2013 ada 50 (lima puluh) Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY melalui kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan rincian meliputi :

1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 45 (empat puluh lima) Komunitas.
2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada 5 (lima) komunitas.

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 24 unit sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk ; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan. Rincian Rusunawa yang ada di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Rusunawa di DIY

No	Nama Rusun	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit
1	Cokrodirjan	Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	1	72
2	Tegal Panggung	Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1	68
3	Jogoyudan	Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	1	96
4	Jogoyudan	Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	1	96
5	Ust	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	1	96
6	Uad	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	1	96
7	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96
8	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	
9	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	
10	Pringwulung 1	Sleman	Depok	Condongcatur	2	196
11	Pringwulung 2	Sleman	Depok	Condongcatur		72
12	UII	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani		96
13	UII	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96
14	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96
15	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96
16	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal		
17	Sanata Dharma	Sleman	Maguwoharjo	Plangan	1	96
18	STIKES	Sleman	Gamping	Ambarketawang	1	96
19	JONGKE	Sleman	Mlati	Sendangdadi	4	384
20	Panggungharjo	Bantul	Sewon	Panggungharjo	2	192
21	UMY	Bantul	Kasih	Tamantirto	3	288
22	Lanud Adisucipto	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	1	96
23	Tambak	Bantul	Kasih	Ngestiharjo	1	96
24	UNY	Kulonprogo	Pengasih	Pengasih	2	192

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic

phenomenon of urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Kompetisi penggunaan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan fenomena kawasan kumuh. Luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 107 titik lokasi (54.000 ha) pada tahun 2009 menjadi 57.800 ha pada akhir tahun 2012 atau sebanyak 31 titik lokasi kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah DIY melakukan kegiatan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi jumlah lokasi/luasannya dan telah dilakukan pada 36 titik lokasi.

2.3.1.5 Urusan Penataan Ruang

Sesuai dengan PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang terdapat Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dimana dalam RPJMD 2012 - 2017 , target pelaksanaan kegiatan penataan Ruang DIY adalah tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 16 kawasan strategis, tercapainya 70% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi, serta tercapainya 60% pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan.

Ketugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan Penataan Ruang antara lain adalah berkewajiban untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi berdasarkan Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah dituangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, untuk selanjutnya agar lebih implementatif dijabarkan pada rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, saat ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan melalui Peraturan daerah 1 RTRW Provinsi (DIY), 4 RTRW Kabupaten (Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul) dan 1 RTRW Kota (Yogyakarta). Namun demikian sehubungan dengan telah terjadinya bencana erupsi merapi, yang telah mengakibatkan berubahnya kondisi struktur dan pola ruang pada wilayah DIY, serta dengan telah ditetapkannya Undang- Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka RTRW DIY perlu dilakukan

peninjauan ulang atau review RTRW DIY. Sehingga diharapkan pada Tahun 2015 review Perda RTRW DIY sudah dapat ditetapkan.

Sejalan dengan Visi Gubernur dalam RPJMD 2012 - 2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma “among tani menjadi dagang layar” yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Makna dari paradigam tersebut pada dasarnya menghadapkan DIY kearah selatan dilakukan melalui pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus mengakomodir terkait kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya kegiatan pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela.



Gambar 2.35
Peta Jalur Jalan Lintas Selatan

Selain itu di DIY terdapat kawasan strategis provinsi yang lain yakni Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional. Dalam dua kawasan strategis ini (kawasan strategis Pansela dan KPY) terdapat beberapa wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yang pengaturan penataan ruangnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, atas dasar hal tersebut dalam Review RTRW DIY, wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan strategis tersebut, sebagai kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang, telah disusun Perda Istimewa Tata Ruang, sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten seperti yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang no 13 tahun 2012 tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perencanaan tata ruang yang dilakukan tidak bisa hanya mengatur wilayah Kasultanan dan Kadipaten saja, tetapi juga harus mengatur wilayah hinterland dari wilayah Kasultanan dan Kadipaten serta satuan-satuan ruang Keistimewaan di sekitarnya.

Bagian dari satuan-satuan ruang keistimewaan dimaksud adalah antara lain kawasan yang telah ditetapkan sebagai City Heritage yakni ; Kawasan Malioboro, Kraton, Kotabaru, Pakualaman dan Kotagede yang terdapat di Kota Yogyakarta, Kawasan Merapi dan Prambanan yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kawasan Kotagede, Pleret, Imogiri dan Parangtritis yang terdapat di Kabupaten Bantul, Kawasan Sokoliman dan Gunung Purba Nglanggeran yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, serta Kawasan Pusat Kota Wates yang terdapat di Kabupaten Kulon progo.

Pemanfaatan ruang di DIY harus dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan harapan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi.

Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan

kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi, khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung, untuk selanjutnya dievaluasi hasil dari pemantauan tersebut sebagai bahan dalam pengaturan pemanfaatan ruang.

2.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan SKPD.

Dokumen RPJP DIY untuk periode 2005-2025 adalah RPJP DIY Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009. Pelaksanaan RPJP DIY telah berlangsung selama dua periode waktu RPJMD dan saat ini memasuki tahap ketiga, yang berarti saat ini merupakan proses pertengahan pelaksanaan RPJP DIY. Pada tahun 2013, telah dilakukan Review RPJP DIY 2005-2025. Hal tersebut dilakukan karena lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang dipastikan akan membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan DIY. Disamping itu, Review terhadap dokumen RPJP DIY tersebut untuk penyelarasan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan dan penyajian dokumen perencanaan. Beberapa hasil dari review tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka logika penurunan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan belum tertuang secara tertulis dalam dokumen RPJP DIY.
2. Terdapat perbedaan struktur redaksional yang dituangkan dalam dokumen RPJP DIY dengan yang dituntut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Namun secara substansi sudah memenuhi yang dipersyaratkan.
3. Integrasi nilai dasar keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawulo Gusti) dengan visi dan misi dalam dokumen RPJP DIY.

Dokumen RPJM DIY yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah RPJM DIY yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN. RPJM DIY Tahun 2012-2017 ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan setelah Pelantikan Gubernur pada tanggal 10 Oktober 2012 (berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012). Sementara itu, Penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD dituangkan dalam RKPD yang merupakan dokumen tahunan.

2.3.1.7 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terbatas pada layanan transportasi darat (jalan dan jalan rel) dan transportasi udara, dengan fokus layanan adalah transportasi jalan, mengingat tanggung jawab dan urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah DIY. Di bidang transportasi jalan, sampai dengan saat ini kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam upaya mencari solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memasyarakatkan penggunaan angkutan umum, pada tahun 2008, khususnya di Perkotaan Yogyakarta telah

diluncurkan pengoperasian Trans Jogja. Angkutan Trans Jogja ini merupakan alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” dan bukan sistem setoran. Dengan konsep baru ini, diharapkan resiko yang dapat diterima oleh operator terkait dengan penyediaan biaya operasi kendaraan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan standar pelayanan yang lebih baik dan kendaraan yang baru, diharapkan sedikit demi sedikit dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Keberadaan layanan Trans Jogja, tidak serta merta menghilangkan layanan angkutan perkotaan reguler. Banyaknya jumlah angkutan perkotaan reguler yang memiliki ijin trayek, menyebabkan tidak semua layanan angkutan perkotaan reguler melebur dalam layanan “buy the service” Trans Jogja.

Penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan. Oleh karena itu, angkutan umum dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi 2 (dua) hal utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah DIY saat ini.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2013 telah terpasang 25 unit ATCS atau 45% dari 55 simpang yang direncanakan. Secara rinci, ATCS yang sudah terpasang adalah 16 unit yang dialokasikan melalui APBN, 1 unit melalui APBD-DIY dan 8 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal bus priority. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY.

Untuk memudahkan perpindahan layanan angkutan umum di jalan, DIY memiliki beberapa terminal penumpang, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Simpul Transportasi Jalan di DIY

Simpul Transportasi	Tipe	2009	2010	2011	2012	2013
Terminal Bus	A	3	3	3	2	2
	B	2	2	2	3	3
	C	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Dari beberapa terminal yang ada, 2 (dua) terminal sudah terintegrasi layanan angkutan umum perkotaan dan AKDP, yakni terminal Giwangan (tipe A) di Kota Yogyakarta dan Terminal Jombor (tipe B) di Kabupaten Sleman.

Untuk memudahkan perpindahan trayek maupun akses layanan angkutan umum perkotaan, sampai dengan tahun 2013, telah tersedia 112 halte Trans Jogja statis dan 40 halte Trans Jogja portable di Perkotaan Yogyakarta. Dari 112 halte statis tersebut, 2 (dua) buah halte telah dilengkapi fasilitas park dan ride, yakni halte Prambanan dan Ngabean. Fasilitas Park and Ride tersebut, merupakan fasilitas pendukung bagi pengguna angkutan umum perkotaan, dimana penumpang angkutan umum dapat menitipkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Sedangkan untuk angkutan perkotaan reguler selain Trans Jogja, proses perpindahan penumpang dan fasilitas untuk naik turun penumpang masih dilakukan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga keberadaan pengendalian dan pemantauan pelayanan angkutan umum di jalan, mutlak diperlukan.

Load faktor untuk angkutan umum perkotaan reguler sejak tahun 2008 terus mengalami penurunan, sedangkan angkutan perkotaan Trans Jogja selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY cenderung untuk memilih menggunakan angkutan umum perkotaan yang dapat diandalkan dan nyaman. Secara keseluruhan, load faktor angkutan umum perkotaan jika digabungkan akan menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.73
Load Faktor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY

Tahun	Angkutan Perkotaan (%)			Angkutan AKDP (%)
	Reguler	Trans Jogja	rata-rata	
2008	27,60	31,87	29,74	36,18
2009	27,29	33,60	30,45	32,40
2010	22,00	33,99	28,00	18,00

Tahun	Angkutan Perkotaan (%)			Angkutan AKDP (%)
	Reguler	Trans Jogja	rata-rata	
2011	24,01	38,26	31,14	23,00
2012	22,73	42,41	32,57	26,85
2013	20,21	48,77	34,49	34,79
Rata-Rata	24,73	36,03		27,29

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY, 2013

Untuk mendukung pergerakan angkutan umum di jalan dan mempersempit ruang gerak kendaraan pribadi di Perkotaan Yogyakarta, mulai tahun 2012 telah diterapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis kawasan. Terdapat 7 (tujuh) kawasan yang akan diatur, yakni Jati Kencana - Demak Ijo, Malioboro, Kraton, Kranggan, Demangan, Kota Gede dan Seturan.

Sedangkan untuk keselamatan lalu lintas di jalan diperlukan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman, lampu penerangan jalan (LPJU), rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), *warning light*, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APIL/*traffic light*). Kebutuhan akan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan ini sangat kondisional, disesuaikan dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada dan kajian keselamatan di jalan.

Untuk moda transportasi darat lainnya, penumpang kereta api didominasi angkutan kereta api jarak pendek (Yogyakarta - Solo) dan beberapa simpul stasiun yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.74
Jumlah Simpul Transportasi Kereta Api di DIY

Simpul Transportasi	Tipe	2009	2010	2011	2012	2013
Stasiun Kereta Api	Besar	2	2	2	2	2
	Kelas 1	--	--	--	--	--
	Kelas 2	1	1	1	1	1
	Kelas 3	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Pada tahun 2013, terdapat 12 (duabelas) layanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta dan bukan merupakan kereta api terusan, dengan 3 (tiga) diantaranya merupakan kereta api jarak pendek. Sedangkan untuk kereta api terusan yang berhenti di Stasiun Yogyakarta, terdapat 23 layanan untuk semua jurusan dan tipe layanan.

Kondisi transportasi udara dapat dilihat dari jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Selama periode 2008-2011 telah terjadi perubahan preferensi masyarakat DIY khususnya dalam menggunakan moda transportasi jarak jauh yaitu ditandai dengan mulai beralihnya masyarakat menggunakan pesawat terbang dibanding moda transportasi lainnya. Pada tahun 2013, pergerakan pesawat untuk penerbangan domestik sebesar ± 1.714 gerakan atau mengalami kenaikan 10,6 % dari ± 1.533 gerakan pada tahun 2012. Sedangkan untuk penerbangan luar negeri, terdapat ± 125 gerakan pada tahun 2013 atau naik sebesar 36 % dari ± 80 gerakan di tahun 2012. Jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara untuk penerbangan domestik adalah sebesar ± 234.703 atau naik sebesar 14,42 % dari ± 200.860 pada tahun 2012. Untuk pengguna layanan luar negeri, jumlah penumpang sebesar ± 13.739 atau naik sebesar 31,4 % dari ± 9.427 penumpang pada tahun 2012. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergerakan pesawat atau operasi penerbangan yang ditunjukkan dengan adanya proses *take off/landing* di Bandara Adisutjipto meningkat sangat pesat.

Sampai dengan tahun 2013, terdapat 1 (satu) bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melayani penerbangan domestik maupun luar negeri, dengan klas layanan I-B sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.75
Jumlah Simpul Transportasi Udara di DIY

Simpul Transportasi	Klas	2009	2010	2011	2012	2013
Bandar Udara	I-B	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

2.3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Kualitas Air

1. Kondisi Kualitas Air Sungai

DIY memiliki 11 sungai utama. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun pada beberapa ruas sungai dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2012 pemantauan kualitas air sungai mengukur parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL) , Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida (H₂S), Fluorida, Fosfat (PO₄), Nitrat (NO₃-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr⁺⁶), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan

Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja (Fecal Coli) dan Total Coli). Sedangkan analisis hasil pemantauan kualitas air untuk menentukan status mutu air sungai digunakan metode storet. Dari hasil analisis storet tersebut secara umum sungai di Provinsi DIY mulai pada bagian hulu sampai bagian hilir sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1berikut ini :

Tabel 2.76
Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet, 2012

NO	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai	Keterangan
1	Winongo	≤ -31	-91 hingga -106	Cemar Berat
2	Code	≤ -31	-88 hingga -117	Cemar Berat
3	Gajahwong	≤ -31	-94 hingga -113	Cemar Berat
4	Sungai Bedog	≤ -31	-89 hingga -111	Cemar Berat
5	Tambakbayan	≤ -31	-86 hingga -101	Cemar Berat
6	Oyo	≤ -31	-96 hingga -105	Cemar Berat
7	Sungai Kuning	≤ -31	-95 hingga -109	Cemar Berat
8	Sungai Konteng	≤ -31	-95 hingga -115	Cemar Berat
9	Sungai Belik	≤ -31	-102 hingga -124	Cemar Berat

2. Kondisi Pantai dan Air Laut

Secara geografis, laut dan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar - landai (kemiringan lereng 0 - 2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km.

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai DIY hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan

antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

Pasang surut merupakan proses naik-turunnya permukaan air laut (*mean sea level*) secara berkala, yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik dari benda-benda angkasa terutama bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut *mixed tide predominantly semi diurnal* atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut.

Arus yang terjadi di perairan Laut Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh arus menyusur pantai (*longshore current*) dan arus meratas pantai (*rip current*). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nearshore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai. Pola arus pantai ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh gelombang atau ombak datang menuju garis pantai. Sudut datang gelombang di perairan Pantai Selatan DIY kurang lebih 110° , sehingga lebih dominan membentuk arus menyusur pantai. Pola arus menyusur pantai berdampak besar terhadap pengangkutan material pasir, sedimen, dan sampah pantai. Kondisi ini terlihat jelas di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Pada beberapa wilayah pantai seperti di teluk dan muara sungai terjadi penumpukkan material pasir, sedangkan di tempat lain terjadi penggerusan pantai akibat terangkutnya material pasir oleh masa air yang ditimbulkan oleh gelombang datang.

Umumnya wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY yang berkisar antara 2,25 m – 3,30 m dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas,

dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Kecerahan perairan pesisir DIY hampir konstan sepanjang tahun dengan kondisi kecerahan yang rendah dan atau kekeruhan yang tinggi akibat proses abrasi pantai oleh ombak dan gelombang. Ombak dan gelombang yang sangat besar di pantai Selatan DIY, memiliki daya merusak pantai yang juga sangat besar, sekaligus menimbulkan efek pencucian yang tinggi terhadap material (pasir dan tanah) pembentuk garis pantai. Akibatnya terjadi kekeruhan sepanjang waktu, dimana material pasir dan tanah yang menimbulkan kekeruhan tersebut dapat mengganggu pola migrasi ikan.

Luas tutupan karang yang ada di pantai selatan DIY, tersebar dari Pantai Sadeng sampai dengan Congot pada lokasi 2 - 4 mil dari pantai pada kedalaman 15 - 25 m. Beberapa jenis karang yang sering dijumpai antara lain karang jahe (*Coral submassive* atau *Acropora submassive*), karang bundar (*Coral encrusting*), karang putih atau karang yang sudah mati (*bleaching*), karang otak (brain coral atau *Coral massive*), karang gondong (karang seperti daun atau *Coral foliose*), karang biru (*Acropora*). Sebaran karang di lepas pantai biasanya terjadi secara spot-spot dan lebih mengarah berbentuk gosong karang. Gosong karang adalah tempat berbagai makhluk hidup bersama-sama, terbentuk dari kerangka batu kapur, karang laut yang sudah mati yang tercampur akibat aktivitas ganggang penyusun karang.

Luas tutupan karang di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan seluas 5.100 Ha. Hal tersebut didasarkan bahwa tutupan

karang terjadi mulai dari tepi pantai sampai 400 m dari pantai, dengan rata-rata lebar tutupan 200 m. Dari panjang pantai Kabupaten Gunungkidul 71 km tidak semua tertutupi karang dan diperkirakan hanya sebesar 50 % terjadi penutupan karang. Sedangkan untuk pantai di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditemukan spot-spot pertumbuhan karang yang lebih mengarah bentuk gosong karang dan terjadi di sepanjang pantai pada jarak 2 – 5 mil dari pantai pada perairan yang tidak terlalu dalam.

Kualitas air laut dari hasil pengukuran parameter fisika, kimia, biologi dan logam terlarut di Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah , Pantai Kuwaru, Pantai Sundak dan Pantai Trisik pada tahun 2012 yang dilaksanakan dalam dua periode selama satu tahun (bulan Maret dan Juli), menunjukkan bahwa secara fisik, suhu air laut sejuk sampai panas, yaitu antara 24° C – 31°C. Untuk wisata bahari suhu 31°C termasuk kurang nyaman, apalagi jika kondisi pantai minim penghijauan.

Secara kimia, derajat keasaman (pH) air laut antara 7,5 – 8,36, nilai pH menunjukkan rata-rata masih di bawah ambang atas, namun perlu diwaspadai karena nilainya hampir mendekati maksimal. Nilai pH air laut normal menurut baku mutu berkisar antara 7 – 8,5 ($\pm < 0,2$), sementara pH yang mempunyai tingkat keasaman tinggi atau basa tinggi menunjukkan bahwa air laut mengalami polusi. Selain itu, tingginya fosfat dan nitrat yang berasal dari limbah rumah makan yaitu air cucian yang mengandung detergen dan ketidakdisiplinan pelaku usaha dalam pengolahan limbah. Salinitas yang telah diukur menunjukkan bahwa air laut di DIY berada dalam batas normal, yaitu antara 0,91% - 2,99%. Kadar salinitas lebih tinggi pada bulan Juli dari pada bulan Maret yang berbanding lurus dengan berkurangnya curah hujan.

3. Kondisi Kualitas Air Tanah

Hasil pemeriksaan kualitas air sumur pada tahun 2012 yang dilakukan di beberapa lokasi permukiman penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah sampel adalah 68 titik, dimana 34 sampel diambil bulan April dan sisanya diambil bulan Agustus. Parameter fisika yang diuji adalah bau dan kekeruhan. Parameter kimia yang diuji meliputi kandungan besi, fluorida, kesadahan, klorida, chrom heksavalent, mangan, nitrat, nitrit, pH, deterjen dan permanganat. Parameter biologi yang diuji adalah bakteri koli tinja dan bakteri total koli. Secara keseluruhan ada 15 parameter yang diuji. Hasil analisis laboratorium menunjukkan ada empat parameter yang melebihi baku mutu dan satu parameter yang di bawah baku mutu. Parameter yang melebihi baku mutu adalah mangan, bakteri coliform dan bakteri koli tinja. Sedangkan parameter yang di bawah baku mutu adalah parameter pH.

Parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli yang melebihi baku mutu ditemukan di sebagian besar sampel. Terdeteksinya bakteri total koli mengindikasikan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Sedangkan adanya bakteri koli tinja merupakan indikator yang lebih spesifik yaitu mengindikasikan adanya kontaminasi kotoran manusia. Sebagian besar sumur yang diteliti telah tercemar oleh bakteri koli sehingga tidak memenuhi persyaratan biologis untuk air bersih.

B. Kondisi Udara Ambien

Penyumbang polutan udara terbesar di Provinsi DIY sekitar 80 persen berasal dari sumber bergerak (sektor transportasi). Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif di ruas-ruas jalan protokol yang notabene mempunyai kadar polutan udara lebih tinggi dari pada di wilayah permukiman, kompleks pertokoan dan pedesaan, secara umum untuk parameter kunci pencemaran udara ambient seperti karbonmonoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Timah Hitam (Pb), Oksida Nitrogen (NO_x) dan Sulfur dioksida (SO₂) menunjukkan konsentrasi zat

pencemar udara tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan (kualitas udara ambient baik). Namun demikian sektor transportasi perlu tetap diwaspadai karena merupakan ancaman potensial pencemaran kualitas udara di DIY. Hasil Pemantauan Kualitas Udara ambient dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.77
Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-Ruas Jalan Protokol di DIY, 2012

No	Parameter Pencemar Udara	Baku Mutu	Satuan	Eksisting Konsentrasi	Keterangan
1	Karbon Monoksida (CO)	35	ppm	0,297 - 6,83	Baik
2	Timah Hitam(Pb)	2	µg/m ³	0,22 - 0,34	Baik
3	Oksida Nitrogen (NO _x)	0,212	ppm	0,011 - 0,018	Baik
4	Sulfur Dioksida (SO ₂)	0,340	ppm	0,0159 - 0,0244	Baik
5	Hidro karbon (HC),	160	µg/m ³	61,13 - 67,03	Baik

C. Kondisi Hutan dan Lahan

Luas hutan di DIY 22.138 Ha atau 6,95% dari luas DIY. Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolaannya, yaitu : BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha, luas Hutan Produksi di DIY seluas 13.411,70 Ha, luas Hutan Lindung di DIY seluas 2.312.800 Ha, sedangkan Taman Nasional seluas 1.743.250 Ha dan Taman Hutan Raya seluas 617.000 Ha. Luas Cagar Alam di DIY berdasarkan Keputusan menteri pertanian No. : 526/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 tentang penunjukan areal batu gamping Eosin seluas 1,117 Ha yang terletak di desa gamping, Sleman sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Cagar alam (seluas 0,015 Ha) dan sebagai Taman Wisata alam (seluas 1,102 Ha). Sedangkan Cagar Alam Imogiri seluas 11,400 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas

16.819,52 Ha. Luas Suaka Margasatwa 615,600 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Taman Nasional di DIY seluas 1.743,250 Ha berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. ; 234/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6.410 Ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sleman DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Perhitungan luas kelompok hutan cikal bakal TNGM yang berada di wilayah DIY adalah CA dan TWA Turgo (seluas 282,25 Ha) dan hutan lindung (seluas 1.461 Ha).

Luas lahan DIY 318.580 Ha, hanya 18,40% saja yang berupa lahan sawah dan 60% berupa lahan kering/marjinal. Setiap tahun lahan sawah mengalami penyempitan rata-rata 0,3 % per tahun. Pertambahan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang menuntut tersedianya sarana perumahan dan infrastruktur lainnya. Akan lebih memprihatinkan lagi jika penyempitan lahan diikuti dengan penurunan tingkat kesuburan karena penggunaan pupuk kimia yang intensif, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga kerugian sosial. Penurunan kesuburan tanah diketahui dari hasil monitoring kerusakan lahan akibat produksi biomassa, yaitu pada sifat berkurangnya permeabilitas tanah, meningkatnya volume (BV) dan meningkatnya Daya Hantar Listrik (DHL) pada beberapa sampel tanah.

D. Kondisi Partisipasi Masyarakat

Adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan lingkungan yaitu munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga, pembuatan sumur resapan/biopori, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam, meskipun jumlahnya masih terbatas.

E. Kondisi Pentaatan / Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/ aktifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

2.3.1.9 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Rasio luas tanah bersertifikat di wilayah DIY menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,23%. Rasio luas bidang tanah bersertifikat di wilayah DIY rata-rata sebesar 7,67%. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, DIY mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai daerah otonom dan daerah istimewa. Sebagai daerah otonom, DIY harus mengemban dan melaksanakan urusan-urusan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai daerah istimewa, DIY mempunyai urusan-urusan keistimewaan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012. Penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang Keistimewaan dan sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY di bidang pertanahan bertumpu pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Di bidang pertanahan perlu diwujudkan semangat keistimewaan atau nilai-nilai dasar sebagaimana telah diuraikan, yaitu: Tahta Untuk Rakyat, Garis lurus simbolis Gunung Merapi-Laut Selatan, Catur Gatra Tunggal, dan Pathok Nagara. Nilai-nilai dasar yang secara eksplisit berdiri sendiri ini teranyam di bawah “filosofi payung” Hamemayu Hayuning Bawana.

Sebagai bagian dari tata ruang istimewa DIY, Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan “modal” sekaligus sebagai “model” keberlanjutan dan perubahan dimasa datang. Sebagai “modal”, tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah memberikan dasar dan bentuk nyata tatanan fisik ruang DIY yang berbasis budaya dan telah menjadi identitas ke-DIY-an. Sedangkan sebagai “model”, tanah Kasultanan dan Kadipaten telah memberikan panduan dalam hal: (i) pemanfaatan (mencakup: keberlanjutan budaya, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat), (ii) status tanah (mencakup: tanah keprabon dan tanah bukan keprabon), (iii) penggunaan tanah (mencakup: tanah hak andarbe tan keno diliyerke atau hak mengelola tidak boleh dipindahtangankan serta tanah hak anganggo turun temurun yakni hak pemanfaatan tanah oleh individu).

Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai “badan hukum khusus” maka Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY juga digunakan bagi keberlangsungan kelembagaan, kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun masyarakat yang menempati tanahnya.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan pertanahan adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Indikator kinerja pada urusan pertanahan adalah bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum.

Pada tahun 2013 untuk indikator bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum dari target sebesar 8.805 bidang tanah, realisasinya sebesar 8.911 bidang tanah atau persentase realisasi sebesar 101%.

Untuk tanah kas desa, masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu adanya kepastian data administrasi dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di DIY.

Secara umum, masih banyak permohonan pemanfaatan tanah (baik SG, PAG, maupun Tanah Kas Desa) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

2.3.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem

administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan).

Pada tahun 2013 untuk indikator persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan) dari target sebesar 86%, realisasinya sebesar 95% atau persentase realisasi terhadap target sebesar 110%. Sebagian besar Wajib KTP yang belum perekaman tersebut diduga telah pindah dari DIY, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum di-update.

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2013, jumlah penduduk DIY yang memiliki akta kelahiran kurang dari 40% dari total penduduk DIY, pemilik akta perkawinan masih di bawah 50% dari total penduduk DIY, dan kepemilikan akta kematian tidak lebih dari 50% dari total penduduk yang meninggal dalam satu tahun. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

2.3.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

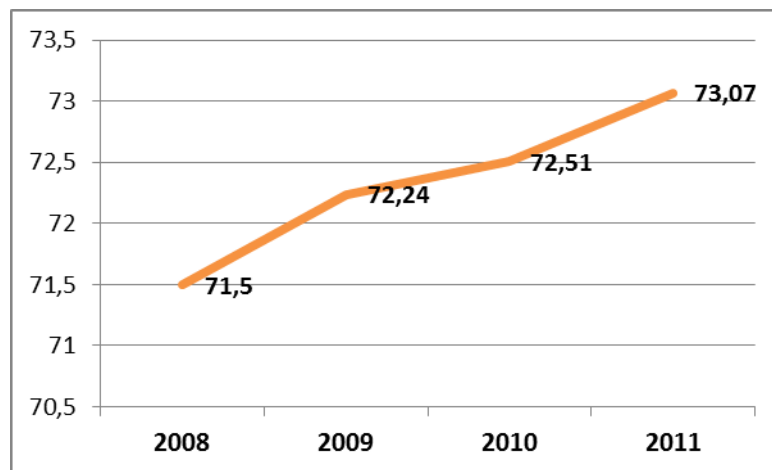
Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri. Tujuan dari pemberdayaan perempuan antara lain : mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

Beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS, Kementerian PP dan PA

Gambar 2.36
Perkembangan IPG DIY, 2008-2011

Capaian IPG dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2011, capaian IPG DIY sebesar 73,07. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di DIY

capaian IPG tahun 2011 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 77,92 dan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.78
Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, 2008–2011

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
DIY	71,50	72,24	72,51	73,07
Kota Yogyakarta	77,05	77,10	77,56	77,92
Kab. Bantul	71,20	71,20	71,33	71,71
Kab. Kulon Progo	66,13	66,56	67,04	67,85
Kab. Gunungkidul	64,69	64,77	65,42	66,04
Kab. Sleman	73,73	73,94	74,17	74,75

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Tabel 2.79
Capaian Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten /Kota DIY, 2010-2011

Provinsi/Kabupaten	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan		IPG	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)			
	L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D I YOGYAKARTA	71,37	75,16	96,28	87,09	9,78	8,67	60,82	39,18	72,51	73,07
Kulon Progo	72,53	76,24	96,98	86,50	9,15	8,07	68,03	31,97	67,04	67,85
Bantul	69,42	73,32	96,39	86,25	9,35	8,36	62,06	37,94	71,33	71,71
Gunung Kidul	69,07	72,99	92,22	78,63	7,84	6,32	61,60	38,40	65,42	66,04
Sleman	73,21	76,86	97,90	89,76	11,18	9,97	62,21	37,79	74,17	74,75
Kota Yogyakarta	71,59	75,37	99,78	96,85	11,96	11,30	57,92	42,08	77,56	77,92

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG DIY merupakan yang terbaik secara nasional. Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan lebih baik dibandingkan provinsi lain. Sedangkan capaian IDG DIY 2010 sampai 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80
Capaian IDG DIY, 2010-2011

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	(%)	(%)	(%)	2010	2011
D I YOGYAKARTA	21,82	44,54	39,18	77,70	77,84
Kulon Progo	12,50	44,93	31,97	61,18	61,15
Bantul	15,56	46,53	37,94	67,85	68,46
Gunung Kidul	13,33	44,97	38,40	59,36	62,22
Sleman	18,00	44,02	37,79	70,74	70,52
Kota Yogyakarta	15,00	42,74	42,08	69,85	70,00

Sumber : BPS Provinsi DIY & Kementerian PP & PA, diolah

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan laki-laki. Untuk DIY, besarnya masing-masing elemen dasar untuk menghitung kesetaraan pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

b. Partisipasi Perempuan di Legislatif

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Untuk DIY, perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga perwakilan rakyat masih dibawah kuota undang-undang, yaitu 21,82%. Hal ini berarti masih diperlukan kebijakan dan strategi dalam penyadaran dan pembelajaran politik bagi perempuan di DIY dengan harapan akan mendorong peningkatan kepesertaan perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas.

Tabel 2.81
Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2012

No	DPRD	2012			
		L	P	L+P	%
1	Kota Yogyakarta	34	6	40	15,00
2	Kabupaten Bantul	38	7	45	15,56
3	Kabupaten Kulon Progo	35	5	40	12,50
4	Kabupaten Sleman	41	9	50	18,00
5	Kabupaten Gunungkidul	39	6	45	13,33
6	DPRD DIY	43	12	55	21,82

Sumber : BPPM DIY

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di DIY baik DPRD DIY maupun DPRD kabupaten/kota masih belum mencapai 30%. Beberapa faktor yang menjadikan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selain tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang rendah, masih ada keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dikarenakan adanya anggapan bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki, dan tingkat kepercayaan diri yang masih rendah perempuan untuk berpolitik. Diperlukan *affirmatif policy* dalam mengadvokasi perempuan untuk lebih berperan dalam politik.

c. Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah

Representasi perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat juga dilihat dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Dari 1.669.172 pekerja perempuan di DIY tahun 2012, 30.288 bekerja di lembaga pemerintahan. Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan pekerja perempuan di DIY masih rendah sebesar 1,8. Hal ini bukan berarti perempuan mendapatkan akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki lembaga pemerintahan. Semua penduduk memiliki akses yang sama untuk bekerja di lembaga pemerintah sesuai formasi dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Formasi yang dibutuhkan memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 2.82
Rasio Perempuan di di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	24	28
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	234	245
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	1.213	1269
4	Pekerja perempuan di pemerintah	39.735	30.288
5	Jumlah pekerja perempuan	1.593.084	1.669.172
6	Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2,49	1,81

Sumber : Sakernas dan BPPM, diolah

Berdasarkan struktur jabatan pemerintahan, rasio perempuan yang menempati jabatan struktural masih rendah. Semakin tinggi jabatan struktural yang ada, semakin rendah perempuan yang menempati jabatan tersebut.

Tabel 2.83
Rasio Perempuan pada Jabatan Struktural Pemerintahan
Menurut Kabupaten/Kota/DIY, 2012

No	Kab/Kota	Eselon I		Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
		L	P	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
1	Kota Yogyakarta			20	5	25,00	89	45	50,56	369	319	86,45
2	Kab Bantul			30	3	10,00	124	40	32,26	304	221	72,70
3	Kab. Kulon Progo			20	6	30,00	105	30	28,57	281	145	51,60
4	Kab. Gunungkidul			17	2	11,76	144	21	14,58	362	135	37,29
5	Kab. Sleman			22	6	27,27	98	51	52,04	343	229	66,76
6	Provinsi	1	-	30	6	20,00	140	58	41,43	323	220	68,11
Jumlah		1	-	139	28	20,14	700	245	35,00	1.982	1.269	64,03

Sumber : BPPM DIY, diolah

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK

perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, 2009-2012

Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			
	Agust-09	Agust-10	Agust-11	Agust-12
Angkatan Kerja Perempuan	864.071	848.745	830.449	867.492
Perempuan Usia Kerja	1.435.659	1.383.524	1.393.149	1.404.126
Persentase	60,19	61,35	59,61	61,78

Sumber : Pusdatinaker Kemenakertrans, diolah

e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Menunjukkan upaya pemerintah menangani pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap kasus yang diadukan ke unit-unit pelayanan tindak kekerasan. Tabel berikut menunjukkan persentase jumlah pengaduan yang ditangani di unit-unit pelayanan pengaduan di DIY tahun 2010-2011 :

Tabel 2.85
Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, 2010-2011

Uraian	2010			2011		
	Perempuan	Anak	Total	Perempuan	Anak	Total
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	25	25	27	27	27
Jumlah Pengaduan yang tertangani	873	329	1305	596	310	999
Jumlah Pengaduan	929	360	1305	647	343	999
Persentase (%)	94	91	100	92	90	100

Sumber : BPPM DIY

Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 2%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU PKDRT bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan.

Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak mengalami penurunan sekitar 1%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU Perlindungan Anak bahwa anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan hak-hak dasar anak.

f. Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah.

Bila dilihat lebih jauh pada faktor penyebabnya, diketahui bahwa adanya budaya menikah muda, *married by accident*, atau karena faktor ekonomi. Bila fenomena ini tetap terjadi tanpa ada campur tangan kebijakan pemerintah, dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi. Mulai dari ledakan penduduk, penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kriminalitas sampai timbulnya masalah ketahanan pangan.

Tabel 2.86
Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY

No	Wilayah	2009		2010		2011	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L	P	L
1	Kota Yogyakarta	15	18	24	27	14	32
2	Kabupaten Bantul	31	56	93	52	42	105
3	Kab. Kulon Progo	21	33	19	44	30	26
4	Kab. Gunungkidul	19	19	42	36	59	68
5	Kab. Sleman	189	17	22	28	25	46
	DIY	275	143	200	187	170	277

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

2.3.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

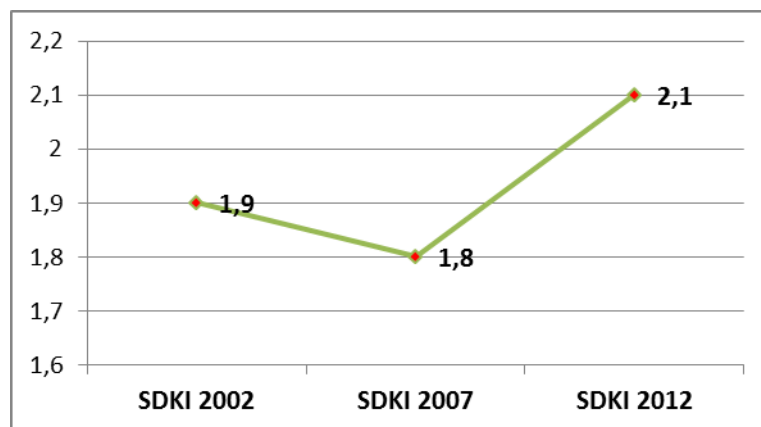
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa diperlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pembangunan kependudukan erat kaitanya dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah peningkatan jumlah Total Fertility Rate (TFR), masih tingginya unmet need, masalah kesehatan reproduksi, perkembangan jumlah penduduk yang melebihi proyeksi, kepesertaan KB pria masih rendah.

a. Total Fertility Rate (TFR)

TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun.

Perkembangan TFR DIY berdasarkan SDKI 2012 sebesar 2,1 naik dari SDKI 2007 yang sebesar 1,8. Peningkatan TFR menjadi 2,1 ini perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan jumlah anak dalam sebuah keluarga akan menyebabkan permasalahan kependudukan di masa datang terkait kualitas penduduk, permasalahan lahan, permasalahan pangan dan sebagainya. Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total *fertility rate* (TFR) terendah di Indonesia, tetapi melihat tren yang ada terjadi lonjakan dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi TFR antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Salah satu sebabnya adalah, masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa mempunyai dua anak terlalu sedikit. Berikut adalah perkembangan TFR DIY :



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2.37
Perkembangan TFR DIY

b. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB DIY pada 2013 tercatat sebanyak 441.981 peserta meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 438.788 peserta dengan rasio terhadap jumlah pasangan usia subur di tahun 2013 sebesar 79,87

Tabel 2.87
Rasio Akseptor KB

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Peserta KB	432.024	430.231	432.989	438.788	441.981
Jumlah Pasangan Usia Subur	549.313	544.057	549.894	552.422	553.395
Rasio Jumlah	78,65	79,08	78,74	79,43	79,87

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, diolah

c. *Unmet Need*

Indikator *unmet need* persentase wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Beberapa alasan yang menyebabkan wanita usia subur tidak ingin mempunyai anak lagi tetapi tidak melakukan KB antara lain : motivasi yang lemah dalam mengatur fertilitas, adanya kekhawatiran perempuan usia subur terhadap kegagalan kontrasepsi, dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Perkembangan *Unmet Need* DIY dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 9,67 menjadi 8,30 di tahun 2013. Berdasarkan data Riskesdas 2010, capaian rata-rata nasional *unmet need* adalah sebesar 14% yang berarti capaian DIY sudah lebih baik dari capaian nasional.

Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi semakin mudah.



Sumber : BKKBN Perwakilan DIY

Gambar 2.38
Perkembangan *Unmet Need* DIY, 2010-2013

d. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.88
Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009 - 2011

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun					
		2009		2010		2011	
		Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase
1.	Pra S	174.534	18,35	187.277	20,15	225.823	24,30
2.	KS I	214.083	22,51	208.367	22,42	200.008	21,52
3.	KS II	222.674	23,41	198.237	21,33	146.038	15,72
4.	KS III	281.481	29,60	281.909	30,33	302.792	32,59
5.	KS III Plus	58.230	6,12	53.665	5,77	54.575	5,87
	Jumlah KK	951.002		929.455		929.236	

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2009–2011 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

e. Lembaga Bina Keluarga

Lembaga Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program Bina Keluarga merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran keluarga (Bapak/Ibu dan anggota keluarga lain) untuk membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua perlu ditingkatkan. Keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. BKB, BKR, BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.89
Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011 - 2012

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
Tahun	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	95	28	102	28	35	13	66	14	48	14	80	80
Bantul	260	35	310	55	52	19	79	23	24	19	57	23
Kulonprogo	387	24	387	12	92	11	91	12	89	13	88	12
Gunung Kidul	459	39	446	23	81	15	84	18	114	19	119	106
Sleman	150	37	204	54	90	17	143	34	142	18	171	27
Jumlah	1351	163	1449	172	350	75	463	101	417	83	515	248

Sumber Data : BPPM DIY diolah

*) P= Percontohan.

2.3.1.13 Urusan Sosial

1. Panti Sosial

Untuk mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Sosial melakukan berbagai program berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia. Selain itu mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial, meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial serta mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana Unit Kesejahteraan Sosial.

Panti-panti sosial yang dikelola Dinas Sosial merupakan implementasi nyata dari hal di atas. Terdiri dari panti untuk balita, anak, remaja dan usia lanjut terlantar, panti anak jalanan, panti penyandang cacat, panti untuk gelandangan dan pengemis, panti bagi mantan wanita tuna susila, dan panti bagi mantan pengguna narkoba dikelola secara serius untuk mengatasi permasalahan sosial di DIY.

Layanan yang diberikan di panti-panti sosial ini meliputi perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan dan latihan keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan motivasi hingga pembinaan awal rujukan. Berikut ini panti sosial milik pemerintah Daerah DIY.

1. Panti Sosial Asuhan Anak
2. Panti Sosial Bina Remaja
3. Panti Sosial Tresna Wreda
4. Panti Sosial Pamardi Putra
5. Panti Sosial Karya Wanita
6. Panti Sosial Bina Karya
7. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

Lebih detail tentang keberadaan panti sosial milik pemerintah dan Swasta di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.90
Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah dan Swasta menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2013

NO	KABUPATEN/KOTA	ANAK TERLANTAR			LANJUT USIA			PENYANDANG CACAT			TUNA SUSILA			NAPZA		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	KOTA YOGYAKARTA	10	10	9	3	3	2	3	3	3	5	5				
2	GUNUNGKIDUL	5	5	5				8	8	8						
3	KULONPROGO	15	15	17	1	1	1	2	2	1				1	1	1
4	BANTUL	14	14	15	2	2	0	3	3	4	1	1	1			
5	SLEMAN	21	21	26	1	1	0	9	9	10	3	3	2	4	5	4
	JUMLAH	65	65	72	7	7	3	25	25	26	9	9	3	5	6	5

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel tersebut menunjukkan keberadaan panti sosial yang ada di masing-masing kabupaten/kota di DIY dan berdasarkan layanan yang dilakukan. Keberadaan panti tersebut menunjukkan komitmen terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial kemasyarakatan/swasta. Keberadaan panti anak terlantar dan penyandang cacat mengalami peningkatan, sedangkan panti untuk lanjut usia, tuna susila dan korban NAPZA mengalami penurunan.

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang arena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Upaya-upaya dalam penanganan PMKS telah diberikan melalui berbagai bentuk. Namun demikian tentunya tidak serta-merta bisa menjangkau kepada seluruh PMKS karena berbagai keterbatasan. Tabel di bawah ini menunjukkan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap PMKS di DIY. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial memang masih terbatas.

Tabel 2.91
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Tahun 2009-2013

Tahun	PMKS yang seharusnya menerima bantuan	PMKS yang diberikan bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2009	416.858	13.192	3,16%
2010	403.666	8.023	1,98%
2011	377.819	9.304	2,46%
2012	497.080	41.646	8,37%
2013 *)	497.080	7.349	1,47%

Keterangan : *) data sementara

Sumber : Data Pembangunan Daerah DIY

Penanganan PMKS merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan upaya-upaya penanganan terus-menerus dan terpadu. Masalah ini tidak berdiri sendiri, dibutuhkan strategi yang sistematis dan terarah untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Tabel 2.92
perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY
Tahun 2012-2013

No	Jenis PMKS	Tahun		Jumlah Naik/Turun	Kondisi
		2012	2013		
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	-126	Menurun
2	Anak Terlantar	26.165	26.149	-16	Menurun
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	-183	Menurun
4	Anak Jalanan	497	212	-285	Menurun
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.910	3.858	-52	Menurun
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	-123	Menurun
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	-202	Menurun
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.698	-501	Menurun
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.158	-1385	Menurun
10	Tuna Susila	166	158	-8	Menurun
11	Gelandangan	161	121	-40	Menurun
12	Pengemis	199	216	17	Meningkat
13	Pemulung	116	126	10	Meningkat
14	Kelompok Minoritas	733	216	-517	Menurun
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3.658	4.168	510	Meningkat
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	389	Meningkat
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.470	-157	Menurun
18	Korban Trafficking	9	5	-4	Menurun
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	-255	Menurun
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	-468	Menurun
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	-2.094	Menurun
22	Korban Bencana Sosial	16	158	142	Meningkat
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.057	-280	Menurun
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	3.395	39	Meningkat
25	Keluarga Fakir Miskin	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)	0	Tetap (karena belum ada updating data PPLS)

Sumber : Dinas Sosial DIY (Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2013)

Dari data tersebut terdapat 18 jenis PMKS mengalami penurunan serta 6 jenis PMKS mengalami kenaikan jumlah populasinya baik secara signifikan maupun tidak. Penurunan jumlah pada beberapa jenis PMKS secara langsung

atau tidak langsung disebabkan berhasilnya intervensi melalui pelayanan sosial oleh berbagai pihak, menurunnya kejadian bencana alam serta meningkatnya keberdayaan para PMKS. Sedangkan meningkatnya 6 jenis PMKS disebabkan dari berbagai hal seperti pendatang musiman yang kemudian menetap di DIY menjadi PMKS seperti pengemis dan pemulung, meningkatnya penularan kasus HIV/AIDS akibat perilaku seks beresiko dan penggunaan alat suntik tidak steril, serta permasalahan keluarga akibat problem ekonomi.

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sumber dan potensi yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan sebagai usaha kesejahteraan sosial. PSKS berperan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu PSKS juga berperan membantu pelaksanaan program-program pemerintah.

Tabel 2.93
Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, 2008-2013

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	n/a	n/a	n/a	n/a	41	37
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	213	78	78	134	121	4572
3	Taruna Siaga Bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	873	505
4	LKS / Orsos	53	10	10	88	83	354
5	Karang Taruna	63	20	10	102	85	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	n/a	n/a	n/a	11	12	15
7	Keluarga Pioner	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	7	5	n/a	23	25	87
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS),	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Penyuluh Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	n/a	n/a	n/a	n/a	78	78
12	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	n/a	130	43	135	100	45

Keterangan : n/a (belum ada pendataan terhadap jenis PSKS tersebut)

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2013

Tabel di atas menunjukkan secara umum kuantitas PSKS mengalami peningkatan. Peningkatan PSKS disebabkan peran kelompok masyarakat semakin besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga dipengaruhi peran pemerintah dalam pembinaan PSKS semakin optimal.

Untuk meningkatkan kinerja PSKS, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pemberian stimulan kelembagaan, manajemen organisasi, penguatan jaringan kemitraan dunia usaha. Dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas PSKS di DIY diharapkan mampu untuk membantu mengatasi problem sosial dan membantu peningkatan kesejahteraan di DIY.

2.3.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

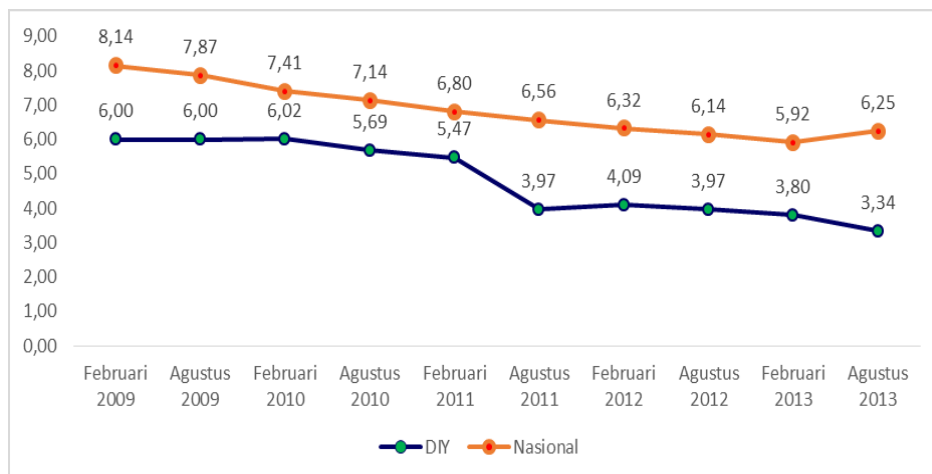
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Di D.I. Yogyakarta TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Pada Agustus 2013, TPT masing-masing sebesar 3,69 persen untuk laki-laki dan 2,91 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 3,34 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran. Fluktuasi TPT di DIY dari tahun 2009 ke 2013 berada dalam kisaran 3-6%, kecenderungan mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 TPT sekitar 6,00%, pada Agustus 2010 sebesar 5,69%, dan pada Agustus 2011 dan 2012 sebesar 3,97%.

Dan pada Agustus 2013 sebesar 3,34% Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional 6,25%.

Tingkat pengangguran terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24. TPT usia muda pada Februari 2013 sekitar 13,5 persen, atau lebih dari 3 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada Februari 2013 pada kelompok umur 15-99, 35-39 dan 40-44 tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur lainnya lebih tinggi tingkat pengangguran terbuka laki-laki.



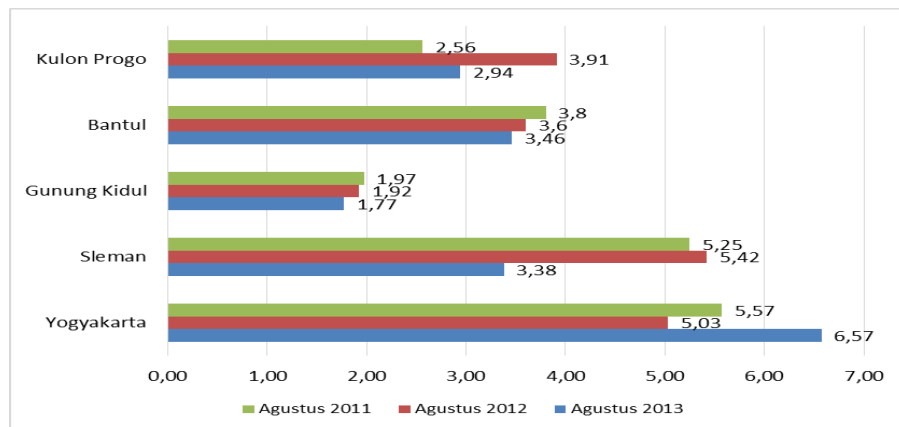
Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional,
2009–2013 (%)

Pada Agustus 2013 TPT di daerah perkotaan DIY sekitar 4,04%, sementara di perdesaan hanya 2,12%. TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di perdesaan di DIY. Tingginya TPT di perkotaan dipengaruhi oleh beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sementara di perdesaan umumnya didominasi pertanian dengan daya tampung yang terbatas. Angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan pindah atau mondok di perkotaan, sehingga pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di

antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (nglajo/commute/ulang-alik/ pulang-pergi) ke perkotaan.

TPT di kabupaten/kota mengalami variasi perkembangan pada periode Agustus 2012 ke Agustus 2013. Pola TPT antar kabupaten/kota juga terdapat perubahan, dimana nilai TPT di Kota Yogyakarta menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY (6,57%) disusul Kabupaten Bantul (3,46%), Kabupaten Sleman (3,38%) dan Kabupaten Kulonprogo (2,94%). TPT terendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul (1,77%)



Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.40
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di DIY(%), 2011-2013

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja untuk memproduksi barang dan jasa, semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Pada Agustus 2013 TPAK D.I. Yogyakarta 68,89 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas 69 orang adalah angkatan kerja.

TPAK berdasarkan kelompok umur secara umum juga mengikuti pola umum struktur tenaga kerja, yaitu: rendah pada usia 15-19 tahun, kemudian meningkat pada usia lebih tua, mencapai puncak pada usia antara 40-49 tahun, dan menurun kembali setelah melewati usia 55 tahun. TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk

pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja.

TPAK perempuan pada hampir semua kelompok umur baik di pedesaan maupun perkotaan cenderung lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif tinggi pada tingkat pendidikan SD dan perguruan tinggi. Pola umum yang dapat dipetik yaitu pada pendidikan sangat rendah apapun pekerjaan diterima, sehingga TPAK-nya relatif tinggi, sementara pada kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTP/SLA mulai memilih pekerjaan sehingga TPAK-nya lebih rendah. Pada tingkat pendidikan yang relatif tinggi (perguruan tinggi) TPAK-nya tampak tinggi, meskipun pekerjaan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.

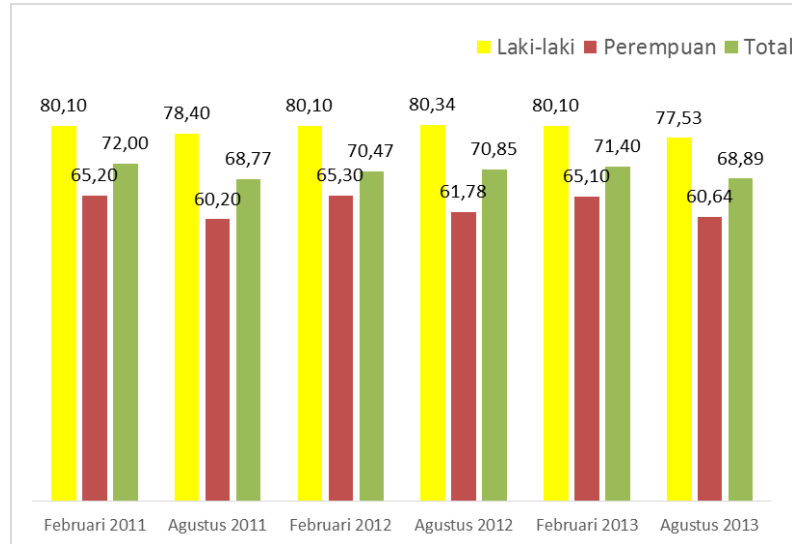
Indikasi tersebut terlihat pada mekanisme push down, misalnya pada penerimaan PNS terdapat banyak pelamar yang menggunakan ijazah pada tingkat pendidikan yang lebih rendah dari yang dimilikinya. Akibatnya lulusan SLTA menjadi tersisih. Pola ini sepenuhnya diikuti oleh angkatan kerja perempuan maupun laki-laki.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan di perkotaan maupun di pedesaan juga menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu menonjol pada pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, meskipun di pedesaan relatif menonjol di tingkat pendidikan rendah. Di daerah pedesaan, tingkat partisipasi angkatan kerja mereka yang mempunyai tingkat pendidikan SD 77,52 persen. Lain halnya TPAK mereka yang lulusan universitas sangat menonjol baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK DIY pada Agustus 2013 sekitar 68,89%, turun sekitar 1,96 poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2012 (70,85%) atau turun sekitar 0,38 poin dibanding Februari 2013 (69,27%).

Pola perkembangan TPAK pada periode 2010-2013 juga menunjukkan pola yang menarik. TPAK tidak banyak berubah tetapi terdapat kecenderungan pada bulan Agustus TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari, meskipun Agustus 2012 dan Agustus 2013 yang

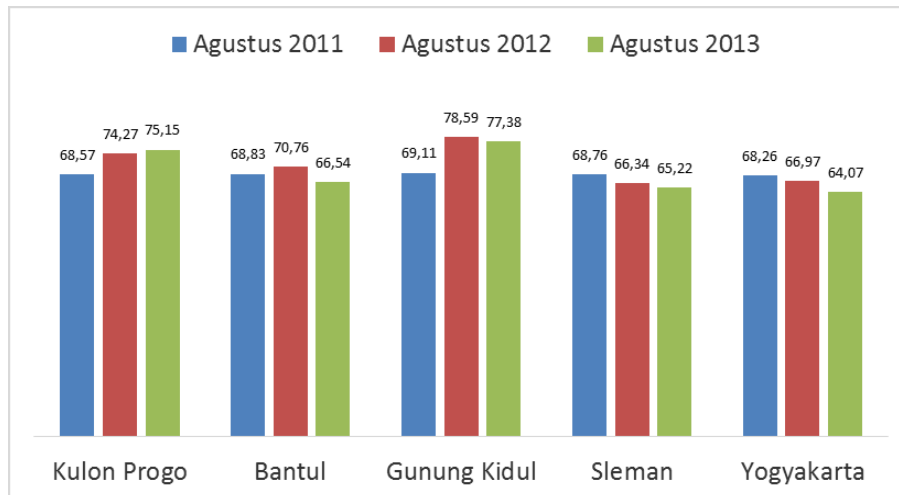
perubahannya tidak begitu tampak dibandingkan dengan Februari 2012 dan Februari 2013. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2013 mencapai sekitar 77,53%, sementara TPAK perempuan sebesar 60,64%.



Sumber: BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.41
Perkembangan TPAK di DIY

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami penurunan TPAK pada Agustus 2013, hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,88 poin. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul 77,38 persen, kemudian Kabupaten Kulon Progo 75,15 persen, Kabupaten Bantul 66,54 persen, Kabupaten Sleman 65,22 dan terendah Kota Yogyakarta 64,07 persen.



Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.42
TPAK menurut Kabupaten/Kota di DIY,
2011-2013 (Agustus)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama kurun waktu 2009-2013 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunjukkan TPAK sebesar 70,23% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 69,76%, angka ini menurun kembali di tahun 2011 menjadi 68,77%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 70,85% dan pada tahun 2013 TPAK mengalami penurunan menjadi 68,89%.

2.3.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM mendapatkan perhatian dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Peningkatan peran Koperasi dalam perekonomian DY ditunjukan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima tahun) terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Sementara itu, perkembangan unit usaha di DIY yang didominasi skala kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.176 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2012. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 79,74% dari total koperasi di DIY. Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 pertumbuhan

volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 0,7 % dari Rp. 2.304.127 Juta menjadi Rp. 2.320.617 Juta

Tabel 2.94
Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2008-2012

	2009	2010	2011	2012	2013
Koperasi Aktif	1.518	1.926	1.981	2.090	2.176
Koperasi Tidak aktif	721	484	485	427	499
Koperasi Beku					58
Modal Sendiri (Rp Juta)	437.233	692.622	929.556	1.015.396	1.440.948
Modal Luar (Rp Juta)	474.820	415.550	513.936	572.156	572.159
Volume Usaha (Rp Juta)	1.695.971	2.296.146	2.304.123	2.304.127	2.320.617

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Jumlah UMKM pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 1.215 UKM atau sebesar 0.6 % dibanding dengan tahun 2012. Dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY didominasi oleh usaha Perdagangan dan Industri Pertanian. Komposisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013, jenis usaha perdagangan menguasai sebesar 28,56% dari total UKM di DIY dan diikuti oleh industri pertanian sebesar 27,18%.

Tabel 2.95
Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2009-2013

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390
	Jumlah	164.847	182.232	201.975	203.995	205.210

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 81.407 wirausaha baru. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

Tabel 2.96
Perkembangan Wirausaha Baru Kab / Kota Tahun 2009 - 2013

No.	Kab / Kota	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kota Yogyakarta	4.552	4.561	4.590	4.598	4.643	22.946
2	Sleman	2.534	2.541	2.587	2.592	2.608	12.862
3	Bantul	4.433	4.439	4.463	4.468	4.479	22.282
4	Kulon Progo	1.550	1.552	1.565	1.571	1.578	7.816
5	Gunung Kidul	3.090	3.096	3.099	3.105	3.113	15.501
	Jumlah	16.159	16.189	16.304	16.334	16.421	81.407

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

2.3.1.16 Urusan Penanaman Modal

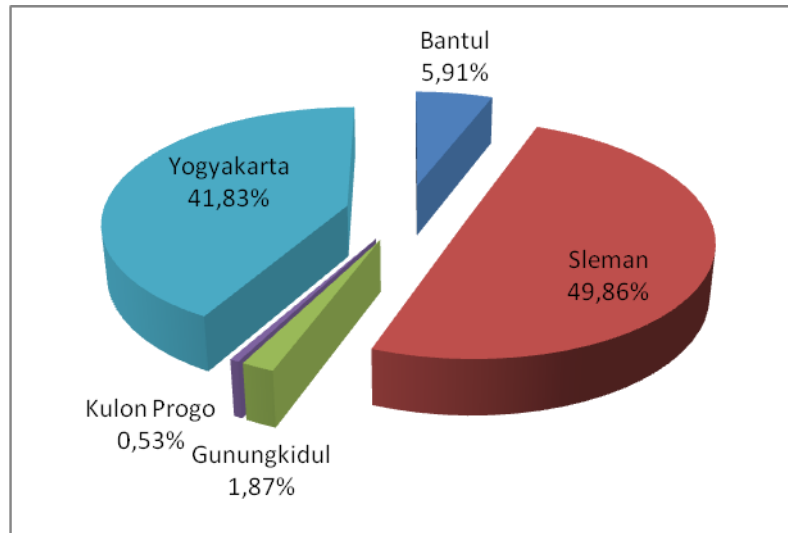
Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dibutuhkan investasi di DIY. Keterlibatan pelaku usaha sangat besar dalam upaya penumbuhan investasi. Meskipun DIY terbuka terhadap investasi baik dari dalam maupun luar negeri, tetap investasi diutamakan untuk industri-industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY sebesar 14,34%. Total investasi di DIY tahun 2013 adalah Rp. 8.067.770.134.638,- yang terdiri dari PMDN Rp 2.864.654.491.755 dan PMA sebesar Rp5.203.115.642.883,-. Rincian Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 239 perusahaan, yang terdiri dari 115 PMA dan 124 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 40.178 TKI dan 166 TKA.

Tabel 2.97
Perkembangan Investasi di DIY

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi	Pertumbuhan Investasi
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	4,00
2010	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.970.827.244	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	40,22
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	9,85
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	14,34

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengangkat potensi unggulan di tiga kabupaten tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial.



Gambar 2.43

Presentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per kabupaten/Kota

2.3.1.17 Urusan Kebudayaan

Visi DIY sesuai RPJPD 2005-2025 (Perda Nomor 2 tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera’.

Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Lima pilar utama dalam urusan kebudayaan menyangkut pembentukan karakter bangsa (jatidiri bangsa); peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni, budaya daerah, kesejarahan, permuseuman; pengelolaan cagar budaya yang

optimal; regenerasi SDM kebudayaan; dan penataan lingkungan yang ramah budaya, sadar budaya dan kondusif untuk kreatif dan inovasi.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara adalah mewujudkan:

1. Kelompok kesenian yang maju, mandiri, mempunyai jaringan internasional;
2. Cagar budaya yang lestari dan berdaya guna;
3. Desa budaya yang maju, dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya;
4. Museum-museum berstandar internasional;
5. Peristiwa budaya yang bertaraf internasional;
6. Dokumen dan karya seni klasik serta tradisi yang lestari, mampu memberikan arah kehidupan masyarakat karena kandungan nilai-nilai budi pekerti luhur yang ada di dalamnya;
7. Ruang seni budaya yang representatif di mana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya serta penghormatan dan pemanfaatan sejarah lokal DIY oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Isu strategis dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan desa budaya dan penyiapan Heritage City. Desa budaya baik dalam tahap embrional maupun berkembang, diharapkan dengan pembinaan dan pendampingan dapat menjadi desa yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya. Sedangkan desa maupun kantong budaya yang potensial menjadi desa budaya, dibina dan didorong agar bisa menjadi embrio desa budaya, dan nantinya juga berdiri menjadi desa budaya yang maju.

Heritage City diarahkan dalam upaya penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk menjamin kelestarian eksistensi kawasan cagar budaya. Pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya dalam berbagai sektor kepentingan masyarakat hendaknya dapat berjalan sinergis dan suportif, sehingga kelangsungan kelestarian cagar budaya menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Pembangunan kebudayaan di DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan DIY dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (fourth

wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY.

Pembangunan kebudayaan di DIY yang dilakukan bersama stakeholder terkait dalam kurun waktu 2010-2014 dilakukan dengan menyusun program program/kegiatan untuk memperkuat ketahanan budaya dan mempertahankan budaya lokal yang ada serta memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembinaan sampai pada aktivitas pendukungnya. Program yang dilaksanakan tersebut adalah: Program pengembangan nilai budaya; program pengelolaan kekayaan budaya; program pengelolaan keragaman budaya; program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.

2.3.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa indikator dapat menggambarkan aspek pelayanan umum pada urusan kepemudaan dan olahraga. Jumlah klub olahraga meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Adapun gedung olahraga dan organisasi pemuda di DIY dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan jumlahnya. Lebih lanjut untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga cenderung flutuatif jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tabel 2.98
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah klub olahraga	50	50	51	51	50
2	Jumlah gedung olahraga	4	5	5	5	5
3	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35	35	35
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	na	440	437	440	440
5	Jumlah kegiatan olahraga	50	50	51	51	50

2.3.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam

interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2013 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggemblirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (71,67 dari rerata 65,48). Lebih detail, capaian kebebasan sipil (87,22 dari rerata nasional 80,79), capaian hak-hak politik (52,35 dari rerata nasional 47,54) dan lembaga demokratis (82,81 dari rerata nasional 74,72).

Namun demikian masih ada beberapa tantangan demokrasi di DIY, karena terdapat capaian beberapa indikator yang masih di bawah rerata nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi barometer toleransi masih dihadapkan dengan masalah kekerasan horizontal yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, sehingga menghambat kebebasan sipil baik dalam berserikat dan berkumpul maupun kebebasan sipil berkeyakinan.

Kelompok-kelompok 'minority within' atau yang memiliki ideologi yang berbeda seringkali sangat rentan mengalami kekerasan fisik. Ironisnya, diskriminasi dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya juga masih mewarnai proses politik dan sosial keseharian baik dalam bentuk tulisan maupun pernyataan. Sedangkan dalam capaian hak-hak politik, aksesibilitas, khususnya fasilitas bagi kelompok difabel untuk mengekspresikan hak politik mereka masih menyisakan persoalan. Hal ini ditambah oleh administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang buruk.

Kinerja lembaga demokratis di DIY juga menyisakan beberapa catatan. Komitmen penyelenggara pemerintahan di DIY terhadap pemenuhan hak kesehatan warga masih tidak cukup kuat bila dilihat dari alokasi anggaran kesehatan di DIY yang masih di bawah rerata nasional. Demikian juga dengan kinerja lembaga DPRD di DIY. Lembaga yang mestinya menjadi representasi warga untuk mengartikulasikan kepentingan ini tidak cukup signifikan dalam memberikan rekomendasi secara kelembagaan kepada eksekutif. Sementara itu, aksi afirmasi keterwakilan perempuan di DPRD di DIY juga di bawah rerata nasional.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi penting untuk direspon tata pemerintahan lokal di DIY. Sebab tatanan politik yang demokratis pada dasarnya sangat dasar dan penting namun tidak akan punya makna berarti bila tidak memberikan kontribusi yang efektif bagi kesejahteraan, termasuk di dalamnya keamanan, pemenuhan hak-hak dasar, tidak adanya diskriminasi dsb.

Oleh karena itu ada beberapa agenda kebijakan yang penting untuk dikembangkan ke depan di wilayah DIY. Ke depan Pemda perlu memfasilitasi ruang-ruang interaksi dan komunikasi yang lebih intens antar komunitas sebagai 'melting pot' bagi berbagai kelompok sosial dengan latar belakang beragam, gesekan sosial yang tidak jarang berakhir pada kekerasan fisik sering terjadi. Dibutuhkan adanya upaya untuk mendorong komunikasi dan dialog yang lebih intens melalui forum komunikasi warga keseharian yang sebenarnya sudah mengakar kuat di DIY. Ruang-ruang publik (public space) yang memungkinkan interaksi lintas identitas semestinya semakin banyak dikembangkan, seperti taman kota, pengembangan Malioboro sebagai pedestrian, dsb. Sementara itu, pembentukan enclave-enclave sosial yang mempertegas identitas, seperti perumahan khusus bagi identitas tertentu, asrama mahasiswa, harus dipastikan tidak menjadi sumber "pembatas sosial" baru. Upaya-upaya mewujudkan keterlindungan warga berbasis komunitas (community policing), sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini dan mediasi konflik sosial juga penting untuk terus dirawat agar kohesi sosial terus-menerus bisa dijaga.

Sebagai konsekuensi predikat miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan preemptif, preventif, persuasif dan represif yang lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

2.3.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP nomor 38 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Dengan demikian perlu adanya penjelasan dan batasan ketegasan urusan lintas kabupaten/kota yang perlu diharmonisasikan dengan pemerintahan kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 pasal 9 dan 10 vide bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan urusan pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Namun dalam pelaksanaan NSPK masing-masing Kementerian/ Lembaga Non Departemen masih banyak yang tumpang tindih.

Pasal 12 UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan kewenangan disertai dengan unsur pendukung yang meliputi personil, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumen, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun hal pelaksanaannya masih banyak permasalahan berkaitan dengan penyerahan P3D tersebut yang belum diselesaikan.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemda DIY telah mendapatkan beberapa penilai prestasi. Diantaranya dalam riset IGI (Indonesian Government Index) DIY menempati peringkat pertama pada tahun 2012 dengan nilai 6,80 unggul dari 32 provinsi lainnya di Indonesia. Nilai index DIY yang berada di atas rata-rata nasional, secara konsisten juga terjadi pada masing-masing arena yaitu di Arena Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Di Arena Pemerintah nilai indeks tersebut adalah 6,52, lebih tinggi di banding nilai rata-rata nasional yaitu 5,28. Untuk Arena Birokrasi, nilai indeksnya adalah 7,46, berada di atas nilai rata-rata nasional yaitu 5,68. Sedangkan untuk Arena Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi secara berturut-turut adalah 6,72 dan 6,12. Keduanya juga lebih besar dibanding nilai indeks rata-rata nasional yaitu 6,33 dan 5,72.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7 Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, yakni:

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen

pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem reward and punishment. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan penggunaan mesin presensi elektronik bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah DIY. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS dan selanjutnya diberikan reward bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. Penilaian kinerja PNS juga mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu PNS. Formulasi penilaian kinerja PNS akan dikembangkan dari tahun ke tahun. Reward juga diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan tali asih bagi PNS dan PTT yang memasuki masa purna tugas. Punishment diterapkan bagi PNS dengan penegakan peraturan perUndang-Undangan bagi PNS.

Pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Upaya reformasi birokrasi yang selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan, semakin menemukan relevansinya dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi undang-undang dimaksud berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Amanat tujuan keistimewaan dan atribusi tambahan kewenangan keistimewaan yang ada di dalamnya menjadi kekuatan pendorong (driving force) bagi jajaran Pemerintah Daerah DIY untuk menata diri semakin lebih baik lagi.

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah digelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se-Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY digelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi :

- 1) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
- 2) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
- 3) Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
- 4) Jajaran POLDA;
- 5) Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah DIY.

2.3.1.21 Urusan Ketahanan Pangan

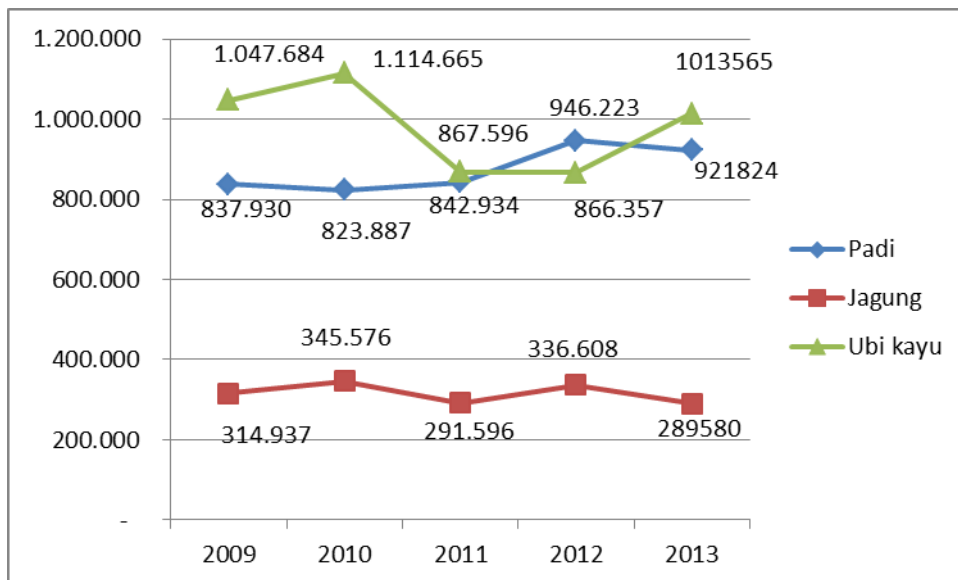
Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan,

distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1. Ketersediaan Pangan

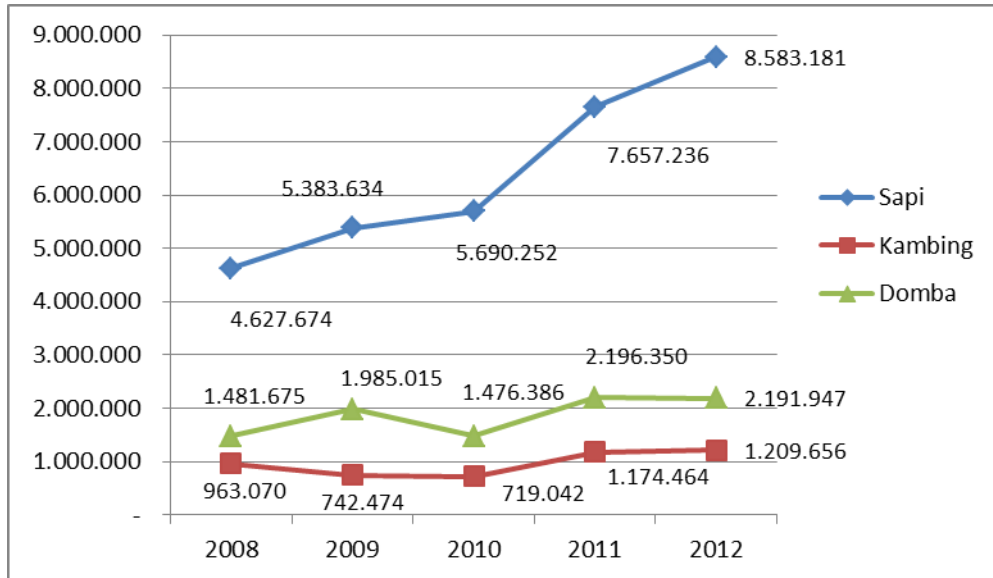
Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada tahun 2012 diantaranya dikarenakan adanya penambahan lahan baru di Sleman. Namun, akibat kemarau basah, produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2013. Sementara produksi ubi kayu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksinya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

Gambar 2.44
Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu Tahun 2009-2013

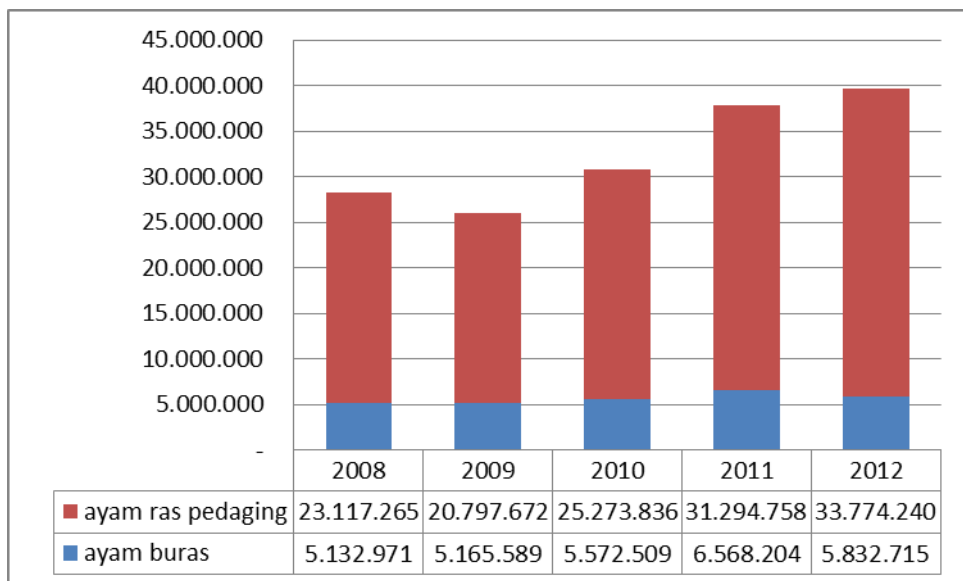
Produksi pangan hewani untuk komoditas daging sapi, kambing, dan domba mengalami peningkatan. Peningkatan produksi daging ini sejalan dengan populasi sapi potong, kambing, dan domba yang cenderung mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

Gambar 2.45
Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba Tahun 2008-2012

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

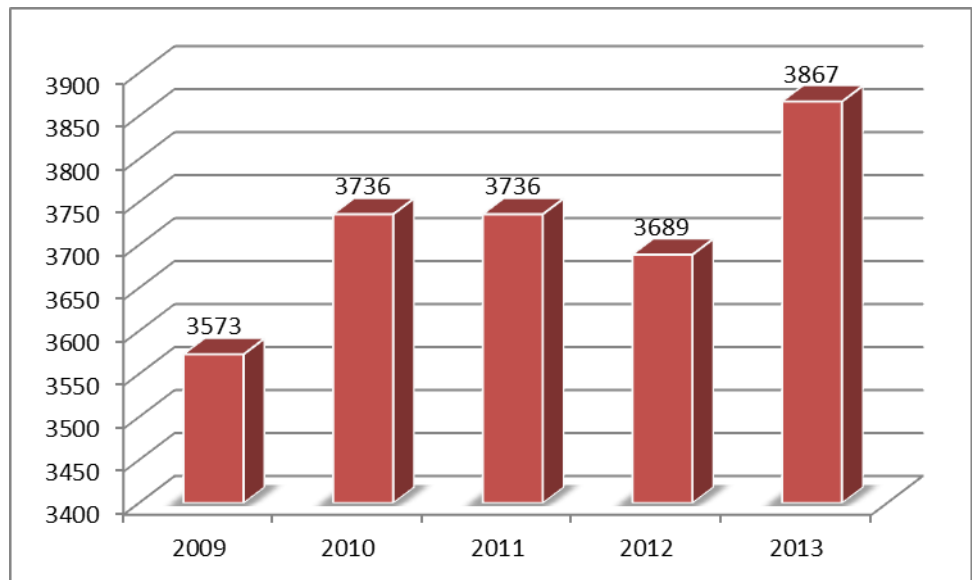
Gambar 2.46
Produksi Daging Ayam Tahun 2008-2012

Tabel 2.99
Produksi Telur Unggas DIY Tahun 2008-2012

Tahun	Produksi Telur (butir)			Jumlah
	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	
2008	50.154.114	361.841.526	36.497.767	448.493.407
2009	50.035.025	397.725.963	36.786.074	484.547.062
2010	49.332.909	17.850.425.555	41.029.816	17.940.788.280
2011	50.819.481	386.696.413	43.594.957	481.110.851
2012	51.875.725	393.557.022	43.632.242	489.064.988

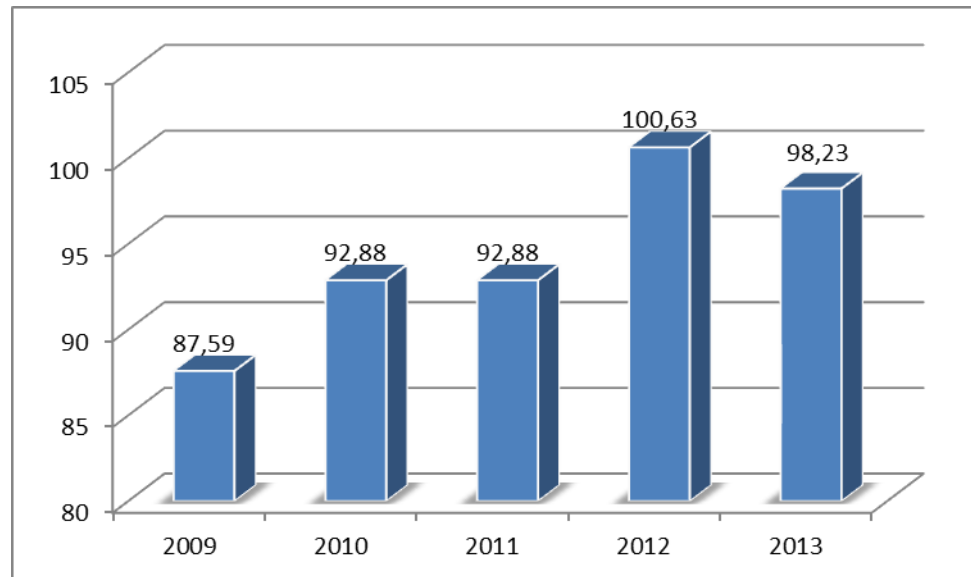
Sumber: BPS DIY

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2013 sebesar 3.867 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 98,23 gram/kapita/hari.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

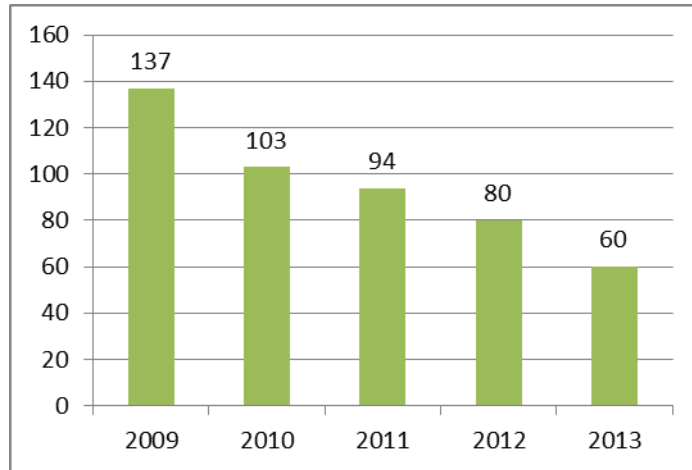
Gambar 2.47
Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.48
Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013

Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 137 desa pada tahun 2009 menjadi 60 desa pada tahun 2013. Jumlah desa rawan pangan terbanyak berada di Kulon Progo sejumlah 27 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber: BPS DIY

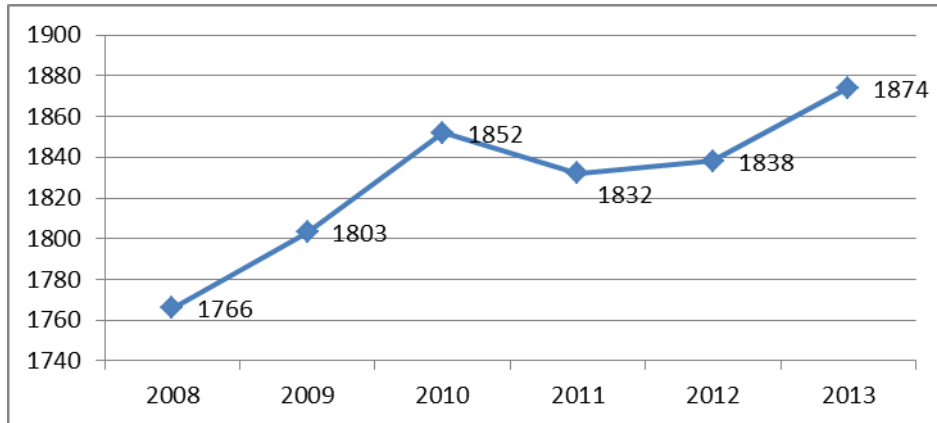
Gambar 2.49
Desa Rawan Pangan DIY Tahun 2009-2013

2. Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

3. Konsumsi dan Pengawasan Pangan

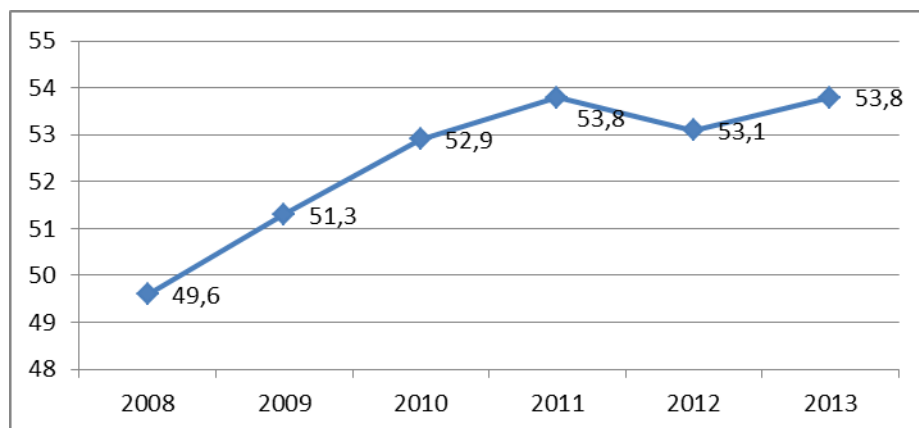
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2013 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.874 Kkal/kapita/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.50
Konsumsi Energi DIY, 2008-2013 (Kkal/kapita/hari)

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2013 mencapai sebesar 53,8 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah melampaui angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.

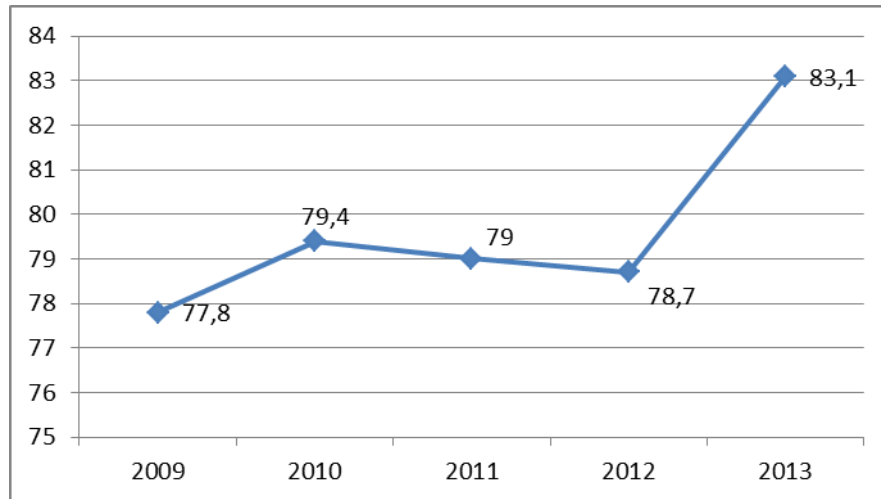


Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.51
Konsumsi Protein DIY, 2008-2013 (gram/kapita/hari)

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2013 adalah 83,1. Hal ini

berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.52
PPH DIY, 2009-2013 (gram/kapita/hari)

2.3.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Seluruh desa/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011 :

Tabel 2.100
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di
Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
	Total	393	45	6	444

Sumber : BPPM DIY

Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa. Tabel berikut menunjukkan jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2012 :

Tabel 2.101
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kab/Kota	Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif				Jumlah
	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Lumbung Pangan	Pasar Desa	Badan Kredit Desa	
Kota Yogyakarta	45	44	31	0	120
Kab.Bantul	75	48	55	10	160
Kab. Kulon Progo	88	72	41	20	232
Kab. Gunungkidul	144	77	138	15	304
Kab. Sleman	86	69	43	35	238
Jumlah DIY	438	310	308	80	1.136

Sumber : BPPM DIY

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat deasa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.102
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011

Kabupaten/Kota	2010			2011		
	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%
Kota Yogyakarta	622	449	72,19	622	531	77,73
Kab.Bantul	1.123	518	46,13	1.123	669	59,57
Kab.Kulon Progo	960	670	69,79	961	747	83,11
Kab. Gunungkidul	1.461	1.287	88,09	1.462	1215	74,59
Kab. Sleman	1.504	1.161	77,19	1.511	1127	72,19
Jumlah DIY	5.670	4.085	72,05	5.679	4.289	75,52

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2010 - 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari 449 pos pada tahun 2010 menjadi 531 pos pada tahun berikutnya dengan jumlah persentase lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita.

Begitu pula dengan PKK aktif menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.103
Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY,2011

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab.Bantul	93	93	100
Kab. Kulon Progo	101	101	100
Kab. Gunungkidul	163	163	100
Kab. Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber : BPPM DIY

LSM aktif di DIY setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari Tahun ke Tahun selalu mengalami penambahan dari 1418 (2011) menjadi 1428 (2012).

Tabel 2.104
LSM Aktif DIY Tahun 2011 - 2012

TAHUN	JUMLAH
2011	1418
2012	1428

Sumber : BPPM DIY

Tabel 2.105
Jumlah PMKS Tahun 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	PMKS yang tertangani	Buah	13.192	8.023	9.304	41.646	7.349
2	PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Buah	416.858	403.666	377.819	497.808	497.080
3	PMKS yang diberikan bantuan	Buah	13.192	8.023	9.304	41.646	7.349

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel 2.106
Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Karang taruna	buah	438	438	438	438	438
2.	Tenaga Kessos Masyarakat (TKSM)	buah	78	78	78	78	78
3.	Organisasi Sosial	buah	273	316	316	394	394

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel 2.107
Jumlah LSM DIY, 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	LSM	buah	273	316	316	394	394

Sumber : Dinas Sosial DIY

LPM berprestasi di DIY setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa LPM mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tabel berikut menunjukkan LPM Berprestasi di DIY menurut Kabupaten/Kota di tahun 2012:

Tabel 2.108
LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2012

Kabupaten/Kota	2011		2012	
	Jumlah LPM	Jumlah LPM Berprestasi	Jumlah LPM	Jumlah LPM Berprestasi
Kota Yogyakarta	45	6	45	6
Kab.Bantul	75	12	75	12
Kab. Kulon Progo	88	9	88	9
Kab. Gunungkidul	144	15	144	15
Kab. Sleman	86	8	86	8
DPD & Asosiasi	6		6	
Jumlah DIY	444	50	444	50

Sumber : BPPM DIY

2.3.1.23 Urusan Statistik

Salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah urusan statistik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.

Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakan kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008, Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program pengembangan statistik daerah.

Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam 2 kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk DIY Dalam Angka (DDA), Analisis PDRB DIY, dan Data Perencanaan Pembangunan DIY.

2.3.1.24 Urusan Kearsipan

Fungsi kearsipan adalah menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Masalah utama kearsipan adalah masih digunakannya pengelolaan secara manual dan belum terotomasi. Pada tingkat kelurahan atau kecamatan, pengolahan arsip masih berbasis teknologi informasi. Hal ini tentu akan mengurangi rasa kepuasan masyarakat pada layanan kearsipan. Oleh karena itu perkembangan jumlah perpustakaan dan kearsipan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU No 43 tahun 2007 pasal 8 yaitu Pemerintah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

Pekerjaan kearsipan menjadi suatu kebutuhan dan keharusan yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. Semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. Permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat. Permasalahan pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi milik organisasi besar saja, melainkan juga organisasi kecil, misalny di orgnisasi tingkat pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat yang permintaannya tidak mengenal waktu / jam kerja.

Buruknya pengelolaan arsip di desa akan berdampak pada keterlambatan proses layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa juga perlu memperhatikan pengelolaan arsip untuk menunjang pelayanan publik. Layanan dapat diberikan dengan cepat apabila arsip tertata dengan baik. Setiap Pemerintah Desa pasti mempunyai kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat yang harus

melalui administrasi desa, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte kepemilikan tanah, dll. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah banyak pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan cepat dan rapi. Pekerjaan kearsipan sangat berpengaruh terhadap proses administrasi yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat / publik.

Di lingkungan instansi pemerintahan, lembaga kearsipan bertugas sebagai ujung tombak pengelolaan kearsipan atau lebih khusus lagi lembaga kearsipan adalah instansi laboratorium di bidang pengelolaan kearsipan sehingga banyak sistem kearsipan yang diciptakan dan diujicobakan di lembaga tersebut. Salah satu sistem kearsipan yang saat ini sedang diujicoba di lembaga kearsipan adalah Sistem Pengendalian Naskah Dinas.

Esensi Pengelolaan arsip adalah mengelola informasi, dalam hal ini kompetensinya adalah memanfaatkan arsip dalam perannya sebagai bahan kerja instansi. Mutu informasi yang disajikan sangat mempengaruhi kinerja instansi sehingga kearsipan perlu dilaksanakan dengan baik dan tertib agar menghasilkan mutu informasi yang baik pula. Adapun dalam pelaksanaan kearsipan itu sendiri dituntut untuk mampu mengoptimalkan fungsi seluruh sub sistem, baik sistem sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun anggaran.

Lebih dari 30 tahun sejak Undang-Undang Kearsipan Nomor 7 tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan diundangkan, dapat dikatakan kearsipan belum dikelola secara maksimal. Pada umumnya terdapat kendala internal berkenaan dengan pemahaman yang keliru tentang arsip, yaitu arsip sering dianggap sebagai kertas kumal yang berdebu, serta rendahnya minat di bidang kearsipan ini karena dianggap pekerjaan kearsipan kurang bergengsi. Selain hal tersebut dukungan dan apresiasi pimpinan instansi masih perlu ditingkatkan, karena kondisi ini akan membuat tidak optimalnya pemanfaatan arsip di instansi.

Permasalahan di bidang Kearsipan yang dihadapi dalam pembinaan kearsipan secara prinsip adalah hal yang menyangkut kebijakan pembinaan kearsipan di daerah. Sebenarnya permasalahan yang timbul bukan sekedar masalah bagi arsiparis atau petugas arsip, akan tetapi permasalahan instansi secara menyeluruh. Permasalahan tersebut secara garis besar meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Persepsi. Adanya persepsi bahwa arsip adalah tanggungjawab TU/Sekretaris. Lebih detail lagi adalah tanggung jawab arsiparis atau petugas arsip. Akibatnya

setiap permasalahan kearsipan, selain arsiparis, petugas arsip atau kepala bagian TU/sekretaris tidak merasa memiliki tanggungjawab.

Pengetahuan. Ketidakteragaman pemahaman tentang kearsipan maupun keterbatasan pengetahuan dari berbagai elemen di suatu instansi merupakan hambatan bagi pelaksanaan tata kearsipan.

Kuantitas. Selain kualitas, jumlah arsiparis maupun petugas arsip tidak sebanding dengan volume arsip yang tercipta di instansi.

Kesadaran. Kesadaran akan arti penting arsip yang masih rendah merupakan hambatan utama pelaksanaan tata kearsipan instansi.

b. Sistem

Tingkat kesulitan. Harus diakui bahwa sistem Kartu Kendali memerlukan keterpaduan serta kesamaan persepsi dari berbagai elemen di suatu instansi, dari kepala sampai staf terendah harus memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang digunakan. Hal tersebut selain terkait dengan berbagai aspek, sistem Kartu Kendali juga rumit dibanding sistem agenda.

Kebiasaan. Kebiasaan penggunaan buku agenda menjadi kendala tersendiri. Kebiasaan dan keengganan untuk mengenal sistem kartu kendali mengakibatkan dualisme sistem di instansi.

Pengorganisasian. Penentuan organisasi kearsipan di instansi masih sering tidak jelas. Pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah belum tergambar dengan jelas. Demikian halnya dengan petugas dimasing-masing Unit . Hal ini ditunjang dengan tidak adanya kesadaran untuk menyerahkan arsip pada petugas. Pimpinan maupun staf cenderung menyimpan arsip yang 'merasa' menjadi miliknya.

c. Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana kearsipan merupakan hambatan bagi terlaksananya tata kearsipan yang baik. Selain itu juga tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan, mengakibatkan arsip tidak bisa ditata secara sistematis.

d. Anggaran

Masalah alokasi anggaran di bidang kearsipan menjadi alasan klasik hampir di setiap instansi berkaitan dengan tidak baiknya pengelolaan tata kearsipan instansi. Memang tidak dipungkiri selama ini anggaran kearsipan menjadi satu pos dengan alat tulis kantor, selain tidak bisa menopang bagi pemenuhan sarana kearsipan, kontraprestasi petugas pengelola arsip juga masih terabaikan.

Usaha – usaha Pemerintah dalam menciptakan tertib arsip , tercantum dalam pasal 6 UU nomor 7 Tahun 1971, tertulis bahwa untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan, pemerintah harus : a. Menyelenggarakan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan, b. Melaksanakan pendidikan kader ahli kearsipan, c. Melaksanakan penerangan/control/pengawasan, d. Menyediakan perlengkapan-perengkapan teknis kearsipan, e. Mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah di bidang kearsipan pada umumnya.

Persoalan mendasar yang dihadapi para pengelola kearsipan sebenarnya bukan terletak pada sulitnya menerapkan suatu sistem kearsipan ,tetapi lebih pada bagaimana menyakinkan orang untuk mau menerapkan sistem kearsipan. Realitas tersebut dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar bidang kearsipan yang senantiasa muncul keluhan dan persoalan klasik seputar tidak diperhatikannya bidang kearsipan suatu instansi atau organisasi, pimpinan yang memandang sebelah mata tetapi selalu ingin pelayanan cepat dan tentu saja persoalan tidak sebandingnya insentif yang diperoleh pengelola kearsipan dengan beban kerja yang ditanggungnya.

Problema-problema tersebut tentu menjadi keprihatinan bersama, mengingat kearsipan merupakan bidang yang paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi. Tertib administrasi yang diharapkan akan menjadi sia-sia ketika tidak dimulai dari tertip kearsipannya.

Dipandang dari nilai pentingnya arsip, arsip adalah hal yang penting. Namun demikian harus dipahami bahwa arsip itu menjadi bermanfaat jika tidak diikuti dengan upaya pengelolaan arsip secara baik dan benar serta konsisten memandang dan menempatkan arsip sebagai informasi lebih dari sekedar *by product* dari kegiatan organisasi.

Dalam perkembangannya, perpustakaan dan kearsipan di DIY mengalami berbagai tantangan dan permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 3 menerangkan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, maka perpustakaan dituntut untuk bisa menjalankannya. Begitu pula fungsi kearsipan adalah menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Dua fungsi tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pelayanan publik dalam mewujudkan visi-misi pembangunan di DIY:

Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Hingga saat ini di DIY telah disusun pedoman-pedoman yang terkait dengan kearsipan. Arsip yang terkait dengan pelestarian telah dilaksanakan penarikan baik arsip dinamis inaktif yang ada di SKPD yang bergabung, terlikuidasi maupun berkembang. Kegiatan yang bersentuhan dengan SKPD di Pemerintah DIY akan menjadi arsip dinamis inaktif, sementara arsip statis merupakan arsip permanen yang mempunyai nilai guna tinggi yang harus disimpan dan dilestarikan selamanya.

Pengelolaan arsip statis meliputi: 1). Pengolahan, 2). Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.

Tabel 2.109
Data Pengolahan Arsip Statis BPAD hingga tahun 2013

No	Pengolahan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arsip Tekstual	3211	2842	2641	2540	2800
2	Arsip Foto	286	326	264	474	674
3	Arsip Rekaman	0	0	0	0	0
4	Arsip Audiovisual	0	12	0	0	0

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah dilakukan pengalih tulisan dan bahasa naskah-naskah yang ada di BPAD mencapai hampir 700 koleksi. Masih dibutuhkan kerja keras untuk menalihmediakan koleksi yang ada. Kendala kurangnya sumberdaya manusia yang dapat dikaryakan perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 2.110
Data Alih Media BPAD hingga tahun 2012

No	Pengolahan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Alih Media	6019	7193	7193	9619	11619
2	Alih Tulisan	3507	4295	5048	5799	6549
3	Alih Bahasa	2178	2680	3183	4208	5131

Untuk penanganan arsip dinamis dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) meliputi: penanganan arsip tekstual, penanganan arsip kartografi, serta penanganan arsip inaktif foto.

Tabel 2.111
Data Alih Media BPAD hingga tahun 2012

No	Penanganan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arsip Inaktif Tekstual	29742	35106	40219	45739	50800
2	Arsip Inaktif Kartografi	1568	1568	1568	2153	2691
3	Arsip Inaktif Foto	8855	11658	11758	15587	39308

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan hampir sama. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan atau pustakawan serta tenaga arsiparis yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan arsipasi di seluruh DIY. Sebagai contoh, banyak petugas perpustakaan sekolah dan arsipasi yang masih dirangkap oleh guru mata pelajaran, padahal sesuai dengan standarnya harus dipegang oleh pustakawan murni dari segi akademisnya.

Permasalahan alokasi sumber dana yang tersedia perpustakaan dan kearsipan masih sangat minim. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber anggaran dari pemerintah melalui APBN/APBD. Sementara sumbangan dari pihak lain seperti masyarakat atau sponsor masih sangat terbatas. Masalah berikutnya adalah koleksi bahan pustaka yang masih terbatas jumlah dan macamnya, sehingga terkadang tidak mampu mencukupi kebutuhan pengunjung perpustakaan.

2.3.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Selama kurun waktu 2008-2012, jumlah sambungan telepon di DIY mengalami kenaikan untuk tahun 2008 sebanyak 379.648 menjadi sebanyak 452.565 pada tahun 2011. Sementara itu, kondisi tahun 2012 terdapat 134.849 jumlah sambungan telepon di

DIY mengalami penurunan sebesar 70,20% dibandingkan dengan tahun 2011. Dari jumlah sambungan telepon di DIY tersebut 100% merupakan wireline.

Tabel 2.112
Jumlah Sambungan Telepon di DIY (%), 2007-2012

Jenis	2008	2009	2010	2011	2012
WIRELINE	122.664	122.563	123.081	134.849	139.777
Kulon Progo	2.340	2.372	2.412	2.631	2.700
Bantul	4.134	4.085	4.261	5.940	6.234
Gunungkidul	3.276	3.286	3.356	3.553	3.577
Sleman	18.081	17.894	17.926	21.611	22.534
Yogyakarta	94.833	94.926	95.126	101.114	104.732
CDMA	316.769	328.621	329.484	-	371.673
Pasca bayar	31.439	32.074	31.864	--	15.644
Pra Bayar	285.330	296.547	297.620	--	356.029
DIY	439.433	451.184	452.565	134.849	511.450

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Rasio warnet atau rasio ketersediaan warnet adalah jumlah warnet per 1000 penduduk. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Semakin besar rasio warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.113
Jumlah Warnet di DIY, 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Warnet	166	168	322	500

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi DIY

Jumlah warnet di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena bisnis warnet menjadi bisnis yang menjanjikan ditengah kemajuan jaman yang menuntut setiap orang untuk menggunakan jasa internet dalam mempermudah komunikasi maupun pendukung kegiatan lainnya.

Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sarana komunikasi yang ada berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Pada tahun 2012, di DIY

tercatat jumlah media cetak sebanyak 30, stasiun radio sebanyak 57, dan stasiun TV sebanyak 4 sedangkan jumlah wartawan terdaftar sebanyak 250 orang.

Tabel 2.114
Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Media Cetak	30	30	30	30	30
Stasiun Radio	57	57	57	57	57
Stasiun TV	4	4	4	4	4
Wartawan Terdaftar	250	250	250	250	250

Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY

2.3.1.26 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses sumber belajar, Pemerintah DIY telah mengembangkan layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, serta perpustakaan keliling. Upaya tersebut dimaksudkan agar proses mencerdaskan kehidupan masyarakat dapat dipercepat.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Dalam posisi inilah, perpustakaan maupun kearsipan memiliki peran strategis bagi peserta didik, pendidik, serta masyarakat di dalam mengembangkan wawasannya melalui perpustakaan.

1. Jumlah Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan sangat didukung oleh keberadaan jumlah perpustakaan. Banyaknya perpustakaan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses perpustakaan dan juga memperbanyak alternatif pilihan bagi pengunjung perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 2.115
Jumlah Perpustakaan di DIY per Kabupaten/Kota
Tahun 2012 - 2013

No	Kabupaten/Kota	2012	2013
1	Kota Yogyakarta	145	262
2	Bantul	193	385
3	Gunungkidul	182	184
4	Kulon Progo	126	131
5	Sleman	216	220

Sumber : BPAD DIY

Dari data di atas disimpulkan bahwa ada pertumbuhan jumlah perpustakaan di Kabupaten/kota di DIY cukup baik. Setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah perpustakaan di mana pertumbuhan perpustakaan paling pesat di Kabupaten Bantul.

2. Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Baik buruknya kinerja pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari seberapa banyak kunjungan ke perpustakaan.

Tabel 2.116
Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	rata-rata kunjungan setiap orang (pemakai) ke perpustakaan
2010	194.118	3.000	65
2011	194.116	2.750	70
2012	201.881	2.500	81
2013	509.964	3.500	145

Sumber: Data Pembangunan Daerah DIY

Tabel tersebut menggambarkan bahwa rata-rata kunjungan setiap orang ke perpustakaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Usaha selanjutnya adalah bagaimana merencanakan peningkatan kinerja perpustakaan di DIY.

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY

Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal perpustakaan dituntut untuk menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Semakin banyak dan semakin lengkap koleksi buku di perpustakaan pasti akan menarik minat masyarakat untuk mendatanginya.

Tabel 2.117
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2010	154.355	332.746
2011	179.609	367.095
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.366

Sumber : Data Pembangunan Daerah DIY

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah koleksi jumlah buku di Perpustakaan Daerah dari tahun 2010-2013 meningkat secara signifikan.

4. Layanan Unik Perpustakaan di DIY

Layanan Perpustakaan di DIY mempunyai beberapa keunikan/kekhususan tersendiri yang tidak ditemui di daerah lain. Keunikan layanan perpustakaan di DIY tersebut diantaranya :

- 1) Layanan Center of Excellence. Center of Excellence adalah layanan perpustakaan dan informasi tentang budaya lokal terutama budaya-budaya masyarakat yang berada di wilayah Jawa. Koleksi ini terdiri dari jenis buku dan audio visual dan koleksi ini hanya dipinjamkan hanya boleh dibaca ditempat.
- 2) Layanan Kyoto Corner. Kyoto corner merupakan hasil kerja sama Pemerintah Daerah DIY dengan Prefektur Kyoto, diresmikan tanggal 17 Oktober 2010 oleh wakil Gubernur DIY Pakualam IX dan Gubernur Prefektur Kyoto Keiji Yamada dalam rangka memperingati hanya dibaca ditempat, jumlah koleksi ada 481 judul, 581 eksemplar.
- 3) Layanan Yogyasiana Berisi koleksi buku tentang Yogyakarta, hanya dibaca ditempat.

- 4) Layanan Pustaka Nusantara Koleksi pustaka nusantara terdiri dari buku, majalah, audio visual berisi tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia. Koleksi ini hanya dibaca di tempat.

5. Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah juga mendorong peningkatan perpustakaan desa/kelurahan. Diharapkan berkembangnya perpustakaan desa/kelurahan mampu meningkatkan daya baca masyarakat, khususnya bacaan yang sesuai dengan berbagai aktivitas kesehariannya. Di samping itu juga menciptakan masyarakat DIY yang intelek, serta mempunyai pengetahuan global.

Tabel 2.118
Persentase Perpustakaan Desa di DIY Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Desa/kelurahan	% Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Perpustakaan	% Desa/Kelurahan yang belum memiliki Perpustakaan
1	Kota Yogyakarta	45	45	100	0
2	Bantul	75	60	80	20
3	Gunungkidul	144	110	76,39	23,61
4	Kulon Progo	88	71	80,68	19,32
5	Sleman	86	66	76,74	23,26
	Jumlah	438	352	80,37	19,63

Sumber : BPAD DIY

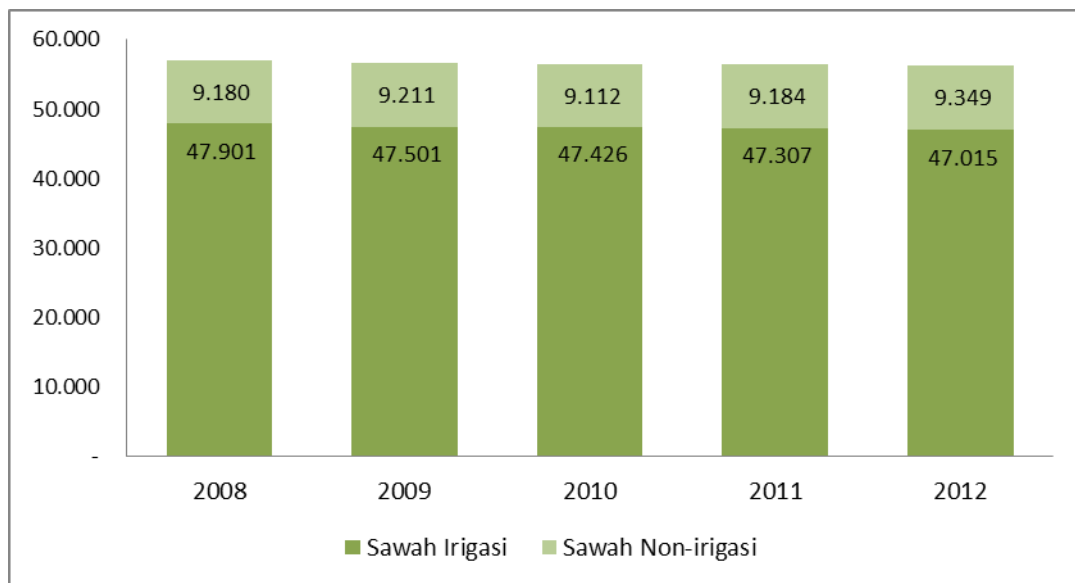
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan desa/kelurahan di DIY 438 desa/kelurahan, sebanyak 233 atau lebih dari 50 persen desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan. Tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak supaya setiap desa/kelurahan mempunyai perpustakaan yang manajemennya baik yang bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa/kelurahan.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi DIY. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Bagi DIY, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan

kontribusi besar dalam perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa. Dalam rentang waktu 2008-2012 kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,31% per tahun selama kurun waktu 2008-2012. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Bantul dan Sleman. Fakta tersebut tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan, yang juga dibayang-bayangi dengan problem semakin rendahnya kualitas & kuantitas SDM produktif, harga yang tidak stabil, anomaly iklim, dan skema jejaring pasar yang tidak berpihak pada petani.



Sumber: analisa data BPS Provinsi DIY

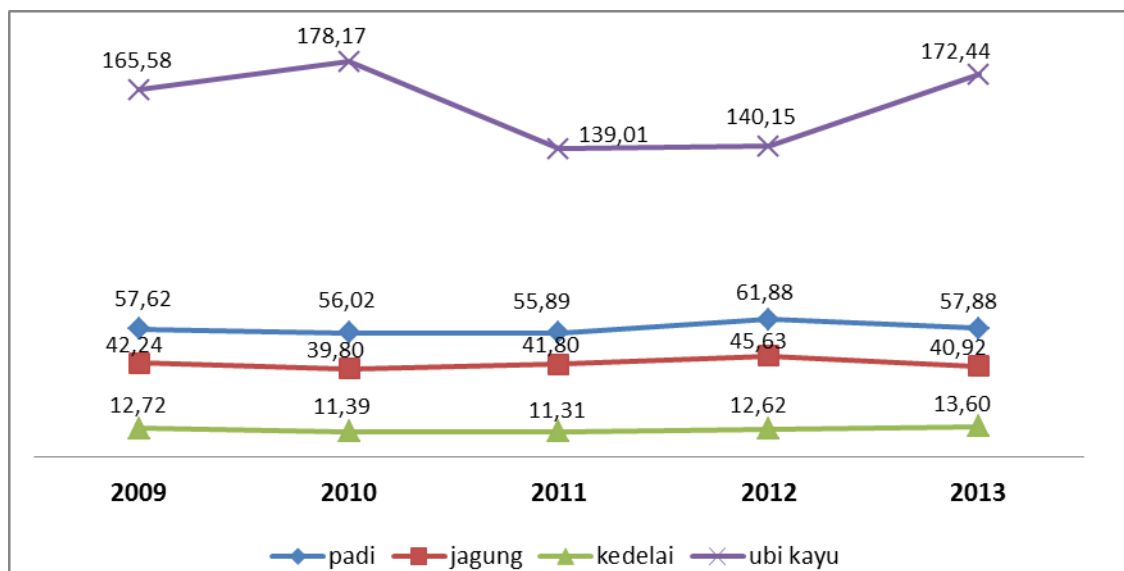
Gambar 2.53

Luas sawah di DIY yang cenderung menurun, 2008-2012

Arahan pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara wilayah. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaisans pangan yang

berintegrasi dengan strategi renaissance ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sector tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Data menunjukkan produktifitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai capaian yang cukup tinggi, terutama komoditas padi. Capaian produktifitas komoditas padi bahkan berada di atas rerata nasional. Selain itu, produktifitas tinggi juga ditemui pada komoditas ubi kayu. Luasan lahan kering yang cukup dominan di DIY memberikan implikasi bahwa produksi ubi kayu di DIY memberikan hasil yang sangat tinggi di DIY. Adapun, capaian produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: analisa data BPS Provinsi DIY

Gambar 2.54
Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu DIY, 2009-2013

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 16 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 57% pada tahun 2012. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (67%) dan Kulon Progo (26%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (53.48%) dan

Sleman (25.68%). Peningkatan produktifitas yang berpengaruh pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa aspek teknis budidaya komoditas tanaman sayuran senantiasa mengalami peningkatan dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, pengairan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok. Salah satu problem dalam pengembangan komoditas sayuran adalah fenomena anomaly iklim, yang mengakibatkan tingkat cekaman yang tinggi dan munculnya hama penyakit serta turunnya harga akibat dari kualitas panen yang buruk.

Adapun potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Sekurangnya terdapat 20 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan pada wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Tiga besar produksi buah-buahan di DIY pada tahun 2012, secara berturut-turut diantaranya adalah : pisang (193.861 ton), mangga (35.858 ton), dan salak (31.955 ton). Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Kulonprogo.

Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 98% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Konsentrasi sapi potong dan kambing pada wilayah DIY didominasi pada Kabupaten Gunungkidul. Namun, selama 2012-2013, populasi ternak sapi potong di DIY cenderung tertekan karena pengeluaran dan pemotongan ternak sapi potong di DIY, tidak seimbang dengan pemasukan ternak sapi potong ke DIY. Sementara itu, populasi ternak unggas di DIY cenderung meningkat, terutama untuk ayam kampung dan ayam ras yang populasinya banyak ditemui pada Kabupaten Sleman.

Wilayah DIY yang memiliki luasan lahan kering dengan kontur yang bergelombang (berbukit/bergunung) menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya : kelapa, kakao, kopi, tembakau, tebu, dan seterusnya. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut, memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Tabel 2.119
Perkembangan luas komoditas perkebunan strategis di DIY 2009-2013

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2009	2010	2011	2012	2013
Kelapa	43,172.84	42,939.27	42,903.95	43,371.38	43,815.39
Kakao	4,546.15	4,618.81	4,693.39	4,811.00	5,012.15
Kopi	1,652.91	1,371.98	1,407.44	1,778.84	1,725.92
Tembakau	2,093.77	1,731.50	2,154.86	2,209.52	2,310.90
Tebu	3,669.99	3,476.29	3,620.60	3,613.13	3,602.66

Sumber: analisa data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktifitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, focus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, dan upaya pemasaran hasil yang memadai melalui branding yang tepat, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani dalam rangka penguatan desain agribisnis diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Pemanfaatan peluang pasar yang baik bisa dicapai melalui penanganan pengolahan hasil melalui integrasi nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar, penguatan system informasi, dan branding produk yang berkelanjutan. Harapannya, aspek keterbatasan yang dimiliki DIY, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

2.3.2.2 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2013 sebesar 23,58% dari luas wilayah DIY atau seluas 75.120,31 Ha (analisa data Dishutbun DIY). Dari luas tersebut, 17,71% merupakan hutan rakyat (sangat dominan) dan sisanya 5,87% merupakan hutan negara. Keberadaan wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sangat dominan ditemui pada wilayah Kabupaten

Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya). Luasan hutan pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 58.622,43 ha, terdiri dari 41.953,93 ha (hutan rakyat) dan 16.668,50 ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 62,47 % dari luas hutan total di DIY, dengan segenap persoalannya, seperti : adanya lahan kritis, ancaman pencurian hasil hutan, potensi bencana alam, dan ancaman kebakaran hutan.

Tabel 2.120
Luas hutan di DIY berdasarkan kewilayahan tahun 2013

Kabupaten	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	41.953,93	56.849,43	60,58
Bantul	1.052,60	8.570,00	9.622,60	10,25
Sleman	1.729,46	4.418,69	6.148,15	6,55
Kulonprogo	1.037,50	20.177,69	21.215,19	22,62
HUTAN di DIY	18.715,06	75.120,31	93.835,37	100,00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2014

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,50 Ha (ditambah 1.773 ha sebagai wilayah hutan AB), Kabupaten Bantul 1.052,60 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,46 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 Ha. Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas : hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan

secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.121
Produksi daun dan minyak kayu putih DIY tahun 2009-2013

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Pejualan (Rp.)
2009	4,300.00	41,082.60	4,050,406,200.00
2010	4,800.00	43,352.00	5,028,309,000.00
2011	4,950.00	44,957.00	6,110,306,400.00
2012	4,794.48	46,321.00	7,581,090,000.00
2013	4,743.77	44,669.00	7,330,657,000.00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY, 2014

2.3.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Ratio elektrifikasi DIY pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011 (DPU-P dan ESDM, 2013). Pada tahun 2012, jumlah Rumah tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga ber listrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Sasaran bagi intervensi program ini adalah 238 dusun yang sebagian besar rumah tangga nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2013, dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 955 RT, sedangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Sleman tahun 2013 dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 189 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,107%. Melalui dana APBN 2013, jumlah RT yang dapat dilistriki sebanyak 39.674 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 3,695%. Sehingga total pencapaian ratio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2013 mencapai 80,6% dari target sebesar 77,4%.

Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 629,35 kW. Angka ini meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30% dari angka di tahun 2011 dengan total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan baru sebesar 582,35 kW dari

total potensi 10.000 kW. (10 MW). Capaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 yang diperoleh dari tenaga air sebesar 630 kW atau 8.674,84 SBM, tenaga surya 37 unit atau setara dengan 101,89 SBM, biogas sebanyak 82 unit atau mencapai 262,91 SBM, tenaga hybrid surya dan angin 20 kW atau sama dengan 275,39 SBM. Total dari keseluruhan program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2013 telah dicapai penyediaan EBT sebesar 114.035,02 SBM dari target sebesar 107.790 SBM.

Kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi dilakukan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk melakukan implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Sampai dengan tahun 2013, target pelaksanaan konservasi energi melalui audit energi di DIY sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah) dari 150 gedung pemerintah DIY. Dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2013, Pemda DIY yang didukung oleh APBN telah melakukan audit energi di Dinas PUP-ESDM DIY Bumijo, Gedung Setda Kota Yogyakarta; Balai IPAL Sewon, Bantul; Rumah Sakit Ghrasia, Pakem, Sleman dan PD Tarumartani.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 6% sesuai target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 6%, salah satunya dicapai melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air. Sampai dengan tahun 2013, sudah terbangun sumur bor di 15 lokasi dari total 46 lokasi daerah sulit air.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m³, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m³, tanah liat dengan produksi 789 m³, andesit dengan produksi 109.280 m³, zeolit dengan produksi 350 m³, breksi batuapung dengan produksi 600 m³, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m³. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan galiandari 7 mineral non logam dan batuan sebesar 551,39 juta Rupiah atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37 %. Pada tahun 2013, Pemda DIY melakukan peningkatan nilai tambah komoditas tambang batu andesit 1 (satu) lokasi di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,

Kabupaten Kulonprogo sehingga kinerja pengelolaan usaha pertambangan di tahun 2013 mencapai sebesar 9%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kuota solar untuk tahun 2013 di DIY adalah sebesar 126.166 KL atau menurun sebesar 3% dari kuota di 2012, sedangkan untuk premium kuota naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya atau sebesar 521.374 KL. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 93 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.130 pangkalannya. Dari keseluruhan penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut, terdapat 600 penyalur yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya.

Upaya peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Sampai tahun 2012 telah dilakukan pembinaan terhadap 180 penyalur (30%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap 90 penyalur yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kelancaran distribusi terhadap 270 penyalur (45%).

2.3.2.4 Urusan Pariwisata

Perkembangan jumlah wisatawan dilihat dari wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi penginapan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 2.837.962 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 2.602.074 orang dan wisatawan mancanegara 235.888 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah Belanda, Malaysia, Perancis, Jepang dan Jerman.

Tabel 2.122
Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY

	2009	2010	2011	2012	2013
lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,98	1,94	1,98	1,82	1,90
lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,74	1,70	1,72	1,56	1,59
Jumlah Wisatawan (Orang)	1.426.057	1.456.980	1.608.194	2.215.832	2.837.962
a. Wisatawan Nusantara	1.286.565	1.304.137	1.438.629	2.013.314	235.888
b. Wisatawan Mancanegara	139.492	152.843	169.565	202.518	2.602.074

Sumber: Dinas Pariwisata DIY

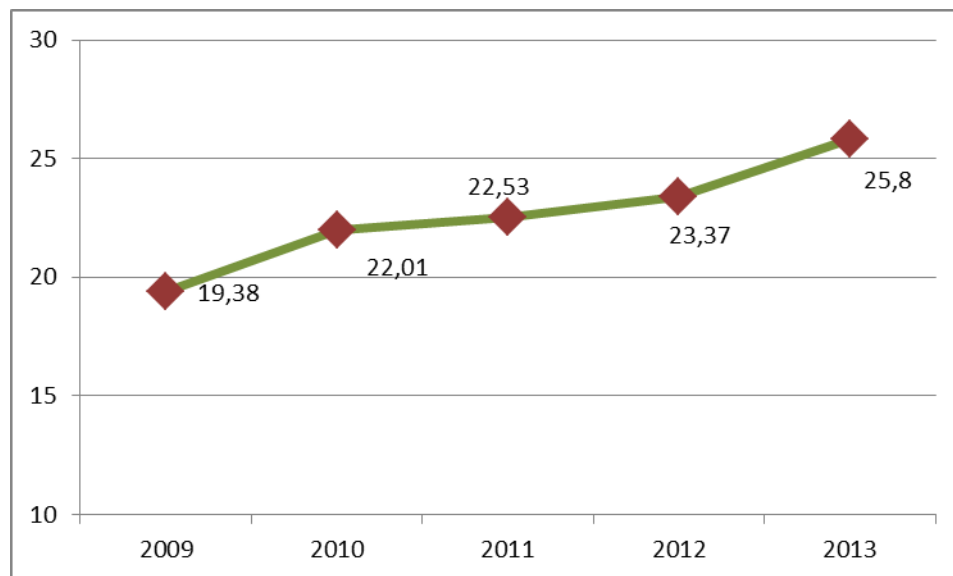
Angka kunjungan yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan perkembangan sektor kepariwisataan yang menggembirakan. Akan tetapi, ada dua isu strategis, yaitu rendahnya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY dan tidak meratanya sebaran kunjungan dari segi waktu kunjungan (berpuncak pada long weekends dan libur lebaran dan sekolah) dan destinasi wisata yang dikunjungi (sehingga mengancam carrying capacity destinasi-destinasi tertentu). Dilihat dari kunjungan ke destinasi wisata, konsentrasi kunjungan masih ada pada Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sementara itu, pada tahun 2013 jumlah pengunjung destinasi wisata di kabupaten/kota meningkat 22,01% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 11.379.640 orang, sementara untuk tahun 2013 berhasil dicapai 13.883.950 orang pengunjung. Hal ini menunjukkan DTW di wilayah DIY terus dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pertumbuhan pariwisata DIY juga didorong peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) . Tercatat pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan 13.695 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Pertumbuhan MICE

yang cukup baik ini menjadikan DIY berpeluang untuk menjadi pusat penyelenggara MICE baik tingkat nasional maupun regional.

2.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, khususnya ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan per kapita DIY selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk ke wilayah DIY dari luar daerah. Pertumbuhan ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Ket: tahun 2013 Angka Sementara

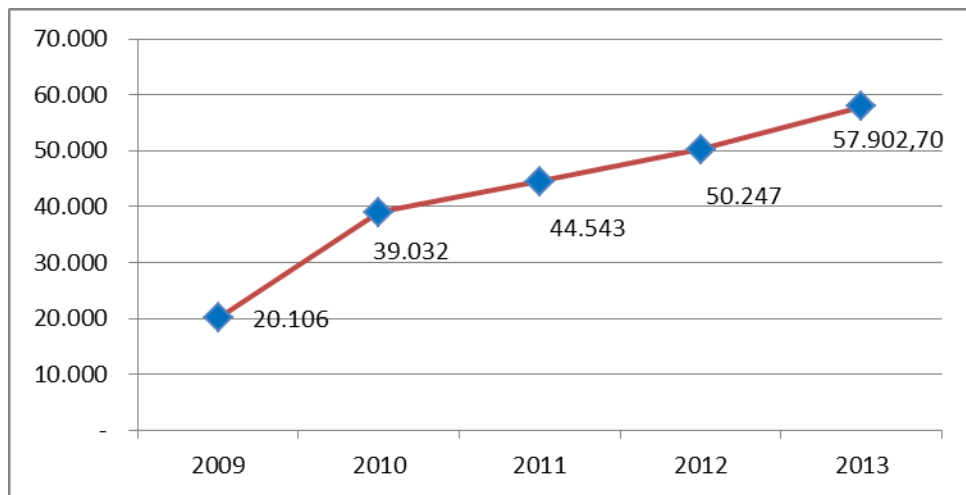
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.55
Tingkat Konsumsi Ikan DIY (kg/kapita/tahun), 2009-2013

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2009-2013 rata-rata tumbuh sebesar 28,11%.

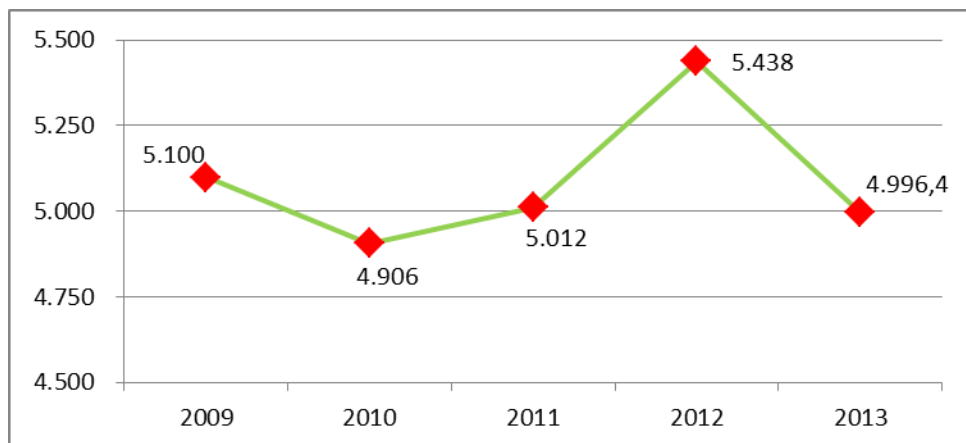
Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY

selama lima tahun terakhir mencapai 88,16%, bahkan pada tahun 2013 mencapai 92,06%. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 20,23% pada tahun 2009 menjadi 7,94% pada tahun 2013. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap. Namun demikian, faktor cuaca adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.56
Produksi Perikanan Budidaya DIY (ton), 2009-2013



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.57
Produksi Perikanan Tangkap DIY (ton), 2009-2013

2.3.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi DIY yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah sektor jasa-jasa. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di DIY karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2009 hingga 2013 dapat dilihat pada perkembangan ekspor. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2013 tercatat 211,76 US\$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), stk sintetis dan kerajinan kulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia dan Korea Selatan.

Tabel 2.123
Perkembangan Ekspor DIY

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Volume (Juta kg)	31	35	27	33,54	34,03
Nilai (Juta US \$)	109	140	144	177,07	211,76
Komoditi	106	116	102	108	127
Negara	99	93	87	98	111
Eksportir	270	251	208	235	286

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2009-2013 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2013 sebanyak 1.873 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 43.818 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha mikro dan kecil sebesar 91,59%

Tabel 2.124
Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP yang Terdaftar di DIY

No	Golongan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pengusaha Besar	756	910	988	1.040	1.057
2	Pengusaha Menengah	1.548	1.820	1.999	2.316	2.629
3	Pengusaha Kecil	33.425	35.298	36.607	38.589	40.132
Jumlah		35.729	38.028	39.594	41.945	43.818

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2013 sejumlah 416 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 333 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian.

Tabel 2.125
Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional

	2009	2010	2011	2012	2012
Toko Modern	350	405	405	416	416
Pasar Tradisional	336	308	308	333	333
Jumlah	686	713	713	749	749

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

2.3.2.7 Urusan Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB DIY mencapai 13,77% pada tahun 2013. Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri menempati urutan ke empat setelah sektor Jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Pertanian. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dilihat dari pertumbuhan unit usaha, jumlah IKM mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2013. Jumlah unit usaha pada tahun 2013 sebanyak 84.234 unit atau meningkat sebesar 3,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar 3,21% pada tahun 2013 sehingga sebanyak 310.173 orang terserap dalam sektor industri pengolahan.

Tabel 2.126
Perkembangan IKM di DIY

	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Unit Usaha	77.851	78.122	80.056	81.523	84.234
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	291.391	292.625	295.461	300.539	310.173
Nilai Investasi (Rp Milyar)	871.11	878.063	1.003.678	1.010.585	1.064.180
Nilai Produksi (Rp Milyar)	2.325.582	2.821.218	3.053.031	3.199.224	3.294.485
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.251.173	1.358.293	1.352.479	1.388.023	1.449.435

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Meskipun indikator tersebut di atas menunjukkan perkembangan yang positif, namun perlu adanya perhatian khusus terkait pengembangan sektor industri mengingat pada tahun mendatang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku. Terbukanya pasar perdagangan bebas di ASEAN menjadi tantangan bagi DIY apakah produk-produk IKM dapat bersaing dengan produk dari negara lain di ASEAN. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi.

2.3.2.8 Urusan Ketransmigrasian

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Berhak memperoleh bantuan berupa informasi lokasi tujuan, pelatihan, perbekalan, pelayanan pengangkutan sampai tujuan, lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah, sarana prasarana di daerah penempatan dan fasilitasnya serta pembinaan pengembangan usaha.

Ada 3 (tiga) jenis Transmigrasi (UU 15/1997 dan UU 29/2009 tentang Ketransmigrasian) yaitu ;

1. Transmigrasi Umum (TU) adalah Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan badan

usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Hingga kurun 2008 - 2013. Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak 1.036 KK, yaitu masing-masing 205 KK pada tahun 2008, 223 KK pada tahun 2009, 175 KK pada tahun 2010, 125 KK pada tahun 2011, 158 KK pada tahun 2012 dan 150 KK pada tahun 2013 selain itu juga DIY telah melaksanakan program transmigrasi local. Pemerintah DIY juga melakukan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) untuk semua transmigran yang akan diberangkatkan ke masing-masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan di lokasi penempatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sampai saat ini ada 1.193 KK animo yang ingin bertransmigrasi dan 814 KK yang sudah terdaftar sebagai calon transmigrasi dari DIY dan menunggu untuk diberangkatkan.

Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, perlunya pemerintah menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Selama periode 2008-2012, pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita DIY cenderung mengalami kenaikan. Pengeluaran konsumsi RT per kapita DIY tahun 2012 sebesar 27,528 juta rupiah atau meningkat sebesar 55,24% dibandingkan tahun 2008. Sementara itu rata-rata pengeluaran konsumsi Rumah Tangga per kapita tumbuh sebesar 11,64%.

Tabel 2.127
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Total Pengeluaran RT (dalam juta rupiah)	18.100.621	20.610.786	23.198.864	26.319.415	29.350.917
2.	Jumlah RT	1.020.842	1.049.587	1.046.873	1.041.925	1.066.280
3.	Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita (dalam juta rupiah)	17,731	19,637	22,160	25,260	27,528

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di DIY pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 500 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 500 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.

Tabel 2.128
Jumlah Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2008-2012

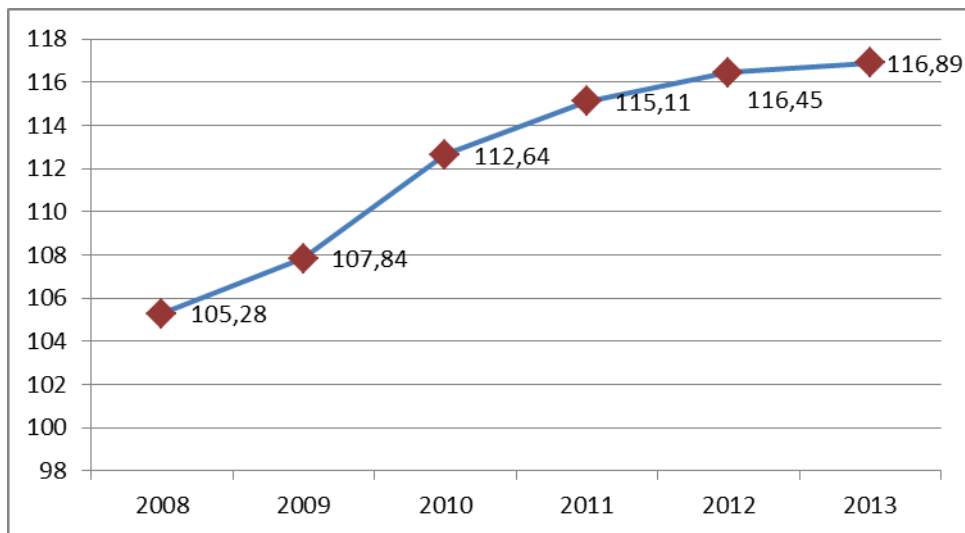
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Rangka				
	2008	2009	2010	2011	2012
< 100.000	1.206	693	193	-	10
100.000 - 149.999	33.876	17 831	8.821	7.495	6.873
150.000 - 199.999	82.121	82 671	59.040	46.381	35.259
200.000 - 299.999	161.777	230 077	217.222	175.341	172.813
300.000 - 499.999	339.546	316 194	328.385	302.419	283.642
≥ 500.000	402.136	402 121	433.212	510.289	567.685

Sumber: DDA DIY 2009-2013

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

NTP DIY selama kurun waktu 2008-2013 menunjukkan adanya trend yang meningkat, dimana tahun 2008 tercatat sebesar 105,28 dan kemudian menjadi 116,89 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan.



*Ket: NTP tahun 2013 merupakan rata-rata NTP bulan Januari sd. November
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2007-2013*

Gambar 2.58
Nilai Tukar Petani DIY, 2008-2013

Mulai Desember 2013, perhitungan NTP yang dikeluarkan BPS menggunakan tahun dasar tahun 2012 (2012=100), menggantikan bulan-bulan sebelumnya yang masih menggunakan tahun dasar penghitungan tahun 2007. Pada

Desember 2013, NTP DIY mencapai angka 103,15. Hal ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan NTP tahun 2012. Pertumbuhan NTP yang signifikan menggambarkan derajat kesejahteraan petani yang semakin baik apabila tingginya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang stabil atau meningkat, serta permintaan yang tinggi.

Data perkembangan NTP pada bulan Januari selama 2009-2013 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan nilai NTP di DIY untuk semua sub sektor pertanian kecuali peternakan. Subsektor hortikultura merupakan subsektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 5,94%. Hal ini dikarenakan subsektor hortikultura mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya sayur, buah, dan tanaman hias. Sementara itu, subsektor peternakan justru mengalami pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar -0,37%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan populasi ternak yang diiringi dengan kebijakan impor sapi.

Tabel 2.129
Nilai Tukar Petani dan sub sektor pendukungnya di DIY 2009-2013 (Januari)

NTP Sektor/Sub sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
NTP Pertanian	104.62	110.29	113.89	116.50	116,98
NTP Pertanian Pangan	102.88	109.45	113.52	117.11	117,05
NTP Hortikultura	103.64	117.56	127.30	128.96	129,91
NTP Perkebunan Rakyat	118.11	115.90	121.44	123.62	123,81
NTP Peternakan	107.24	106.16	103.66	103.79	105,61
NTP Perikanan	110.18	112.28	112.69	113.79	115,64

Sumber : analisa data BPS Provinsi DIY

2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung meningkat. Pengeluaran Konsumsi per Kapita pada tahun 2012 meningkat sebesar 19,07% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 57,13% dan sisanya sebesar 42,87% untuk komoditas makanan.

Tabel 2.130
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY,
2008-2012

Tahun	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Pengeluaran Total
2008	239.447	371.184	610.631
2009	206.689	258.322	465.011
2010	244.004	309.963	553.967
2011	276.323	348.721	625.044
2012	308.587	418.516	727.103

Sumber: DDA BPS Provinsi DIY

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2009-2012 mengalami fluktuasi. Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air; Kelompok Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala; serta Kelompok Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi mempunyai rata-rata pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu 4 tahun. Sedangkan di sisi lain, Kelompok Barang dan Jasa; Kelompok Barang Tahan Lama; serta Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara mengalami rata-rata pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi di Kelompok Barang Tahan Lama yaitu sebesar 9,59%.

Tabel 2.131
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di
DIY, 2009-2012

Kelompok	Nilai (Rupiah)			
	2009	2010	2011	2012
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	160.063	109.997	121.996	135.795
2. Barang-Barang & Jasa	183.534	124.291	151.625	170.509
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	25.538	15.912	14.128	20.967
4. Barang Tahan Lama	70.084	40.722	34.823	64.473
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	16.939	10.601	12.348	14.191
6. Keperluan pesta dan upacara	15.267	8.440	13.802	12.580
	471.425	309.963	625.044	727.102

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2013

Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi Rumah Tangga non makanan adalah Kelompok Barang dan Jasa dengan rata-rata proporsi selama 4 tahun sebesar 40,81%. Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air dengan rata-rata proporsi selama 4 tahun sebesar 34,22%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara merupakan kelompok dengan proporsi terkecil sebesar 3,23%.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Pekerjaan Umum

a. Panjang Jalan

Berdasarkan Data Pembangunan Daerah tahun 2009–2013 dapat diketahui tingkat pelayanan jalan berdasarkan untuk semua jalan di DIY berdasarkan kelas dan kondisi, sebagai berikut:

Tabel 2.132
Panjang Jalan berdasarkan kelas dan kondisi
Dalam Km

Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas					
1. Jalan Nasional	168.61	168.61	223.16	223.16	223.16
2. Jalan Propinsi	690.25	690.25	690.25	619.34	619.34
3. Jalan Kabupaten	4040.8	4040.8	4040.8	4040.8	3.656.23
Panjang Jalan Berdasarkan kondisi					
1. Jalan Baik	1.733.83	1.812.75	1.815.91	2.010.35	2.215.17
2. Jalan Sedang	1.763.87	1.656.83	1495.10	1.353.47	1.369.71
3. Jalan Rusak Sedang	891.52	816.96	764.48	739.50	741.60
4. Jalan Rusak Berat					
5. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	145.00	243.95	257.40	243.16	243.16
	35.04	36.32	38.56	42.45	54.98

Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2011

b. Jaringan Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi seluas

17.112,87 ha yang tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah DIY di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, meliputi 44 daerah irigasi.

c. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di wilayah DIY

Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Pada tahun 2012 melalui fasilitasi pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan APBD telah dibangun 5 Unit TPST 3R serta penyediaan alat berat di TPA *Sanitary Landfill* di Kab. Gunungkidul.

Kondisi capaian kumulatif jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem *Sanitary Landfill* sampai tahun 2012 adalah sebanyak 2 lokasi yang diantaranya dilakukan dengan Program Pengelolaan Persampahan dan pembangunan TPA *Sanitary landfill* dengan pendanaan bersama-sama antara APBD kabupaten/ kota dan APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

d. Identifikasi Genangan

Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tercier. Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan

2.4.2.2 Perumahan

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pada tahun 2010 rasio rumah tangga pengguna air bersih di DIY adalah sebesar 64%. Pencapaian pada tahun 2012 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana terjadi peningkatan persentase penduduk

berakses air minum layak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 70,38% atau melayani 2.460.539 jiwa dari total jumlah penduduk DIY sebesar 3.496.100 jiwa.

b. Rasio Elektrifikasi

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi, diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan
- 2) Pengadaan dan Pemasangan PLTS

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi diasumsikan bahwa rumah tangga telah menggunakan fasilitas sanitasi layak antara lain meliputi: a) pembuangan tinja (MCK); b) pembuangan air limbah (SPAL); c) pembuangan sampah.

Tabel 2.133
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Perkotaan			Perdesaan			Total Rumah Tangga Terlayani	
		Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	Rumah Tangga Terlayani Perkotaan		Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	Rumah Tangga Terlayani Perdesaan			
	(RT)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
2010	691.498	442.516	389.088	89,71	248.982	176.903	72,78	565.991	81,85
2011	693.440	443.759	394.190	90,61	249.681	182.303	74,74	576.493	83,14
2012	699.220	447.458	404.790	92,24	251.762	192.403	78,15	597.193	85,41

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2013

d. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar

kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yakni di Kabupaten Bantul sebanyak 9, Kabupaten Kulonprogo 10, Kabupaten Gunungkidul 9, Kabupaten Sleman 12 dan Kota Yogyakarta 29 yang terdiri dari 107 titik lokasi kumuh.

Tabel 2.134
Persentase Lokasi Kumuh yang Telah Ditangani

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase lokasi kumuh yang telah ditangani (%)	2,8	5,6	8,4	11,2	14
Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani	3	3	3	3	3
Jumlah lokasi kumuh (titik)	107	107	107	107	107

Sumber: Bappeda DIY, 2013, diolah

e. Rumah layak Huni

Tahun 2013 masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 91.200 unit rumah dari keseluruhan jumlah rumah sebesar 1.038.233 unit rumah. Jadi jumlah rumah layak huni di DIY adalah sebesar 947.033 unit rumah atau sebesar 91,22% dari total rumah di DIY yang terdiri dari 822.687 unit rumah permanen dan 124.346 unit rumah semi permanen (Sumber : Data Pembangunan Daerah Tahun 2013).

2.4.2.3 Perhubungan

Didalam penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penerapan teknologi informatika merupakan pendukung yang dapat meningkatkan dan memudahkan kegiatan penataan, pengaturan maupun pengendalian lalu lintas angkutan jalan, khususnya di daerah perkotaan. Konsep penerapan teknologi informatika ini, selanjutnya dikenal dengan nama Intelligent Transport Systems (ITS). Sistem ITS ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan dan mengefisienkan pengelolaan transportasi.

Intelligent Transport System (ITS) pada prinsipnya adalah penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat

prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman serta ramah lingkungan.

ATCS (Area Traffic Control System)

ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan atau area tertentu yang berbasis pada teknologi informasi. Keberadaan ATCS akan mengkoordinasikan APILL di satu simpang dengan APILL di simpang yang lainnya, sehingga pelayanannya akan lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan jam sibuk pada masing – masing simpang.

Tabel 2.135
Jumlah Simpang ATCS di DIY

Simpang ATCS	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak dilengkapi bus priority	0	0	1	1	12
Dilengkapi bus priority	0	0	0	8	15
Total ATCS Terpasang	0	0	1	9	27

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Bus Tracking System

Bus Tracking System adalah sistem untuk memantau perjalanan bus Trans Jogja berbasis GPS (Global Positioning System). Sistem ini bermanfaat untuk mengetahui posisi tiap-tiap armada dan pola perjalanan bus Trans Jogja. Sistem BTS ini juga terintegrasi dengan BIS (Bus Information System) sehingga informasi kedatangan bus dapat diketahui oleh penumpang melalui layar LCD yang terpasang pada halte. Pemasangan dan penerapan ITS untuk angkutan umum ini, mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.

Tabel 2.136
Jumlah Halte Terpasang BTS/BIS di DIY

BTS/BIS	2012	2013
Jumlah Halte	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

e-Ticketing

Sistem tiket bus Trans Jogja telah mengadopsi *electronic ticketing (e-ticketing)* pada tahun 2008. Dalam perkembangannya, sistem tiket tersebut ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan (melalui *e-money*/uang elektronik) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui kartu GAMA Card. *e-money* sendiri baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Tabel 2.137
Transaksi Penggunaan Kartu Elektronik Trans Jogja

Simpang ATCS	2011	2012	2013
reguler Trans Jogja	1.218.162	5.549.083	5.764.072
e-money perbankan		271.214	214.346

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

2.4.2.4 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, Pemerintah DIY menetapkan kebijakan penataan ruang melalui Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029.

Untuk itu pelaksanaan pembangunan di DIY telah dilakukan sesuai dengan arahan dari Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.4.2.5 Luas wilayah produktif

Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga untuk tercapainya tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan wilayah produktif secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Berikut data luas wilayah produktif menurut Dinas PUP&ESDM per Kabupaten / Kota di DIY.

Tabel 2.138
Luas Wilayah Produktif (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)		
	Luas wilayah budidaya (Ha)	Luas wilayah produktif (Ha)	Rasio (%)
Kabupaten Kulon Progo	37,685.23	24,433.41	64.84
Kabupaten Bantul	49,809.89	29,093.00	58.41
Kabupaten Gunungkidul	25,419.00	139,471.00	18.23
Kabupaten Sleman	24,889.61	56,218.16	44.27
Kota Yogyakarta	2,549.60	2,843.42	89.67

Sumber : DPUP & ESDM

2.4.2.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri PU Nomor :16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor:17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya sehingga DIY berikut Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam penyusunannya, Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.139
Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus narkoba	332	268	266	262	257
2.	Jumlah kasus pembunuhan	15	15	14	10	9
3.	Jumlah kejahatan seksual	29	19	18	13	20
4.	Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat)	474	627	579	536	461
5.	Jumlah kasus pencurian (curat, curanmor, curas, pencurian ringan-biasa)	2341	3199	3902	3042	2.446
6.	Jumlah kasus penipuan	940	1.038	1.428	1.301	1.364
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	12	5	5	6	4
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	2.706	3.128	3.719	3.072	4.561
9.	Jumlah penduduk	3.393.003	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,12	0,15	0,18	0,15	0,13

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Jumlah tindak kejahatan menurut jenis kasus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 2012. Jumlah kasus yang berfluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah kasus pencurian dan penipuan dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 5 tahun masing-masing sebesar 4,25% dan 10,99%. Namun, kondisi tahun 2012 kasus pencurian turun cukup signifikan menjadi 2.446 kasus. Sedangkan kasus penipuan pada tahun 2012 menjadi 1.364 kasus atau lebih tinggi daripada tahun 2011 sejumlah 1.301. Dalam rangka penurunan jumlah kasus tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan

banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2009–2013 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terkecil dalam periode 5 tahun terakhir.

Unjuk rasa di DIY di dominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi dengan proporsi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 74,6%. Sementara itu unjuk rasa di bidang politik mempunyai proporsi rata-rata 6,42% selama 5 tahun. Namun pada tahun 2013 terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa di bidang politik dan ekonomi masing-masing menjadi sebesar 2,23% dan 49,55%. Sementara di sisi lain, proporsi unjuk rasa di bidang lainnya meningkat signifikan menjadi 48,21% pada tahun 2013.

Tabel 2.140
Jumlah Demo di DIY, 2008–2013

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2009	269
2010	240
2011	267
2012	315
2013*	224

Sumber: SIPD DIY, 2013

Ket: * Angka Sementara

c. Lama Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Tabel 2.141
Rata-rata Lama Pengurusan Izin, 2013

Jenis Izin usaha	Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari)
Izin Prinsip	3
Izin Usaha	7
Izin Kawasan Industri	14
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas 2000-6000 m ³ /tahun	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan	30
Izin Usaha Pertambangan	30
Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut	7
Izin pendirian koperasi primer dan sekunder	90

Sumber: BKPM DIY, 2013

d. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Daerah yang menjadi kontributor PAD DIY adalah:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

e. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi dalam bentuk Perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. Perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, Pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan.

Jumlah Perda DIY yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.142
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di DIY, 2013

	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Perda terkait perizinan	1	0	0	3	2	1

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2013

2.4.4 Fokus sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas SDM terkait dengan kualitas tenaga kerja dan produktivitas penduduk. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.143
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di DIY, 2010

NO	Uraian	2010
1.	Jumlah lulusan S1	185.651
2.	Jumlah lulusan S2/S3	19.267
3.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	204.918
4.	Jumlah penduduk	3.457.491
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	592,58

Sumber: SP 2010, BPS Provinsi DIY

Menurut data Sensus Penduduk (SP) 2010 oleh BPS, jumlah penduduk DIY yang tamat Diploma I/II sebanyak 30.767 orang, tamat Diploma III sebanyak 73.037 orang, tamat Diploma VI/S1 sebanyak 185.651 orang, dan tamat S2/S3 sebanyak 19.267 orang.

Lulusan S2/S3 terbanyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu 10.565 orang, sedangkan yang terkecil berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 436 orang. Sementara lulusan Diploma IV/S1 terbanyak berada di Kabupaten Sleman (82.904 orang) dan terkecil di Kabupaten Gunungkidul (9.324 orang)

Tabel 2.144
Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Diploma I/II	Diploma III	S1/ Diploma IV	S2/S3
Kulon Progo	3.650	4.491	11.349	436
Bantul	8.072	17.198	43.940	3.745
Gunungkidul	4.047	3.650	9.324	552
Sleman	11.585	32.103	82.904	10.565
Yogyakarta	3.413	15.595	38.134	3.969
DIY	30.767	73.037	185.651	19.267

Sumber: SP 2010, BPS Provinsi DIY

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah

melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 2.145
Rasio Ketergantungan di DIY, 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	634.400	602.600	608.500	615.100	622.100
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	323.500	324.200	328.300	331.700	336.600
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	957.900	926.800	936.800	946.800	958.700
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	2.544.000	2.512.200	2.530.400	2.549.300	2.566.600
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	37,65	36,89	37,02	37,14	37,35

Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2010, BPS Provinsi DIY, diolah

Pada tahun 2012, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 37,35 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Dalam kurun waktu 2011-2013, Angka Ketergantungan DIY selalu mengalami peningkatan. Salah satu faktor kenaikan angka ketergantungan di DIY adalah terkait dengan semakin tingginya capaian angka usia harapan hidup di DIY dan peningkatan TFR DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY diikuti oleh pemerintah DIY dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik Antara tingkatan maupun antar tahapan. Pertahanan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJMD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah

direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut harus melakukan lelang sehingga proses lelang tidak dapat dilakukan karena waktu yang terbatas. Waktu perencanaan program/kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan,
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan,
- c) Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) penting untuk mejadi acuan didalam pelaksanaan program/kegiatan,
- d) Indikator keluaran yang berupa jumlah orang/volume harus didukung dengan data yang akurat dan didukung dengan analisis tren.
- e) Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan supaya tidak melampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya gagal lelang.

Tabel 2.146
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah tahun 2013

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
1													
1	1												
	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	82	78,31	80	95,31	119,14	82	82	100	Disdikpora
	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	Persen	84,08	80,31	83,25	83,51	100,31	84,08	84,08	100	Disdikpora
	7	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	Persen	79,25	78,33	78,79	78,85	100,08	79,25	79,25	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	7000	6000	6000	10000	166,67	7000	7000	100	Disdikpora
	9	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	Persen	70,78	69,89	70,33	80,61	115	70,78	70,78	100	Disdikpora
	10	Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	Persen	0	74,01	74,21			0	0		Disdikpora
	11	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Persen	74,47	74,01	74,24	79,32	106,84	74,47	74,47	100	Disdikpora
	12	Program Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi	Persen	57,5	55,43	56,93	57,2	100,47	57,5	57,5	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
	13	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persen	45	20	40	66,36	165,9	45	45	100	Disdikpora
	14	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	peserta didik	1849	1713	1796	1796	100	1849	1849	100	Disdikpora
	15	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*)	Persen	5	NA	1	-		5	5	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
	16	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persen	5	NA	0	0	100	5	5	100	Disdikpora
	17	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persen	30	NA	0			30	30	100	Disdikpora
1	2	Kesehatan										
	5	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persen	98	98	98	99,92	102	98	98	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
6	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar	Persen	95,5	94,1	95	95,14	100	95,5	95,5	100	Dinas Kesehatan
7	Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	Persen	70	61	64	74,33	116	70	70	100	Dinas Kesehatan
8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Persen	52,6	45,57	48,2	73,27	152,01	52,6	52,6	100	Dinas Kesehatan
9	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	Persen	98	97	98	99,71	101,74	98	98	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	42	33,07	37	36,27	98	42	42	100	Dinas Kesehatan
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat*)	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	Persen	8,8	8,95	8,9	8,56	104	8,8	8,8	100	Dinas Kesehatan
12	Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat*)	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	Persen	63,2	55,5	61,98	109,87	177	63,2	63,2	100	Dinas Kesehatan
13	Program Pembinaan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU)	Persen	80	52,89	57,85	61,16	105,72	80	80	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	Persen	100	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	Persen	98,25	97,5	98	99,69	101,72	98,25	98,25	100	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapeljamkesos	Persen	65,25	55	60,85	69,36	113,99	65,25	65,25	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghrasia	Persen	51,04	42,16	46,81	48,55	103,72	51,04	51,04	100	RSJ Ghrasia
18	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	Persen	40,25	38,48	38,75	46,04	119	40,25	40,25	100	Dinas Kesehatan
19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen	100	100	100			100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen	100	100	100				100	100	Dinas Kesehatan
1	3	Pekerjaan Umum											
	5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	72,64	71,09	72,04	72,75	100,99	72,64	72,64	100	Dinas PUPESDM
	6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan											Dinas PUPESDM
	7	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	Persen	100	100	100	50	50	100	100	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
8	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	Persen	29,91	24,20	26,97	28,65	106,23	29,91	29,91	100	Dinas PUPESDM
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	Persen	78,00	75,06	76,50	77	100,41	78,00	78	100	Dinas PUPESDM
10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Penambahan penyediaan air baku	l/det	900	600	700	1007,21	143,89	900	900	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku											Dinas PUPESDM
12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	77,36	70,38	73,87	70	94,76	77,36	77,36	100	Dinas PUPESDM
13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	15800	14329	14400	16194	112,46	15800	15800	100	Dinas PUPESDM
14	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	Persen	55	45	50	45	90	55	55	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	61	53	57	64	112,28	61	61	100	Dinas PUPESDM
16	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	47	39	43	47	109,30	47	47	100	Dinas PUPESDM
17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi	Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	Persen	40	28	34	34	100,00	40	40	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
18	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan jumlah titik genangan	Persen	39,90	27,90	33,90	27,9	82,30	39,90	39,9	100	Dinas PUPESDM
19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	82	78	80	82	102,5	82	82	100	Dinas PUPESDM
20	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	titik	60	20	40	43	107,5	60	60	100	Dinas PUPESDM
21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa	Persen	81,25	70	75	70	93,33	81,25	81,25	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
		laboratorium pengujian										
	22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	80	75	77,50	75	96,77	80	80	100	Dinas PUPESDM
	23	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persen	77,50	72,50	75	72,5	96,67	77,50	77,5	100	Dinas PUPESDM
1	4	Perumahan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Persentase	34	23,20	29	33,67	116,10	34	34	100	DINAS PUPESDM
	2	Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase	49	38,58	44	46,27	105,16	49	49	100	DINAS PUPESDM
	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase	7,50	8,50	8,00	6,6	121,21	7,50	7,5	100	DINAS PUPESDM
1	5	Penataan Ruang										
	1	Program Perencanaan Tata Ruang	kawasan strategis	14	10	12	12	100,00	14	14	100	DINAS PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
2	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	Persen	60	45	50	63,93	127,86	60	60	100	DINAS PUPESDM
3	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase Pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	Persen	40	10	20	20	100	40	40	100	DINAS PUPESDM
1 6	Perencanaan Pembangunan											
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi	Persen	20,45	28,19	24,16	26,82	88,99	20,45	20,45	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
		tahunan										
6	Program Perencanaan Pembangunan pemerintahan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	Persen	0,97	1,34	1,15	12,73	- 906,96	0,97	0,97	100	BAPPEDA
7	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	Persen	4,87	6,71	5,75	3,64	136,70	4,87	4,87	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Persen	12,66	17,45	14,96	6,82	154,41	12,66	12,66	100	BAPPEDA
9	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	Persen	1,95	2,68	2,30	3,64	41,74	1,95	1,95	100	BAPPEDA
10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	Persen	79	0	74	77	104	79	79	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
11	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat di akses	Persen	70	50	60	71,24	119,04	70	70	100	BAPPEDA
1	7	Perhubungan										
5	Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	Persen	16,80	4,20	8,40	8,40	100	16,80	16,8	100	DISHUBKOMINF 0
6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	Persen	82	75	80	80,65	101	82	82	100	DISHUBKOMINF 0
7	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta	Persen	30	10	20	10	50	30	30	100	DISHUBKOMINF 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
8	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Load Factor penumpang angkutan umum perkotaan Yogyakarta	Persen	36,57	32,57	34,57	34,6	100	36,57	36,57	100	DISHUBKOMINF 0
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	Persen	30,42	26,67	27,08			30,42	30,42	100	DISHUBKOMINF 0
10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan transportasi antar moda	Persen	35	25	30	30	100	35	35	100	DISHUBKOMINF 0
11	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	Persen	100	80	90	90	100	100	100	100	DISHUBKOMINF 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKOMINF 0	
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKOMINF 0	
1	8	Lingkungan Hidup											
	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Persen	6,29	2	3,14	3,14	100	6,29	6,29	100	BLH
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup	Persen	20	10	15			20	20	100	BLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	Persen	5	2	3			5	5	100	BLH
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	unit usaha	37	413	360	360	100	37	37	100	BLH
9	Program Pengelolaan RTH	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persen	23,33	7	11,67	10	86	23,33	23,33	100	BLH
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	Ha	18	3	9	15	166,67	18	18	100	BLH
1 9	Pertanahan											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	1	Program Perbaikan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	Persen	40	0	20	0	0	40	40	100	Biro Tata Pemerintahan
	2	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	Persen	20	10	15	15	100	20	20	100	Biro Tata Pemerintahan
	3	Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang	9229	8381	8805	8426	95,70	9229	9229	100	Biro Tata Pemerintahan
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
1	1	Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK)	Persen	87	84	86	95	110,47	87	87	100	Biro Tata Pemerintahan
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Orang	657	NA	670	795	118,66	657	657	100	BPPM
	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Anak	316	NA	322	301	93,48	316	316	100	BPPM
	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*)	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik	Persen	36,1	35,50	35,97	35,5	98,69	36,1	36,1	100	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
		di lembaga pemerintah										
	8	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persen	96,58	96,41	96,50	96,65	100,16	96,58	96,58	100	BPPM
	9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	62,64	37,64	50,14	49,88	99,48	62,64	62,64	100	BPPM
	10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Persen	-	NA	100			-	-		BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
	11	Program Pendidikan politik bagi Perempuan	Persen	11,06	NA	8,41	8,61	102,38	11,06	11,06	100	BPPM
1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
	1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*)	Persen	71,60	71,36	71,48	80,22	112,23	71,60	71,6	100	BPPM
	2	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persen	0,515	0,530	0,520	0,52	100	0,515	0,515	100	BPPM
	3	Program Peningkatan kesejahteraan Keluarga	Persen	44,60	45,83	45,20	44,1	102	44,60	44,6	100	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	Persen	22,13	21,47	21,47	21,49	100,09	22,13	22,13	100	BPPM
5	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	Terlaksananya program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persen	0	NA	100,00			0	0		BPPM
6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Terlaksananya program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Persen		NA	100,00						BPPM
1	13	Sosial										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
5	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *)	Persentase Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	Persen	7,55	6,50	6,92	9,89	142,92	7,55	7,55	100	Dinas Sosial
6	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlanjar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanjar	Persen	7,85	7,18	7,27	6,79	93,40	7,85	7,85	100	Dinas Sosial
7	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	Persen	8,54	7,60	7,80	52,4	672	8,54	8,54	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
8	Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking	Persentase Keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerjaringan bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	5,95	5,40	5,60	4,22	75	5,95	5,95	100	Dinas Sosial
9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	Persen	4,90	4,85	4,67	1,57	33,62	4,90	4,9	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya)	Persentase keberfungsian sosial bagi tuna sosial	Persen	3,77	3,10	3,25	11,19	344	3,77	3,77	100	Dinas Sosial
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya*)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Persen	9,33	8,10	8,24	9,37	113,71	9,33	9,33	100	Dinas Sosial
12	Program Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*)	Persentase PSKS dalam usaha kesesjahteraan sosial	Persen	66,40	62,45	65,39	40,11	61,34	66,40	66,4	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
13	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persentase PSKS terbina, dalam hal pelestarian nilai-nilai keahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	45,00	33,35	35,00	33,34	95,26	45,00	45	100	Dinas Sosial
14	Program Pembinaan Panti Sosial/jompo	Persentase Pelayanan panti asuhan/jompo sesuai setandar pelayanan	Persen	2,07	1,70	1,91	1,91	100	2,07	2,07	100	Dinas Sosial
15	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	38,56	NA	37,44	29,03	77,54	38,56	38,56	100	Dinas Sosial
16	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pembinaan anak terlantar	Persen	-	NA	1,22			-	-		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persen	-	NA	27,13			-	-		Dinas Sosial
14	Ketenagakerjaan											
1	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat'	%	24,2	22,29	23,5	91,81	390,68	24,2	24,2	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	presentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	9	7,81	8,2	33,95	414,02	9	9	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang melaksanakan K3 sesuai dengan standar/peraturan	%	0	87,92	88,01	52,95	60,16	0	0	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase lembaga yang terstandarisasi	%	48,35	NA	NA	NA	NA	48,35	48,35	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	60	NA	NA	NA	NA	60	60	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	6	Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	14,35	NA	NA	NA	NA	14,35	14,35	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15		Koperasi dan Usaha kecil Menengah											
	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	unit usaha	220.641	212.155	212.155	205.210	96,73	220.641	220.641	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	2.261	2.174	2.174	2.174	100	2.261	2.261	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	UMKM	130	30	80	87	108,75	130	130	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
16	Penanaman Modal											
1	Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp. (000)	8.946.874.000	7.056.066.141	7.809.763.000	8.067.770.134	103,3036487	8.946.874.000	8.946.874.000	100	BKPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	ijin	347	334	341	354	103,81 23167	347	347	100	BKPM
17		Kebudayaan											
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	1,11	0,94	1,03	1,03	100	1,11	1,11	100	Dinas kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	%	46,42	43	44,49			46,42		100	Dinas kebudayaan
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	13	5	11	14	127	13	13	100	Dinas kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*		11
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase implementasi hasil kesepakatan	%	7	3	5	5	100	7	7	100	Dinas kebudayaan
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	30	15	20	20	100	30	30	100	Dinas kebudayaan
18		Kepemudaan dan Olahraga											
	1	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	Dokumen pembangunan kepemudaan	%	0	74,01	74,24			0		100	Disdikpora
	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	sentra	12	9	10			12		100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda	kelompok	345	225	325			345		100	Disdikpora
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	orang	2.100	1.800	2.000			2.100		100	Disdikpora
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	%	44,29	16,67	28,13			44,29		100	Disdikpora
6	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	medali	23	21	22			23		100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
7	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	organisasi	39	35	37			39		100	Disdikpora
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1	Program Pendidikan Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	%	70	67	67			70		100	Badan Kesbanglinmas
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	NA	22	NA	1			22		100	Badan Kesbanglinmas
3	Program Pemeliharaan kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	kasus	964	987	972			964		100	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	260	299	285	155	54,39	260	260	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat	kasus	315	318	316			315		100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	kasus	25	30	28			25		100	Badan Kesbanglinmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	unit	2	20	2			2		100	Biro Organisasi
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase untuk kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	%	35	20	25			35		100	Biro Umum Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	%	45	75	60	61,76		45		100	Inspektorat
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	%	90	85	85			90		100	Biro Umum Humas dan Protokol
5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	%	93	92,3	93			93		100	Sekretariat DPRD
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase rancangan produk hukum yang	%	100	100	100			100		100	Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
		terselesaikan										
7	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang dibatalkan	%	0	0	0			0		100	Biro Hukum
8	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	31,77	24,35	26,13			31,77		100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, Biro Am. Perekonomian & SDA, Biro Adm. Pembangunan
9	Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan jumlah desa	desa	25	11	15			25		100	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
		tanggguh											
	10	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	%	70	NA	NA		70		100	BPBD	
	11	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	11,57	11,29	11,43	100	11,57		100	DPPKA	
	12	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	26,13	22	31,56	25,34	80,29	26,13	26,13	100	DPPKA
	13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan	%	80	70	75		80		100	Biro Organisasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
		efisien										
	14	Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	22,5	18	20		22,5		100	Badan Diklat
	15	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	100	100	99	99	100	100	BKD
	16	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	60	55	55		60		100	BKPM
	17	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kasus konflik antar daerah yang terselesaikan	%	100	100	100		100		100	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (norma standar, prosedur dan kriteria)	%	100	100	100			100		100	Biro Tata Pemerintahan
19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	%	100	100	100			100		100	Biro Tata Pemerintahan
20	Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wagub	%	100	100	100			100		100	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan urusan kab/Kota dan provinsi	%	100	95	100			100		100	Biro Tata Pemerintahan
22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD tertayani tata kearsipan berbasis TI	%	100	90	100			100		100	Biro Tata Pemerintahan
23	Program Kerjasama dengan Mass Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	%	100	90	100			100		100	Biro Umum Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	24	Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	%	100	100	100		100		100	Biro Hukum	
	25	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi rancangan produk hukum Kab./Kota	%	100	100	100	120	120	100	100	100	Biro Hukum
	26	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Persentase tindak lanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman pengiriman peserta diklat dari	%	100	100	100		100		100	100	Badan Diklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
		luar DIY										
	27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DPPKA
	28	Program Penelitian dan Pengembangan	%	100	100	100			100		100	Badan Diklat, Biro Adm. Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
29	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	%	100	100	100			100		100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
30	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	%	100	100	100			100		100	Inspektorat
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	%	100	100	100			100		100	Badan Diklat
21	Ketahanan Pangan											
1	Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan	desa	62	80	71	60	222,22	62	62	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
2	Program Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	???	290	190	230	230	100	290	290	100	BKPP
3	Program Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	???	78	73,5	75,5	85	112,58	78	78	100	BKPP
4	Program Peningkatan Distribususi dan Akses Pangan	Presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	???	99,15	94,55	96,87	96,87	100	99,15	99,15	100	BKPP
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	61	35	48	48	100	61	61	100	BKPP
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	%	33,08	24,76	28,46	35,18	123,61	33,08	33,08	100	BPPM
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	%	27,96	NA	26,76	26,76	100	27,96	27,96	100	BPPM
3	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase profil desa sesuai standar	%	55	28,54	42	39,95	95,12	55	55	100	BPPM
4	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	34	32	33	36,36	110,18	34	34	100	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	NA	NA	100			NA			BPPM
6	Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	Terselenggaranya peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	%	NA	NA	100			NA			BPPM
23	Statistik											
1	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	96	92	94			96		100	Bappeda
24	Kearsipan											
1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	15	5	10	19	190	15	15	100	BPAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	%	9	5	7	11,67	166,7	9	9	100	BPAD
	3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	%	15	5	10	7,16	71,6	15	15	100	BPAD
25		Komunikasi dan Informatika											
	1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/bidang	11	9	10	10	100	11	11	100	Dishubkominfo
	2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	%	60	10	40	45	112,5	60	60	100	Dishubkominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*		11
	3	Program Fasilitas Pos Telekomunikasi Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	%	65	55	60	63,37	105,62	65	65	100	Dishubkominfo
	4	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT	%	100	100	100			100		100	Dishubkominfo
26		Perpustakaan											
	1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Peningkatan Fasilitas Perpustakaan	%	82,5	70	80	71,92	89,9	82,5	82,5	100	BPAD
	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa	%	70	50	60			70		100	BPAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	3	Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkata pemustaka	%	18	14	16	17,7	110,6	18	18	100	BPAD
2		Urusan Pilihan											
2	1	Pertanian											
	5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	Persen	1,7	1,7	1,7	1,7	100	1,7	1,7	100	Dinas Pertanian
	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	Komoditas	3	3	3	3	100	3	3	100	Dinas Pertanian
	7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.321.800	2.135.582	2.287.400	2.332.884	102	2.321.800	2.321.800	100	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDIY Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDIY Tahun 2013	Realisasi RKPDIY Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	383.200	375.714	379.400	383.678	101,13	383.200	383.200	100	Dinas Pertanian
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi peternakan	AU	671.634	619.268	644.257	568.127	88,18	671.634	671.634	100	Dinas Pertanian
2	2	Kehutanan											
	5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan	Ton	86.300	82.797	84.600	78.619,81	93	86.300	86.300	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	-	125,86	123,84	124,23	113,38	91,27	125,86	125,86	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	27000	29000	28000	27.291,871	103	27000	27000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
8	Program Penataan Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	Persen	27,5	27,04	27,34	29,45	107,72	27,5	27,5	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
9	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	Persen	4,7	1,98	3,52	230,77	6555,97	4,7	4,7	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase jumlah industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	Persen	75	61,6	70	70	100	75	75	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase kerusakan hutan	Persen	31,84	37,24	34,54	6,72	181	31,84	31,84	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3	Energi dan Sumber Daya Mineral											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
1	Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	%	78	76,8	77,4	80,6	104,13	78	78	100	Dinas PUPESDM
2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	112 (000)	104,72	107.79 (000)	114,03 (000)	105,80	112 (000)	112 (000)	100	Dinas PUPESDM
3	Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	%	<20	<20	<20	<20	100	<20	<20	100	Dinas PUPESDM
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	%	6	3	3	3	100	6	6	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
5	Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar	pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	%	50	30	40	45	112,5	50	50	100	Dinas PUPESDM
6	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	10	8	9	9	100	10	10	100	Dinas PUPESDM
4	Pariwisata											
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	orang	14.595.763	11.036.493	12.691.967	13.883.950	109,07	14.595.763	14.595.763	100	Dinas Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	???	87	83	85			87		100	Dinas Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	kelompok	81	71	76			81		100	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
4	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa	75	65	70			75		100	Dinas Pariwisata
5	Kelautan dan Perikanan											
1	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaannya	kg/kapita /th dan kg/kapita /yh	14.91 dan 27.17	12.74 dan 23.01	14.18 dan 25.78	22,19	86,07	14.91 dan 27.17	27,17	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	6.400	5.437,50	5.900	4.251,4	72,06	6.400	6.400	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	300	300	100	300	300	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	63.000	50.246,60	56.200	57.152,9	101,70	63.000	63.000	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	ha	13	11	12	15	125	13	13	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	program peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	rasio	115,42	113,71	114,92			115,42		100	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	orang dan desa terisolir	1,350 orang dan 51 desa	990 orang dan 39 desa	1,170 orang dan 45 desa	1,170 orang dan 45 desa	100	1,350 orang dan 51 desa	1,350 orang dan 51 desa	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	8	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	0,08	0	0,06	3.388,46	63.933.207,50	0,08	0,08	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Perdagangan											
	1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspr	Nilai Ekspor	Juta US\$	201,15	191,46	196,25	211,76	110,60	201,15	201,15	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	SIUP	43.371	40,732	41.701	45.603	109,36	43.371	43.371	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
													6
	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP		215.539	222.712	204.511	91,83		100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
7		Industri											
	1	Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	IKM	81.751	81.523	81.621	84.243	103,20	81.751	81.751	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai Produksi	Ribu Rp.	3.290.733.829	3.199.224.964	32.440.141.113	3.294.485.488	101,55	3.290.733.829	3.290.733.829	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2013	Realisasi RKPDP Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
3	Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	IKM	33.964	33.882	33.923	34,978	103,11	33.964	33.964	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
8	Ketransmigrasian											
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	19,62	21,96	17,84	15,58	87,331 83857	19,62	19,62	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2	Program Transmigrasi Regional	Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum	KK	0	150	150	150	100	0	150		Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

2.6. Permasalahan Pembangunan

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas : Reformasi birokrasi dan tata kelola; Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
 - a. Pemerintahan dan Politik
 1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah belum optimal;
 2. Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (e-Gov) belum optimal;
 3. Implementasi Good Governance belum optimal.
 - b. Hukum
 1. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
 2. Kapasitas dan kapabilitas aparaturnya penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
 3. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
 4. Penegakan supremasi hukum masih lemah.
 - c. Kerjasama
 1. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
 2. Implementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak di luar negeri masih sangat kurang;
 3. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal.
2. Prioritas : Pendidikan; Sasaran : Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan; Daya saing Pendidikan Meningkatkan; Peningkatan melek huruf masyarakat
 - a. Kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan masih cenderung mekanistik;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
 - c. Keterkaitan system pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY belum optimal;
 - d. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan local namun berwawasan global masih kurang;

- e. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
 - f. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun system pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
 - g. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai dengan harapan;
 - h. Satuan pendidikan berbasis keunggulan local belum dikembangkan dengan baik;
 - i. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
 - j. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai.
3. Prioritas : Kesehatan; Sasaran : Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
- a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah pedesaan belum merata;
 - b. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 - c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
 - d. Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedic, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi;
 - e. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta belum optimal;
 - f. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia, memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
4. Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan; Sasaran : Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun
- a. Tingkat kemiskinan masih diatas rata-rata nasional;
 - b. Ketimpangan distribusi penduduk;

- c. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
 - d. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
 - e. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal;
 - f. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
5. Prioritas : Ketahanan Pangan; Sasaran : Pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat meningkat
- a. Pertanian
 - 1. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - 2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
 - 3. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
 - 4. Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
 - b. Perikanan dan Kelautan
 - 1. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
 - 2. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
 - 3. SDM dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai;
 - 4. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
 - 5. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
 - c. Ketahanan Pangan
 - 1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
 - 2. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
 - 3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang;
 - 4. Masih adanya daerah rawan pangan;
 - 5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih rendah.
6. Prioritas : Infrastruktur ; Sasaran : Meningkatnya layanan publik bagi masyarakat
- a. Transportasi
 - 1. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;
 - 2. Mulai terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;

3. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
 4. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
 - b. Keciptakaryaana
 1. Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
 2. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
 3. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak;
 4. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;
 5. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
 6. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
 7. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal.
 - c. Tata Ruang
 1. Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal;
 2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
 3. Disparitas antar wilayah masih tinggi;
 4. Perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis;
 5. Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat.
 6. Belum adanya kerangka umum kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten sebagai implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY;
 7. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
 8. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.
 - d. Komunikasi dan Informatika
 1. Masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi DGS;
 2. Masih belum optimalnya layanan unggulan DGS;
 3. Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.
7. Prioritas : Iklim investasi dan usaha; Sasaran : Kunjungan wisatawan, investasi dan pengembangan industri serta UKM meningkat

- a. Pariwisata
 1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
 2. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
 3. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
 4. Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal;
 5. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata.
 6. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
 7. Pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
 8. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
 9. Masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.
- b. Koperasi dan UMKM
 1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
 2. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
 3. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
 4. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
 5. Akses pemodalannya bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- c. Investasi
 1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
 2. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
 3. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek;
 4. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
 5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
 6. Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota.
- d. Industri
 1. Daya saing produk UMKM belum kuat;
 2. Penggunaan bahan baku local belum optimal;
 3. Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih tinggi;
 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
 5. Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
- e. Perdagangan
 1. Akses pasar masih rendah;
 2. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
 3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 4. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal;
 6. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
8. Energi
- a. Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY;
 - b. Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal;
 - c. Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif;
 - d. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
- a. Tingginya konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun;
 - b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan;
 - c. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung karst;
 - d. Peningkatan pencemaran air tanah;
 - e. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan;
 - f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah;
 - g. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan;
 - h. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca;
 - i. Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3;
 - j. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya di kawasan perkotaan;
 - k. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - l. Masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi;
 - m. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami.
10. Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik
- a. Masih terdapat daerah yang akses dengan pusat pemerintahan/bisnis dengan fasilitas yang minim;
 - b. Masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
- a. Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal
 - b. Arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat;

- c. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) semakin terancam kelestariannya
- d. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- f. Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
- g. Sarana dan Prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai;
- h. Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum maksimal;
- i. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
- j. Kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stake holders masih kurang;
- k. Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.6.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

- a. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lerang tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama,
- b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun,
- c. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut,
- d. Pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi,
- e. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin rebuk, banjir tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan di masa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan,

- f. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya lahan,
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri,
- h. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak,
- i. Peningkatan limbah cair, padat dan B3,
- j. Kurangnya penyediaan ruang hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

2.6.2.2. Kependudukan dan Demografi

- a. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia,
- b. Terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia muda produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaan mengalami pertumbuhan berkurang (*depopulasi*),
- c. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali kedesaanya sesudah menamatkan pendidikannya,
- d. Ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan social, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

2.6.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- a. Investasi, Industri dan Perdagangan
 - 1) Investasi
 - a). Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi,

- b). Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi,
 - c). Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap,
 - d). Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal,
 - e). Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang,
 - f). Tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota.
- 2) Industri
- a). Daya saing produk UMKM belum kuat,
 - b). Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor,
 - c). Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan,
 - d). Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI),
 - e). Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
- 3) Perdagangan
- a). Akses pasar masih rendah,
 - b). Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung,
 - c). Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen masih kurang,
 - d). Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor,
 - e). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri,
 - f). Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
- b. Ketahanan Pangan
- 1) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang,
 - 2) Belum optimalnya pemantauan, distribusi, harga dan akses pangan masyarakat,
 - 3) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang,

- 4) Masih adanya daerah rawan pangan,
 - 5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.
- c. Pertanian
- 1) Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
 - 2) Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal,
 - 3) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang,
 - 4) Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.
- d. Perikanan dan Kelautan
- 1) Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat,
 - 2) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal,
 - 3) SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai,
 - 4) Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai,
 - 5) Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal,
 - 6) Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. Kehutanan
- 1) Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal,
 - 2) Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki,
 - 3) Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal,

- 4) Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal.
- f. Pariwisata
- 1) Rendahnya lama tinggal wisatawan,
 - 2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya,
 - 3) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan meadai dalam menghadapi globalisasi,
 - 4) Suasana kondusif masih seering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan,
 - 5) Kualitas pelayanan wisata belum standar,
 - 6) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata,
 - 7) System manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata,
 - 8) Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata,
 - 9) Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.
- g. Koperasi dan UKM
- 1) Jumlah koperasi aktif masih sedikit,
 - 2) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal,
 - 3) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang,
 - 4) Kualitas SDM pengelola koeprasi dan UMKM masih rendah,
 - 5) Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

2.6.2.4. Sosial dan Budaya

a. Sosial

- 1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata.
- 2) Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan.
- 3) Pola-pola Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal.
- 4) Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal. Secara umum kapasitas dan

kualitas tenaga kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan. Lembaga kesejahteraan sosial perlu didorong lebih sigap dan tanggap terhadap permasalahan sosial yang ada.

- 5) Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
- 5) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal

b. Kesehatan

- 1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama (KN-1) belum optimal.
- 2) Mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan.
- 4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 5) Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata

c. Pendidikan

- 1) Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan;
- 3) Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
- 4) Pendidikan cenderung mekanistik;
- 5) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;

- 6) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
- 7) Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
- 8) Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
- 9) Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- 10) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
- 11) Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
- 12) Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;

d. Kebudayaan

- 1) Pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya.
- 2) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal

- 3) Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan.
 - 4) Belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalan, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nilai budaya, adat dan tradisi sebagai way of life bagi masyarakat pada umumnya.
 - 5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.
 - 6) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia.
 - 7) Regenerasi pelaku seni tradisi kurang diminati oleh generasi muda.
- e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
- 1) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
 - 2) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
 - 3) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
 - 4) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- f. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 1) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan.
 - 2) Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga tidak bisa menampung angkatan kerja yang ada. Perluasan kesempatan kerja belum optimal.
 - 3) Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

- 4) Kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup tinggi.
- 5) Kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. Kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali tidak sesuai dengan azas 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha).

g. Agama

- 1) Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama;

2.6.2.5. Pemerintahan dan Politik

a. Pemerintahan dan Politik

- 1) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) belum optimal
- 4) Internalisasi Budaya Satria Pemerintahan kurang intensif dan kurang efektif

b. Hukum

- 1) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- 2) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- 3) Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- 4) Penegakan supremasi hukum masih lemah.

c. Kerjasama

- 1) Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- 2) Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
- 3) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

2.6.2.6. Prasarana Wilayah

a. Transportasi

- 1) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- 2) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
- 3) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
- 4) *load factor* angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang rendah.
- 5) Semakin banyaknya titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan karena masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi.

b. Sumber Daya Air

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 2) Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
- 3) Upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan di DIY.
- 4) Kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal
- 5) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi Banjir dan bahaya kekeringan

c. Keciptakarya

- 1) Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan lahan untuk perumahan / perumahan yang layak huni.
- 2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
- 3) Sarana dan prasarana untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum dijalankan secara terpadu.

- 4) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan
- 5) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
- 6) Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
- 7) Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya;
- 8) Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta;
- 9) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui penyediaan energi baru diperbarukan masih belum maksimal;
- 2) Penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama
- 3) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

e. Tata Ruang

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- 2) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
- 3) Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
- 4) Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;
- 5) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;

- 6) Belum adanya kerangka umum kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten sebagai implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY;
- 7) Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
- 8) Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.

f. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

- 1) Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD
- 2) Belum optimalnya layanan unggulan DGS;
- 3) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun sesuai dengan Misi RPJMD 2012–2017 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian DIY terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 24,57 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40%. Capaian pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 sebesar 5,40% merupakan capaian pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai DIY selama lebih dari satu decade pasca krisis ekonomi pada 1997/1998.

Sedangkan proyeksi PDRB tahun 2014 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp25,90 trilyun - Rp25,95 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2017 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2015 dan 2016 adalah Rp27,33 trilyun - Rp27,43 trilyun dan Rp28,86

trilyun - Rp29,05 trilyun seperti ditunjukkan di Tabel 3.1. Sementara itu prediksi untuk PDRB pada tahun 2017 berkisar antara Rp30,59 trilyun sampai Rp30,85 trilyun. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Provinsi DIY
Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) (juta Rp) Tahun 2013 – 2017

Sub Sektor	2013	2014*		2015*		2016*		2017*	
		m	o	m	o	m	o	m	o
Pertanian	3,730,300	3,749,221	3,780,430	3,773,590	3,833,025	3,809,345	3,901,705	3,894,117	3,998,894
Pertambangan & Penggalian	167,670	173,706	175,970	181,088	184,733	189,238	193,970	198,600	203,960
Industri pengolahan	3,142,840	3,389,553	3,390,490	3,656,650	3,661,780	3,934,171	3,956,550	4,233,168	4,276,030
Listrik, gas, & air bersih	229,640	242,270	244,681	257,073	260,780	273,140	278,000	290,895	296,625
Konstruksi	2,459,170	2,609,179	2,611,638	2,769,643	2,774,865	2,940,807	2,949,680	3,123,137	3,138,460
Perdagangan, hotel, restoran	5,225,060	5,554,239	5,556,850	5,906,933	5,911,100	6,283,800	6,292,365	6,695,965	6,706,400
Pengangkutan & Komunikasi	2,744,150	2,918,405	2,919,050	3,104,600	3,105,870	3,303,295	3,307,750	3,518,000	3,526,062
Keuangan, real-estat, & jasa perusahaan	2,552,440	2,711,967	2,712,243	2,866,293	2,874,470	3,029,105	3,055,560	3,204,793	3,251,116
Jasa-jasa	4,316,210	4,557,918	4,565,184	4,815,440	4,829,435	5,098,959	5,119,200	5,434,895	5,459,628
PDRB	24,567,480	25,906,458	25,956,536	27,331,310	27,436,058	28,861,860	29,054,780	30,593,570	30,857,175

*Keterangan: * adalah angka proyeksi*

Sumber: analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Proyeksi tersebut menggunakan pijakan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 sebesar 5,40%. Untuk itu, pada tahun 2014 perekonomian DIY diproyeksikan akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 5,45–5,65% yang merupakan hasil dari salah aktivitas masyarakat menyambut perhelatan politik (pemilu legislative dan pemilu presiden) tahun 2014.

Adapun untuk tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diprediksikan mencapai 5,5-5,7%. Stabilitas politik diharapkan berlangsung pasca dinamika politik pada tahun sebelumnya yang semakin memperkuat dinamika perekonomian wilayah. Faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi DIY adalah : a) Proyek pembangunan infrastruktur dan

investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, antara lain seperti optimalisasi operasional pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, penyelesaian pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan dan pembangunan pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo, Penataan kawasan Malioboro, Stasiun Tugu & Lempuyangan, pembangunan pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan sejumlah embung pada wilayah tertinggal di DIY, dan berbagai potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan; b) Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY yang mengedepankan pertumbuhan wisata, pendidikan, dan budaya; dan; c) Terjaganya kestabilan harga minyak dunia dan suplai energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru seperti yang telah direncanakan dalam memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat

Pada tahun 2016-2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami peningkatan sampai pada kisaran 5,6–6,2%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada mas tersebut lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor jasa-jasa, sector keuangan, real estate & jasa perusahaan, dan sector perdagangan, hotel dan restoran. Prediksi itu dihasilkan dari pertimbangan prediksi pertumbuhan investasi di DIY yang cukup pesat pada ketiga sector tersebut yang sudah terbukti mampu mendorong peran DIY dalam pengembangan pariwisata pada wilayah potensial.

Upaya peningkatan pertumbuhan pada wilayah potensial (Gunungkidul dan Kulon Progo) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian DIY yang selama ini memiliki disparitas wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Jawa, Jawa-Bali dan nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-rata. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa tahun 2013 sebesar 6,14 %. Wilayah sekitar DIY pada tahun yang sama memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan DIY, yakni : 5,81% untuk Jawa Tengah, 6,55% untuk Jawa Timur, 6,06% untuk Jawa Barat, dan 6,11% untuk DKI Jakarta..

3.1.2. Struktur Sektor Ekonomi

Capaian pada tahun 2013, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor pertambangan. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan pertambangan mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari total PDRB.

Tabel 3.2

**Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2013 – 2017 (%)**

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	15.18	14.47	13.81	13.20	12.73
2. Pertambangan dan Penggalian	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65
3. Industri Pengolahan	12.80	13.08	13.38	13.63	13.84
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.68	0.94	0.94	0.95	0.95
5. Konstruksi	10.12	10.07	10.13	10.19	10.21
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	21.28	21.44	21.61	21.77	21.89
7. Transportasi dan Komunikasi	11.20	11.27	11.36	11.45	11.50
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	10.48	10.47	10.49	10.50	10.48
9. Jasa-jasa	17.58	17.59	17.62	17.67	17.76
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2015 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2017, mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat melalui perluasan pasar dan peningkatan daya saing, sehingga diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh

konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel 3.3., pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya. Trend tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus karena pertumbuhan aktual sector pertanian pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tertekan (bahkan pernah mengalami kontraksi pada tahun 2010-2011), berkaitan dengan adanya dampak anomaly iklim. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian diharapkan masih memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena kontribusi tenaga kerja sector pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian (terutama pertanian lahan kering) yang masih cukup dominan di DIY serta kaitan erat sector strategis ini dengan problem ketahanan pangan.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000) Tahun 2013 – 2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	0.63	0.93	1.02	1.37	2.36
2. Pertambangan dan Penggalian	4.92	4.28	4.61	4.75	5.05
3. Industri Pengolahan	7.81	7.86	7.94	7.82	7.84
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6.54	6.02	6.34	6.43	6.60
5. Konstruksi	6.07	6.15	6.20	6.24	6.30
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6.20	6.32	6.36	6.42	6.57
7. Transportasi dan Komunikasi	6.30	6.36	6.39	6.45	6.55
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6.23	6.26	5.84	5.99	6.10
9. Jasa-jasa	5.57	5.68	5.72	5.94	6.62

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Secara makro regional, kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan

membuat lompatan perbaikan iklim investasi pada wilayah potensial sebagai penopang perekonomian makro yang senantiasa tumbuh secara berkualitas di DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

3.1.3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Dari sisi permintaan dari tahun ke tahun, pangsa PDRB paling besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2013 angkanya sebesar Rp11,93 trilyun sedangkan proyeksinya pada tahun 2015 tetap paling besar yaitu sebesar antara Rp13,29 trilyun sampai Rp13,35 trilyun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi adalah pendapatan masyarakat yang membaik dan di sisi lain dukungan pembiayaan meningkat.

Tabel 3.4
Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000),
2013 – 2017 (juta Rp)

Jenis Penggunaan	2013	2014*		2015*		2016*		2017*	
		m	o	m	o	m	o	m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	11,937,090	12,590,539	12,627,855	13,291,216	13,355,873	14,041,295	14,149,678	14,892,950	15,082,987
2. Konsumsi Pemerintah	4,923,540	5,194,245	5,212,072	5,488,127	5,520,135	5,804,120	5,854,538	6,164,604	6,226,978
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,413,760	6,774,539	6,813,591	7,155,337	7,188,247	7,558,921	7,626,880	8,021,634	8,109,266
4. Lainnya	989,930	1,049,212	1,064,218	1,115,117	1,130,366	1,183,336	1,205,773	1,269,633	1,289,830
PDRB	24,567,480	25,906,458	25,956,536	27,331,310	27,436,058	28,861,860	29,054,780	30,593,570	30,857,175

Sumber: Analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Pertumbuhan optimis terbesar terdapat pada penggunaan PDRB di pengeluaran pemerintah yang proyeksi pertumbuhan optimisnya adalah 5.86% (2014), 5,91% (2015), 6,06% (2016), dan 6,36% (2017). Sementara itu, pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek investasi baik oleh swasta maupun pemerintah di DIY, antara lain dimulainya pembangunan bandara di Kulon Progo, pembangunan kawasan pemukiman/perumahan, pembangunan kawasan wisata berbasis agrowisata maupun wisata pesisir, dan lain-lain. Permintaan ekspor juga diharapkan mulai membaik dengan adanya perluasan pasar dan penanganan produk yang bedaya saing dengan memahami selera pasar dan ikut memicu tambahnya investasi.

Tabel 3.5
Proyeksi Pertumbuhan PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan
(Harga Konstan 2000), (%)

Jenis Penggunaan	2014*		2015*		2016*		2017*	
	m	o	m	o	m	o	m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.47	5.79	5.57	5.77	5.64	5.94	6.07	6.60
2. Konsumsi Pemerintah	5.50	5.86	5.66	5.91	5.76	6.06	6.21	6.36
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.63	6.23	5.62	5.50	5.64	6.10	6.12	6.32
4. Lainnya	5.99	7.50	6.28	6.22	6.12	6.67	7.29	6.97

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 - 2018

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan investasi adalah membaiknya kepercayaan pengusaha terhadap prospek ekonomi DIY. Beberapa proyek juga direalisasikan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 antara lain pembangunan property residential maupun komersial, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kecamatan Temon, dan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Namun, masih rendahnya penggunaan PDRB untuk tujuan produktif mendorong semua pihak untuk lebih mendinamiskan sektor swasta agar meningkatkan pembentukan modal tetap domestik bruto atau meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih di bawah rata-rata nasional dapat ditingkatkan dan sebaran investasi bisa terjadi pada wilayah potensial sesuai karakter pengembangan wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan bisa tercapai secara berkualitas.

3.1.4. Inflasi

Pada tahun 2005, 2008, dan 2013 tingkat inflasi DIY lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Selain pada tahun-tahun tersebut tingkat inflasi DIY selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional. Tingkat inflasi DIY melonjak dari 4,31% pada tahun 2012 menjadi 7,14% pada tahun 2013. Demikian juga tingkat inflasi nasional melonjak dari 4,3% menjadi 8,38%. Lonjakan tingkat inflasi ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari 30% mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum serta arus keluar modal dalam bentuk mata uang dollar mengakibatkan depresiasi terhadap mata uang rupiah sehingga barang-barang yang berasal dari luar

negeri menjadi lebih mahal. Tabel 3.6. menunjukkan data tingkat inflasi tahunan dari tahun 2005 sampai tahun 2013.

Tabel 3.6
Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional
Tahun 2005 – 2013 (%)

Tahun	Yogyakarta	Nasional
2005	14,98	17,11
2006	10,40	6,60
2007	7,99	6,59
2008	9,88	11,06
2009	2,93	2,78
2010	7,38	6,96
2011	3,88	3,79
2012	4,31	4,30
2013	7,14	8,38

Sumber: BPS DIY, 2013

Pada tahun 2014, tingkat inflasi berkisar antara 7,0% - 7,25%. Perkiraan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2014 merupakan tahun politik sehingga permintaan barang dan jasa mengalami peningkatan terkait dengan berbagai aktivitas politik di tahun tersebut. Setelah tahun 2014, tingkat inflasi diperkirakan akan terus meningkat. Namun, nilainya masih berkisar di bawah 7,5%. Posisi nilai tukar yang sampai saat ini terus berada di atas 12.000 per dollar juga menjadi penyebab masih tingginya tingkat inflasi. Tabel 3.7. merupakan proyeksi tingkat inflasi tahunan DIY dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang nilainya diperkirakan akan terus berada di atas 7,0%.

Tabel 3.7
Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2014 – 2016 (%)

Tahun	Range Angka Proyeksi	Proyeksi Angka Moderat
2014*	7,00 - 7,25	7,15
2015*	7,15 - 7,30	7,20
2016*	7,20 - 7,35	7,25

Sumber: BPS, diolah

3.1.5. ICOR

Incremental Capital-Output Ratio atau ICOR merupakan rasio antara penambahan modal dengan penambahan output. Besarnya ICOR menunjukkan tambahan modal yang diperlukan untuk dapat meningkatkan satu unit output. Semakin kecil nilai ICOR, perekonomian dikatakan semakin efisien dalam hal penggunaan modal. Nilai ICOR juga berkaitan dengan produktivitas. Nilai ICOR yang kecil mencerminkan produktivitas yang tinggi karena dengan tingkat modal yang sama mampu dihasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Tingkat output selanjutnya akan berdampak pada PDRB dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai aktual ICOR dari tahun 2010 sampai tahun 2012 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa perekonomian DIY semakin efisien dari tahun ke tahun. Penurunan nilai ICOR dapat disebabkan oleh adanya alih teknologi modern serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teknologi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan tingkat produktivitas serta efisiensi perekonomian. Diperkirakan nilai ICOR DIY akan terus menurun sampai sebesar 5,03 pada tahun 2016. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi DIY akan semakin meningkat.

Tabel 3.8
Perkembangan ICOR DIY Tahun 2010 – 2016

Tahun	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*
ICOR	6,33	5,97	5,79	5,67	5,42	5,22	5,03

Sumber: Analisis ICOR Sektoral DIY, BPS, Bappeda

3.1.6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka DIY mencapai 6,00% dari total angkatan kerja. Tren yang semakin menurun terlihat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi DIY yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Data aktual menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka telah jauh berkurang menjadi 3,34%. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan terus menurun hingga menjadi 3,05% pada tahun 2016.

Jumlah angkatan kerja berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 7,13% atau dari 2.016.694 orang menjadi 1.872.912 orang. Jumlahnya kemudian naik sebesar 4% pada tahun 2012 menjadi 1.944.858 orang dan kembali turun sebesar 2% pada

tahun 2013 menjadi 1.910.959 orang. Diperkirakan jumlah angkatan kerja DIY pada tahun 2016 mencapai 1.971.396 orang atau naik sebesar 3,16% dibandingkan pada tahun 2013. Tabel 3.9. menyajikan data ketenagakerjaan DIY dari tahun 2009 sampai tahun 2016.

Tabel 3.9
Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja DIY
Tahun 2009 - 2016

Tahun	Bekerja		Pengangguran Terbuka		Jumlah Angkatan Kerja
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2009	1.895.648	94	121.046	6,00	2.016.694
2010	1.775.148	94,31	107.148	5,69	1.882.296
2011	1.798.595	96,03	74.317	3,97	1.872.912
2012	1.867.708	96,03	77.150	3,97	1.944.858
2013	1.847.070	96,66	63.889	3,34	1.910.959
2014*	1.892.495	96,7	64.532	3,30	1.957.027
2015*	1.901.379	96,87	61.422	3,13	1.962.801
2016*	1.911.292	96,95	60.104	3,05	1.971.396

Sumber: BPS DIY

3.1.7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. Di DIY, sebaran penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Selama ini kegiatan ekonomi DIY lebih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sehingga tidak terjadi pemerataan dalam berbagai hal seperti kesempatan kerja, fasilitas, dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, yang semua itu nantinya berdampak pada tidak meratanya tingkat pendapatan.

Data aktual dari tahun 2011 sampai tahun 2013, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY semakin menurun. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 16,18% penduduk DIY dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya telah berkurang menjadi 15,18%. Penurunan tingkat kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan dalam hal ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY serta menurunkan tingkat kemiskinan. Disamping itu, upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan DIY dilakukan secara simultan. Hal tersebut dimulai dengan memberikan bantuan

keuangan khusus (BKK) untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, RTS tersebut juga dijadikan sasaran dalam program/kegiatan yang dilakukan SKPD DIY.

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan DIY diperkirakan akan turun sebanyak 2% dibandingkan tahun 2013 menjadi 13,18%.

Tabel 3.10
Penduduk Miskin DIY Tahun 2011 – 2016

Tahun	Penduduk Miskin	Total Penduduk	% terhadap Total Penduduk
2011	564.300	3.487.325	16,18
2012	562.100	3.496.100	16,08
2013	535.180	3.525.300	15,18
2014*	502.633	3.553.100	14,15
2015*	484.208	3.580.300	13,52
2016*	475.225	3.604.900	13,18

Sumber: BPS

3.1.8. Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Besarnya Indeks Williamson berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya ketimpangan antar wilayah semakin rendah. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Indeks Williamson DIY memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu serta masalah tidak meratanya pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi menjadikan ketimpangan antar wilayah di DIY semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Williamson dari sebesar 0,441 pada tahun 2007 menjadi 0,454 pada tahun 2011. Diperkirakan ketimpangan regional DIY akan terus meningkat hingga mencapai 0,462 pada tahun 2016.

Tabel 3.11
Indeks Williamson DIY Tahun 2007 – 2016

Tahun	Indeks Williamson
2007	0,441
2008	0,443
2009	0,442
2010	0,451
2011	0,454
2012*	0,455

Tahun	Indeks Williamson
2013*	0,457
2014*	0,459
2015*	0,461
2016*	0,462

Sumber: Analisis PRDB DIY, BPS, Bappeda, diolah

3.1.9. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui Indeks Gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Simon Kuznets melalui pemikirannya mengenai extensive growth menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Akan tetapi, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Tabel 3.12
Indeks Gini DIY Tahun 2007 – 2016

Tahun	Indeks Gini
2007	0,366
2008	0,36
2009	0,38
2010	0,41
2011	0,4
2012	0,43
2013	0,439
2014*	0,44
2015*	0,45
2016*	0,455

Sumber: Analisis PRDB DIY, BPS, Bappeda, diolah

Pada tabel 3.12. terlihat bahwa Indeks Gini DIY memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan Indeks Gini terjadi seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY. Hal ini sesuai dengan pemikiran Kuznets mengenai extensive growth. Terjadinya peningkatan Indeks Gini secara terus-menerus dimulai tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun 2012 Indeks Gini DIY adalah sebesar 0,43 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%. Diperkirakan pada tahun 2016 Indeks Gini DIY akan mencapai 0,455 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,99%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2016

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2013 (n-2)	Tahun 2014 (n-1)	Proyeksi Tahun 2015 (n)	Proyeksi Tahun 2016 (n+1)
PENDAPATAN	2.583.088.480.752,71	3.100.197.642.855,00	3.648.949.719.135,05	3.930.844.900.784,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.216.134.468.845,71	1.233.738.561.833,00	1.260.733.194.326,48	1.406.008.528.671,96
Pajak Daerah	1.063.314.117.923,00	1.098.908.544.000,00	1.110.416.969.984,00	1.243.667.006.382,08
Hasil Retribusi Daerah	38.043.014.004,85	36.670.321.618,00	48.331.770.320,88	52.198.311.946,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.817.517.188,12	45.505.543.305,00	42.373.265.295,76	45.763.126.519,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.959.817.729,74	52.654.152.910,00	59.611.188.725,84	64.380.083.823,91

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2013 (n-2)	Tahun 2014 (n-1)	Proyeksi Tahun 2015 (n)	Proyeksi Tahun 2016 (n+1)
DANA PERIMBANGAN	957.561.850.914,00	1.038.621.026.022,00	1.153.790.615.761,77	1.287.656.390.341,88
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	94.731.182.914,00	101.565.866.022,00	114.727.482.782,57	123.905.681.405,17
Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	1.039.063.132.979,20	1.163.750.708.936,70
Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	409.392.162.993,00	827.838.055.000,00	1.234.425.909.046,80	1.237.179.981.770,54
Pendapatan Hibah	10.291.886.370,00	9.176.500.000,00	6.713.315.802,00	7.250.381.066,16
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	399.100.276.623,00	818.661.555.000,00	1.227.712.593.244,80	1.229.929.600.704,38
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-
BELANJA	2.509.508.667.286,35	3.330.069.349.990,00	3.723.459.156.462,03	3.938.702.026.316,35
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.393.543.166,78	1.547.087.119.162,00	1.301.668.975.288,20	1.405.138.430.969,04
Belanja Pegawai	491.076.722.446,00	525.443.855.620,00	609.044.588.444,38	669.949.047.288,82
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	437.079.581.000,00	488.152.850.980,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
Belanja Bansos	12.509.468.500,00	14.631.602.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	376.702.290.858,78	378.007.606.000,00	333.125.090.995,20	373.100.101.914,62
Bantuan Keuangan	123.025.480.362,00	130.851.204.562,00	129.499.295.848,63	132.089.281.765,60
Belanja Tidak Terduga	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	1.069.115.124.119,57	1.782.982.230.828,00	2.421.790.181.173,82	2.533.563.595.347,31
Belanja Pegawai	143.752.008.434,00	96.354.895.896,00	130.070.049.298,70	132.671.450.284,68
Belanja Barang dan Jasa	555.967.321.646,57	1.287.507.707.310,00	737.788.584.032,72	811.567.442.435,99

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2013 (n-2)	Tahun 2014 (n-1)	Proyeksi Tahun 2015 (n)	Proyeksi Tahun 2016 (n+1)
Belanja Modal	369.395.794.039,00	399.119.627.622,00	353.931.547.842,40	389.324.702.626,64
DEFISIT/SURPLUS	73.579.813.466,36	(229.871.707.135,00)	(74.509.437.326,98)	(7.857.125.531,97)
PEMBIAYAAN	308.607.708.591,84	229.871.707.135,00	89.525.738.886,99	7.857.125.531,97
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	403.201.658.867,84	280.821.707.135,00	206.650.738.886,99	138.392.125.531,97
SILPA	379.241.941.052,56	280.821.707.135,00	206.650.738.886,99	124.982.125.531,97
Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,28	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	20.368.526.960,00	-	-	13.410.000.000,00
Penerimaan dari Penyusutan	366.590.013,00	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	94.593.950.276,00	50.950.000.000,00	117.125.000.000,00	130.535.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal	94.593.950.276,00	50.950.000.000,00	117.125.000.000,00	130.535.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
DPAL	-	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-	-

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran

horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;

6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumberpungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2015 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

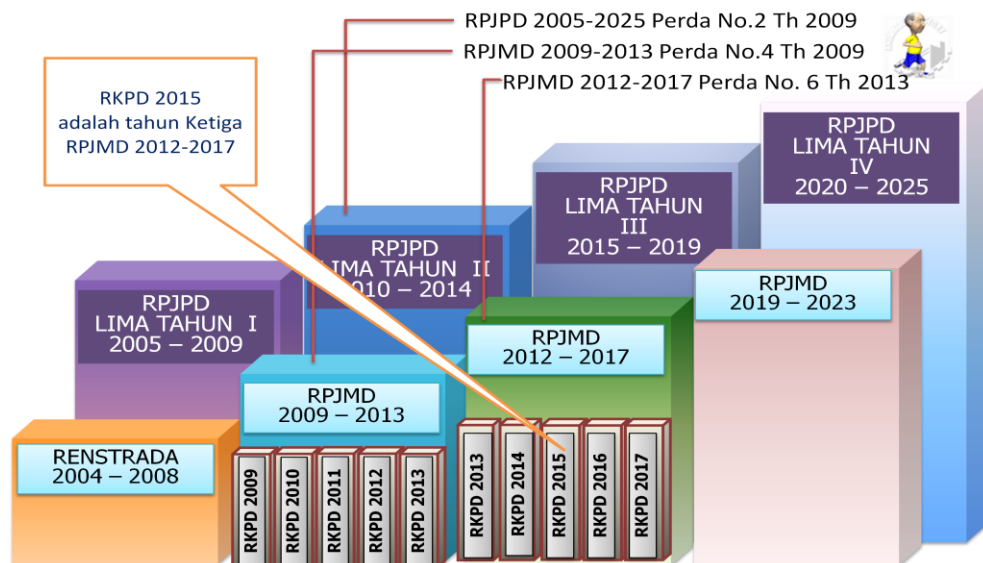
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

BAB IV
TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015-2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015-2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.



Gambar 4.1
Posisi Dokumen RKPD 2015
Terhadap RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029
Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015-2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi
 - b. Perwujudan sistem transportasi DIY
 - c. Perwujudan Sistem prasarana lainnya
 - d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi
 - e. Perwujudan kawasan budidaya
 - f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.

Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Tahapan Tahun 2015 sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan RPJMD 2012-2017 adalah mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap.

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.

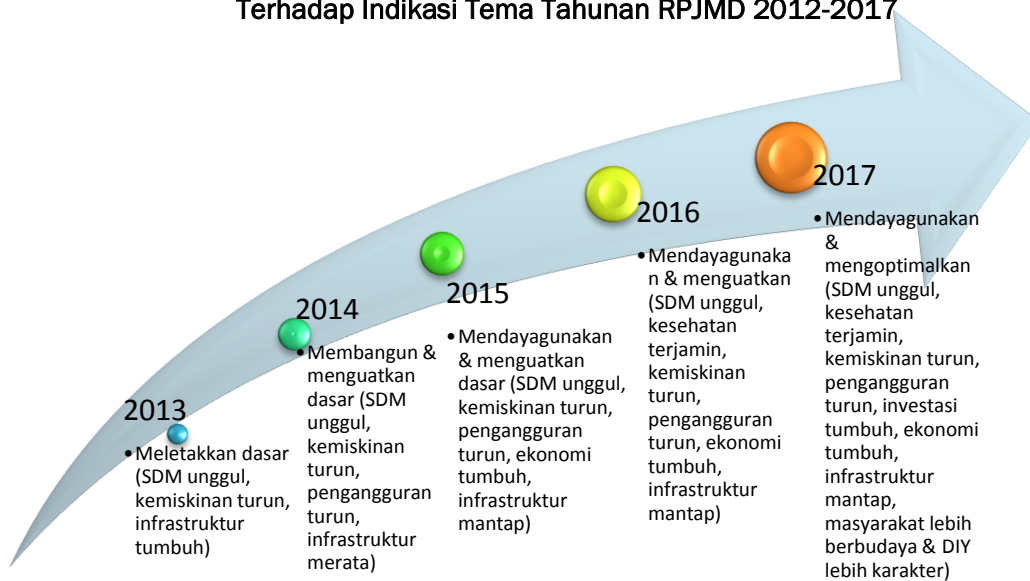
Tabel 4.1
Tahapan Utama RPJPD 2005-2025

RPJPD Lima Tahun I (2005 - 2009)	RPJPD Lima Tahun II (2010 - 2014)	RPJPD Lima Tahun III (2015 - 2019)	RPJPD Lima Tahun IV (2020 - 2025)
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect & forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.
<i>Keyword:</i> Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	<i>Keyword:</i> Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan	<i>Keyword:</i> Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun	<i>Keyword:</i> Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita

2012-2017

Tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.2
Posisi Dokumen RKPD 2015
Terhadap Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017

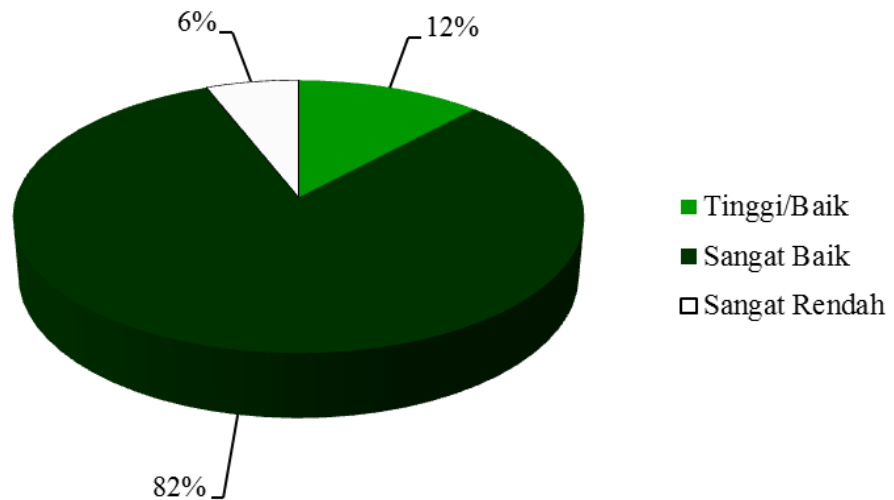


4. Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 adalah "*Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan*". Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.
5. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya RKPD Tahun 2013.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur tahun 2013 berjumlah 17, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 16 IKU telah memenuhi kriteria tinggi (2 IKU) maupun bahkan, lebih banyak yang masuk kriteria sangat baik (14 IKU). Satu IKU yaitu "Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya" belum ditentukan target kinerjanya pada tahun 2013. "Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya" mempunyai target N/A dan realisasi 0 disebabkan adanya penyesuaian indikator kinerja lama pada tahapan RPJMD yang lama menjadi indikator kinerja baru sesuai RPJMD 2012-2017 akan dihitung mulai tahun 2014. Dengan demikian, pada tahun 2014 baru akan dilakukan perhitungan jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembinaan model pendidikan berbasis budaya dan model unggulan mutu pendidikan.

Untuk 2 IKU yang masuk kriteria baik, adalah IKU "Lama Tinggal Wisatawan Nusantara" yang realisasinya mencapai 79,50% dari target, dan IKU "Lama tinggal wisatawan mancanegara" yang mencapai 88,37% dari target.

Gambar. Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013

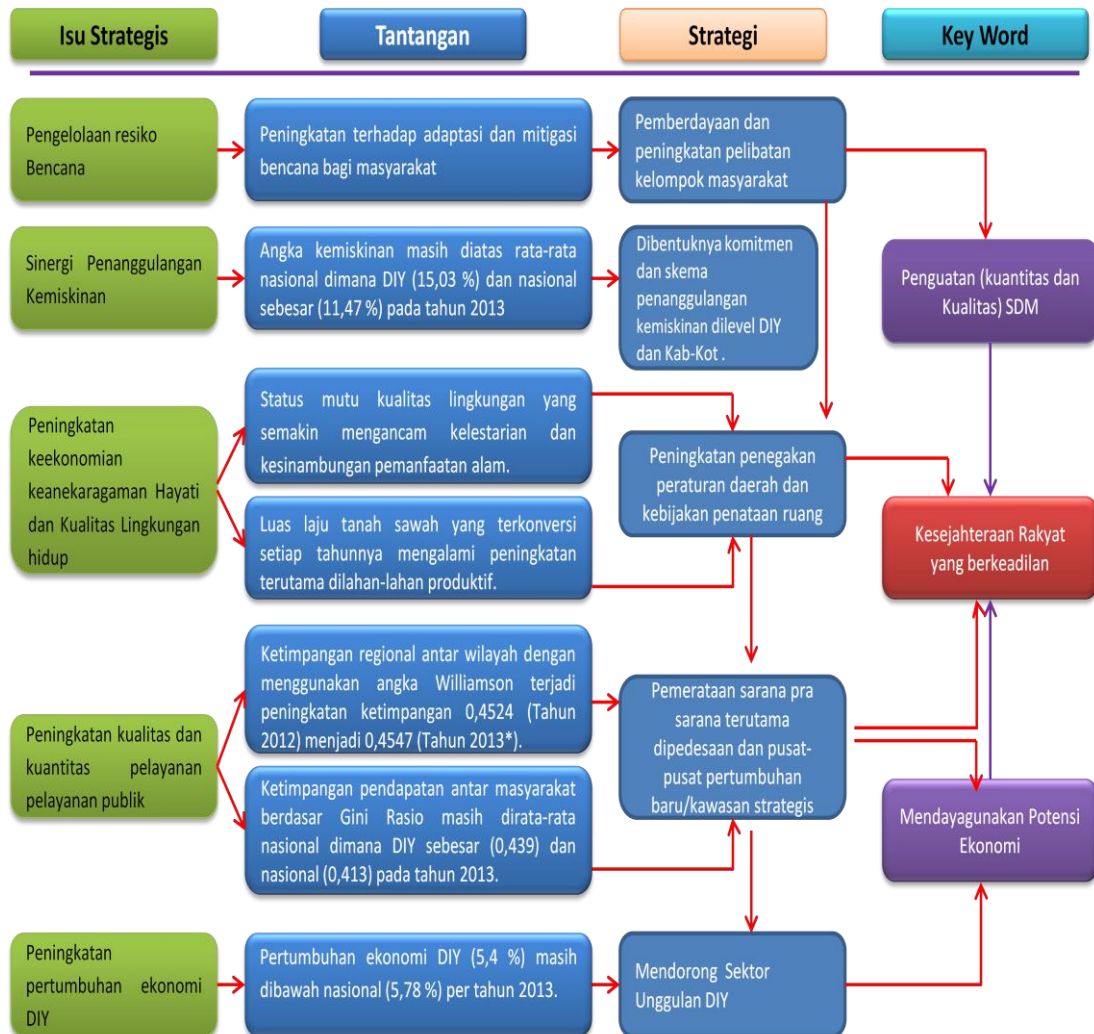


Sementara 14 IKU yang lain, pencapaiannya masuk kategori sangat baik ($\geq 91\%$). Bahkan, 7 IKU diantaranya, mencapai lebih dari 100% dari target tahun 2013. Mayoritas IKU Gubernur 2013 telah berhasil dicapai dengan kriteria tinggi (12%) dan sangat baik (82%). Untuk pencapaian dengan kriteria sangat baik, bahkan 6 dari 14 IKU atau 42,85% diantaranya, realisasinya bahkan mencapai lebih dari 100% dari rencana kinerja yang dicanangkan.

- b. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
- 1) Sinergi Penanggulangan Kemiskinan, Angka kemiskinan masih diatas rata-rata nasional dimana DIY (15,03 %) dan nasional sebesar (11,47 %) pada tahun 2013.
 - 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY, Pertumbuhan ekonomi DIY (5,4 %) masih dibawah nasional (5,78 %) per tahun 2013.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik:
 - a) Cakupan Kunjungan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49%).

- b) Ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka Williamson terjadi peningkatan ketimpangan 0,4524 (Tahun 2012) menjadi 0,4547 (Tahun 2013*).
 - c) Ketimpangan pendapatan antar masyarakat berdasar Gini Rasio masih dirata-rata nasional dimana DIY sebesar (0,439) dan nasional (0,413) pada tahun 2013.
 - d) Pemenuhan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.
- 4) Pengelolaan resiko Bencana,
- a. Peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
 - b. Kawasan rawan bencana alam di DIY perdasarkan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi.
- 5) Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup.
- a. Status mutu kualitas lingkungan yang semakin mengancam kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan alam. Kualitas nilai baku 9 sungai di DIY yang dalam kondisi tercemar pada tahun 2012 dengan metode *storet* (.....). Kualitas air tanah yang juga mengalami degradasi terutama dikarenakan adanya kandungan mangan, bakteri *coliform* dan bakteri coli tinja.
 - b. Luas laju tanah sawah yang terkonversi setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dilahan-lahan produktif.

Gambar. Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015



Mendasarkan sebagaimana point-point diatas adapun tema RKPD DIY Tahun 2015 adalah **Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan**. Menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, baik itu masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks. Mendayagunakan Potensi Ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan. Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2015 adalah:

1. Sosial Budaya.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:

- a. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya.
- b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan.
- c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan
- d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat
- g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat.
- h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan). *Kedua*, RAD MDGs 2011-2015, yang merupakan tahun terakhir RAD percepatan capaian MDGs. Status capaian terdiri 19 indikator sudah tercapai, 36 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus yakni: penurunan angka kemiskinan dan *un need meet* dalam pelaksanaan keluarga berencana dimana target 5,5 % sedang realisasi 8% di Tahun 2013.

2. Ekonomi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan Melek Huruf

c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

4. Hukum dan Aparatur;

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja pemerintah daerah
- b. Pengelolaan keuangan daerah

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD 2012-2017 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik).

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

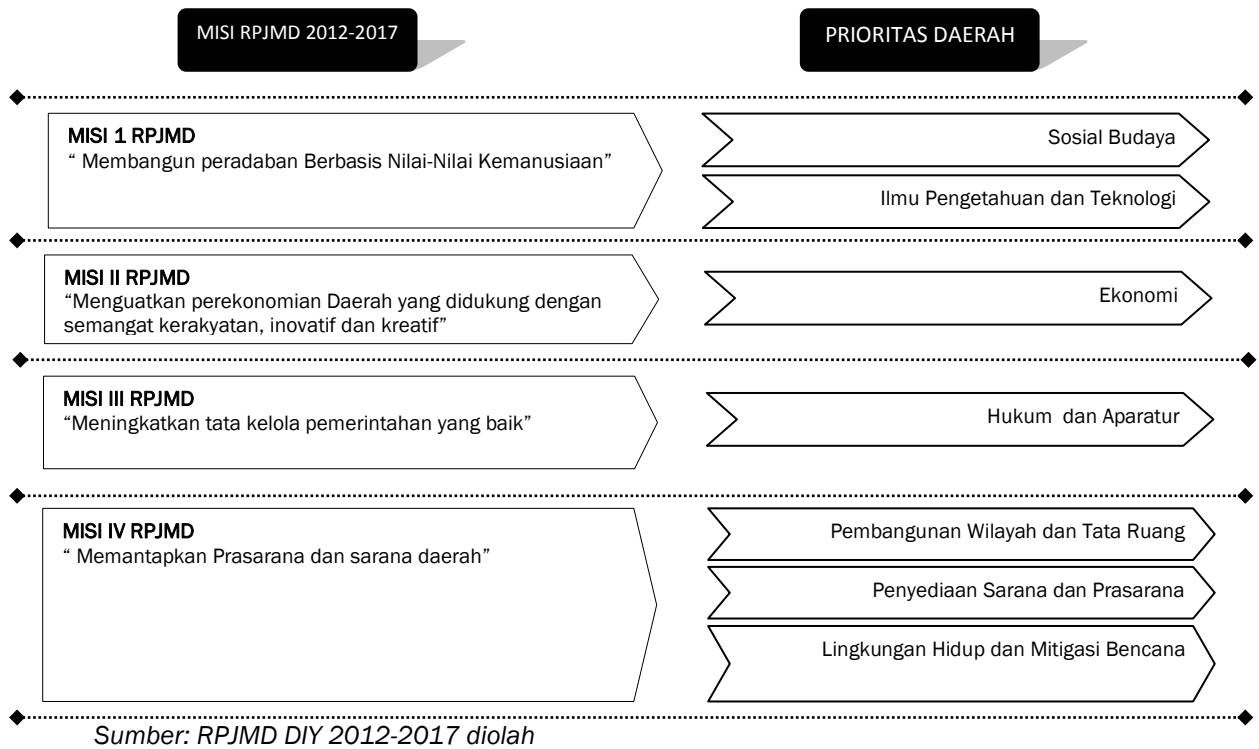
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energy yang berkesinambungan.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang).

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik disisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat dipedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).



Gambar 4.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah 2015
Dengan RPJMD DIY 2012-2017

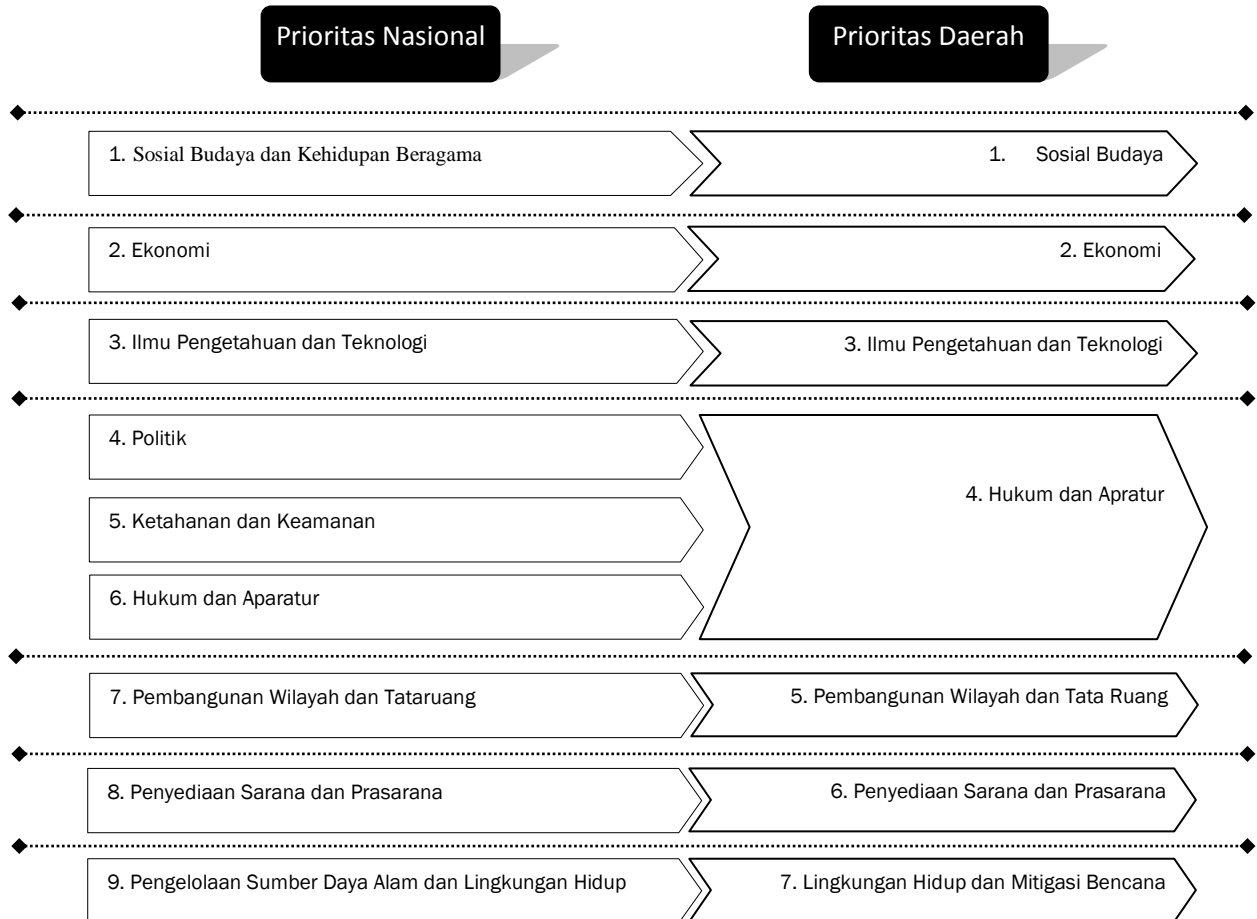
7. Lingkungan Hidup dan mitigasi Bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah). *Kedua*, mendukung pelaksanaan RAD Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2012-2020.

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2015 bertumpu pada 9 prioritas nasional yaitu: (1). Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2). Ekonomi; (3). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4). Politik; (5). Ketahanan dan Kemanan; (6) Hukum dan Aparatur; (7). Pengembangan Wilayah dan tata ruang; (8). Penyediaan Sarana dan Prasarana dan (9) Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sebagai kelanjutan upaya mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan RKP dan RKPD, maka perlu dilakukan penyelarasan antara prioritas daerah dengan nasional. Penyelarasan prioritas daerah dan nasional dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

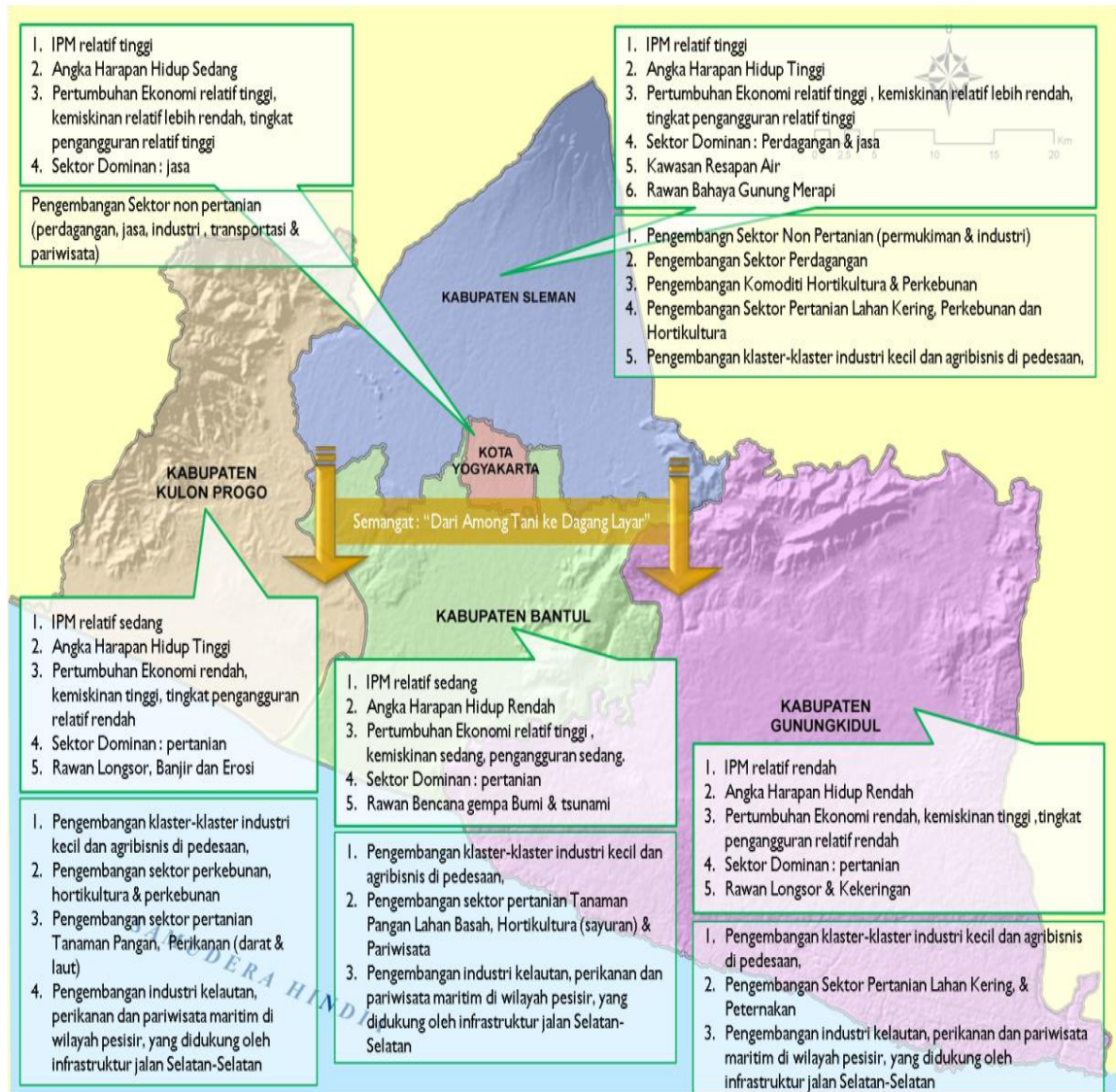


Gambar 4.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

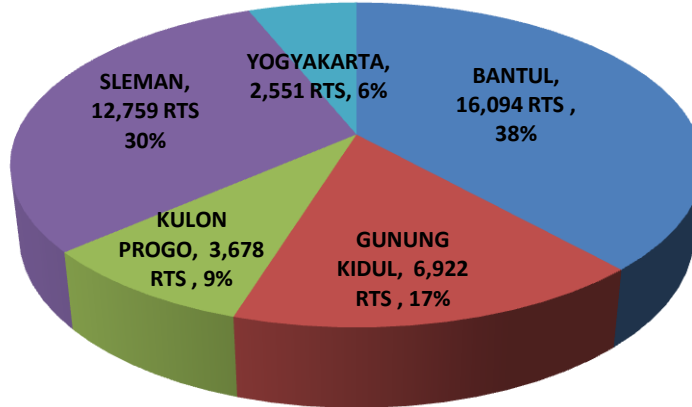
Berikut merupakan gambaran kondisi per-wilayah Kabupaten-Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta potensi pengembangannya.



Gambar 4.5
Arah Pembangunan Kewilayahan DIY

Berdasarkan data dan penentuan target sasaran rumah tangga miskin dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun

2014 diperoleh target sasaran rumah tangga miskin sebesar 42.004 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sasaran RTS tersebut terbagi dalam proporsi kabupaten-kota sebagai berikut:



Sumber: BPS DIY, Tahun 2014 diolah

Gambar 4.6

Persentase proporsi RTM berdasarkan Kabupaten-Kota, Tahun 2014

Pendetailan atas rumah tangga sasaran berdasarkan Jenis pekerjaan dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas program pengurangan kemiskinan. Adapun pembagian sasaran berdasarkan sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.2

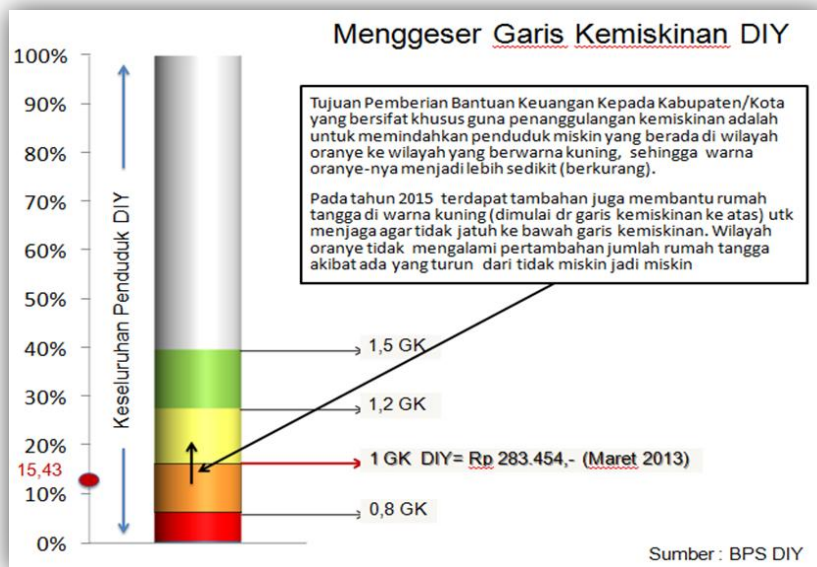
Jumlah Sasaran RTS berdasarkan sektor lapangan usaha dan Kabupaten-Kota Tahun 2014

JENIS LAPANGAN USAHA	BANTUL	GUNUNG KIDUL	KOTA YOGYA	KULON PROGO	SLEMAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
Lainnya	215	82	141	9	238	685
Tidak bekerja	621	149	136	118	627	1,651
Pertanian tanaman padi/palawija	3,754	4,234	3	1,187	3,388	12,566
Horikultura	62	36	-	221	135	454
Perkebunan	162	35	1	242	101	541
Perikanan	82	19	6	5	61	173
Peternakan	592	335	11	312	368	1,618
Kehutanan dan pertanian lain	85	74	2	39	81	281
Pertambangan/ penggalian	199	56	11	24	231	521
Industri pengolahan	1,947	248	155	337	739	3,426
Listrik, gas, air	32	5	3	1	19	60
Bangunan/konstruksi	4,525	864	237	788	4,098	10,512

JENIS LAPANGAN USAHA	BANTUL	GUNUNG KIDUL	KOTA YOGYA	KULON PROGO	SLEMAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
Hotel dan rumah makan	118	23	101	4	81	327
Perdagangan	1,777	509	658	211	1,066	4,221
Transportasi dan pergudangan	684	81	284	20	326	1,395
Kuangan dan asuransi	10	3	2	-	18	33
Informasi dan komunikasi	11	4	11	-	16	42
Jasa	1,218	165	789	160	1,166	3,498
TOTAL	16,094	6,922	2,551	3,678	12,759	42,004

Sumber: BPS DIY, Tahun 2014

Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013 dan 2014. Penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas Data PPLS TNP2K yang mendata 40 % penduduk berpendapatan terendah. Berdasarkan data tersebut kemudian diambil kebijakan penurunan kemiskinan sebesar 2 %, dengan sasaran RTS yang posisinya diambang garis kemiskinan BPS sebagaimana skema gambar dibawah.



Gambar 4.7

Skema Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberian Bantuan kepada Kabupaten-Kota Tahun 2014

Kebijakan rencana pembangunan untuk penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program-program regular namun juga melalui akselerasi terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan. Wujud riil dari kegiatan akselerasi

penurunan kemiskinan di DIY adalah dengan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten-kota yang bersifat khusus.

Beberapa lokasi kecamatan sebagai sasaran kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan terdistribusi pada Kabupaten Sleman terdapat 5 (lima) Kecamatan; Gunungkidul 3 (Tiga) kecamatan; Kota Yogyakarta 2 (dua) Kecamatan; kulon Progo 3 (tiga) Kecamatan dan Bantul 6 (enam) Kecamatan. Penentuan kecamatan terpilih didasarkan atas proporsi sebaran RTS baik dilevel antar Kabupaten-Kota dan dilevel Kecamatan dalam satu Kabupaten-kota.



Sumber: Bappeda DIY, 2013

Gambar 4.8
Titik Lokasi Sasaran Pengurangan Kemiskinan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di tingkat kabupaten/kota antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.3

Sasaran kewilayahan tahun 2015

No	Kabupaten-Kota	IPM	Kemiskinan	Tingkat Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi
1	2	3	4	5	6
1	Kota Yogyakarta	81.09	9.15 %	3.46 %	6.2 %
2	Sleman	80	15 %	6.45 %	5.93 %
3	Gunungkidul	71.83	22.47 %	1.53 %	4.89 %
4	Kulon Progo	76.67	17.73 %	1.93 %	5.30 %
5	Bantul	75.85	14.65 %	2.57 %	6.14 %

Sumber: RPJMD 2012-2017

4.4. Sasaran Pembangunan

Sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Prioritas dan Sasaran tahun 2015

No	Prioritas	Sasaran
1	2	3
1	Sosial Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
		Harapan hidup masyarakat meningkat
2	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek huruf masyarakat meningkat
		Aksesibilitas Pendidikan meningkat
		Daya Saing pendidikan meningkat
3	Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat
		Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat
		Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat
4	Penyediaan sarana dan Prasarana	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
		Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
5	Pembangunan wilayah dan tata ruang	Ketimpangan wilayah menurun
		Pemanfaatan ruang terkendali.
6	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkat
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meningkat
7	Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Tabel. Keselarasan Isu strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	SASARAN
1	2	3	4
1	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	Sosial Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
			Harapan hidup masyarakat meningkat
		Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek huruf masyarakat meningkat
			Aksesibilitas Pendidikan meningkat
		Daya Saing pendidikan meningkat	
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY	Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat
			Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat
			Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik	Penyediaan sarana dan Prasarana	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
			Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
4	Pengelolaan resiko Bencana	Pembangunan wilayah dan tata ruang	Ketimpangan wilayah menurun
			Pemanfaatan ruang terkendali.
		Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
5	Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup	lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Target Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2015
1	2	3	4
1.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	50 %
2.	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf.	93,25 %
3.	Aksesibilitas Pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah.	10,8 Tahun
4.	Daya Saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	10 %
5.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.	73,97 Tahun
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2015
1	2	3	4
6.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	7,8 Juta
7.	Ketimpangan wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4501
8.	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,2898
9.	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara.	2.337.000 orang
	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.190 orang
10.	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara.	2,30 Hari
	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan mancanegara.	2,35 Hari

11.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B
12.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK.	WTP
13.	Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	38,57 %
14.	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	9,43 %
15.	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	70 %

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Acuan pedoman teknis dalam penyusunan rancangan Awal RKPD 2015 oleh Provinsi dan Kabupaten-Kota mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1. Diingatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun oleh Pemerintah provinsi, Kabupaten-Kota sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, serta antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2015 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan provinsi, kabupaten-kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten-Kota Tahun 2015 agar berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang RPJMD.
3. Diharapkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan dan Mempertimbangkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's).
 - b. Menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.

- c. Antisipasi prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana.
- d. Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun 2013 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu fasilitas yankes, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penanggulangan masalah gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta mendorong Jamkesta
- f. Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencermatan air, udara dan tanah dipedesaan dan perkotaan.
- g. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan bantaran sungai dan kali bersih, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong-kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional.
- h. Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- i. Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni,

menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

- j. Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, control sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- k. Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah.
- l. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM.
- m. Mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- n. Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan.
- o. Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap

perempuan yang responsive gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking) dan kekerasan seksual.

- p. Dukungan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- q. Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, kemudahan akses antar moda transportasi.
- r. Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat serta pengembangan kemitraan media.
- s. Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan konflik sosial.
- t. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas.
- u. Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian.

- v. Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan asset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah.
- w. Mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar Negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	1.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %
2	1.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %
3	1.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %
4	1.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang
5	1.01.19	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
6	1.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %
7	1.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %
8	1.01.24	PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %
9	1.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	1.904 Peserta didik
10	1.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
11	1.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %
12	1.01.29	PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %
13	1.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %
14	1.02.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %
15	1.02.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
16	1.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %
17	1.02.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %
18	1.02.33	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase keterdeiaan obat esensial generik di fasyankes dasar	96 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
19	1.02.48	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %
20	1.02.49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel	69.6 %
21	1.02.50	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN LANSIA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)	80 %
22	1.02.51	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %
23	1.02.52	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	98 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
24	1.02.53	PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	79 %
25	1.02.54	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Grhasia	54.87 %
26	1.02.55	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %
27	1.02.56	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %
28	1.02.57	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
29	1.03.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Pengurangan jumlah titik genangan	45.9 %
30	1.03.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %
31	1.03.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100 %
32	1.03.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
33	1.03.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det
34	1.03.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det
35	1.03.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	80 titik
36	1.03.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %
37	1.03.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	60 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
38	1.03.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	65 %
39	1.03.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	51 %
40	1.03.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	84 %
41	1.03.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %
42	1.03.42	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %
43	1.03.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	32.85 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
44	1.03.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penduduk berakses air minum	80.85 %
45	1.03.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR
46	1.03.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	46 %
47	1.03.47	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %
48	1.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 - Wajib	04 - Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %
49	1.04.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	1 - Wajib	04 - Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	54 %
50	1.04.22	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH	1 - Wajib	04 - Perumahan	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	40 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
51	1.05.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	16 kawasan strategis
52	1.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi	70 %
53	1.05.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %
54	1.05.18	PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY*	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %
55	1.05.19	PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN*	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %
56	1.06.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
57	1.06.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %
58	1.06.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %
59	1.06.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %
60	1.06.26	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
61	1.06.27	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %
62	1.06.28	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %
63	1.06.29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN*	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	12 %
64	1.07.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	40 %
65	1.07.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
66	1.07.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %
67	1.07.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi Di DIY	44.17 %
68	1.07.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %
69	1.07.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
70	1.07.21	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	25.2 %
71	1.07.22	PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkoataan yogyakarta	40 %
72	1.07.23	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %
73	1.07.24	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN*	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %
74	1.08.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	380 unit usaha

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
75	1.08.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %
76	1.08.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha
77	1.08.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	25 %
78	1.08.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
79	1.08.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan	35 %
80	1.08.25	PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA*	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis budaya dalam rangka mendukung keistimewaan	6.5 %
81	1.09.16	PROGRAM PERBAIKAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH*	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %
82	1.09.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	25 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
83	1.09.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang
84	1.10.15	PROGRAM PENATAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1 - Wajib	10 - Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %
85	1.11.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
86	1.11.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN*	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %
87	1.11.20	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %
88	1.11.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus
89	1.11.22	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96.66 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
90	1.11.23	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11.06 %
91	1.12.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	0.51 %
92	1.12.26	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA*	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %
93	1.12.27	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase tahapan keluarga sejahtera	44.1 %
94	1.12.28	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	23 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
95	1.13.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase pelayanan panti asuhan/jompo sesuai standar pelayanan	2.28 %
96	1.13.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %
97	1.13.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
98	1.13.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA *	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %
99	1.13.25	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5.51 %
100	1.13.26	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
101	1.13.27	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8.51 %
102	1.13.28	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %
103	1.13.29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	6.34 %
104	1.13.30	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
105	1.13.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %
106	1.14.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %
107	1.14.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %
108	1.14.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
109	1.14.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %
110	1.14.20	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %
111	1.15.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM	229467 unit usaha
112	1.15.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	180 UMKM Baru

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
113	1.15.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah koperasi aktif	2351 koperasi
114	1.16.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1 - Wajib	16 - Penanaman modal	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah
115	1.16.18	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI	1 - Wajib	16 - Penanaman modal	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin
116	1.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
117	1.17.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %
118	1.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %
119	1.17.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %
120	1.17.19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
121	1.18.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra
122	1.18.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Jumlah kelompok wirausaha muda	365 kelompok
123	1.18.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAMRAGA*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang
124	1.18.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAMRAGA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
125	1.18.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi
126	1.18.23	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali
127	1.19.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus
128	1.19.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
129	1.19.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus
130	1.19.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus pekat	314 kasus
131	1.19.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %
132	1.19.23	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
133	1.20.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %
134	1.20.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %
135	1.20.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten-Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
136	1.20.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %
137	1.20.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
138	1.20.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %
139	1.20.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %
140	1.20.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
141	1.20.27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %
142	1.20.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH*	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
143	1.20.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %
144	1.20.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %
145	1.20.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
146	1.20.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %
147	1.20.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
148	1.20.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase produk hukum yang dibatalkan	0 %
149	1.20.36	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	100 %
150	1.20.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
151	1.20.39	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %
152	1.20.40	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	22.95 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
153	1.20.41	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	100 %
154	1.20.42	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit
155	1.20.45	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
156	1.20.46	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %
157	1.21.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %
158	1.21.17	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Jumlah desa pangan	53 Desa
159	1.21.18	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
160	1.21.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN*	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %
161	1.21.20	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %
162	1.22.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN*	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %
163	1.22.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
164	1.22.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %
165	1.22.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase profil desa sesuai standar	70 %
166	1.23.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	1 - Wajib	23 - Statistik	persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	97 %
167	1.24.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
168	1.24.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %
169	1.24.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %
170	1.25.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang
171	1.25.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
172	1.25.19	PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %
173	1.25.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	80 %
174	1.25.21	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Layanan pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	100 %
175	1.26.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN*	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
176	1.26.16	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %
177	1.26.17	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Peningkatan pemustaka	20 %
178	2.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas
179	2.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU
180	2.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
181	2.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton
182	2.01.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton
183	2.02.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %
184	2.02.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Luas lahan kritis	26000 Ha
185	2.02.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN*	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase kerusakan hutan	29.14 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
186	2.02.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %
187	2.02.21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase luas hutan	27.63 Ha
188	2.02.26	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	NTP sektor perkebunan	128 %
189	2.02.31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Produksi perkebunan	88000 ton
190	2.03.21	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
191	2.03.25	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)
192	2.03.26	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH	2 - Pilihan	03 - ESDM	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)
193	2.03.27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
194	2.03.28	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	11 %
195	2.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang
196	2.04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW
197	2.04.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
198	2.04.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah desa wisata	80 Desa wisata
199	2.05.17	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen
200	2.05.18	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	1530 Orang
201	2.05.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
202	2.05.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP*	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	6900 ton
203	2.05.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan per kapita dan angka ketersediaan	15.63 Kg/kapita/Th
204	2.05.24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha
205	2.05.25	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	0.11 .

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
206	2.05.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	NTP sektor perikanan	116.89 %
207	2.06.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit
208	2.06.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$
209	2.06.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Jumlah SIUP ¹	45106 SIUP

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
210	2.07.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH*	2 - Pilihan	07 - Industri	Jumlah IKM	81907 IKM
211	2.07.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	2 - Pilihan	07 - Industri	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah
212	2.07.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF*	2 - Pilihan	07 - Industri	Jumlah IKM Industri Kreatif	34018 IKM kreatif
213	2.08.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	2 - Pilihan	08 - Ketransmigrasian	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %
214	3.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3 - Umum	00 - -	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
215	3.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3 - Umum	00 - -	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %
216	3.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3 - Umum	00 - -	Prosentase disiplin aparatur	100 %
217	3.00.04	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	3 - Umum	00 - -	Prosentase kelancaran pindah dan purna PNS	100 %
218	3.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	3 - Umum	00 - -	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %
219	3.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3 - Umum	00 - -	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang mengembang misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah periode 2012 - 2017. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2015 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

SUMADI

VI-1

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007